

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Gambaran Umum Subyek Penelitian**

Dalam kajian ini hendak menguraikan profil dari situs – situs media lokal dan media nasional yang telah dipilih menjadi objek penelitian, seperti Kompas.com dan Beritabanten.com, penerapan model *framing* yang dirumuskan Zhongdang Pan serta Gerald M. Kosicki. Kemudian, dari temuan studi yang telah didapat peneliti, akan dilakukan perbandingan pembedaan pemberitaan kasus pagar laut tangerang pada media daring kompas.com serta beritabanten.com periode januari – februari 2025.

#### **4.1.1. Profil Perusahaan Kompas.com**



Gambar 4.1. Logo Perusahaan Kompas.com (LinkedIn, 2025)

Portal berita nasional Kompas.com sendiri berdiri pada 14 September 1995 dan ada di bawah naungan PT Kompas Media Nusantara, menjadi bagian dari Kompas Gramedia Group (sering disingkat KG Media) dan memiliki tagline yang digunakan sejak tahun 2017 hingga sekarang adalah “Jernih Melihat Dunia”. Tagline tersebut mencerminkan komitmen Kompas sebagai media daring yang memenuhi kebutuhan informasi publik, dengan menyampaikan berita secara menyeluruh, objektif, dan independen, serta tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, ekonomi, maupun kekuasaan. (Maulana A. H., 2022). Kompas.com memiliki visi untuk tumbuh sebagai perusahaan terbesar, terdepan, terintegrasi, dan memiliki jangkauan luas di kawasan Asia Tenggara, melalui kegiatan berbasis pengetahuan yang bertujuan membentuk rakyat yang berpendidikan, tercerahkan,

menjunjung keberagaman, serta berkeadilan dan sejahtera. Adapun misinya adalah menjadi media daring yang terpercaya dan mampu menyajikan informasi, wawasan, serta hiburan yang bermanfaat bagi publik. (Maulana A. H., 2022). Kompas.com juga terafiliasi dengan Kompas (cetak), Kompas TV, radio Sonora, Tribun Network, dan Gramedia. Namun, editorialnya terpisah dari Kompas (cetak), dengan staf redaksi dan arah berita yang mandiri.

#### 4.1.2. Profil Perusahaan Beritabanten.com



The logo for Beritabanten.com consists of the word "BERITA" in a bold, red, sans-serif font, positioned above the word "BANTEN" in a bold, black, sans-serif font. Behind the text is a stylized graphic element resembling a speech bubble or a drop, with a light green top half and a light red bottom half, separated by a white curved line.

Gambar 4.2. Logo Perusahaan Beritabanten.com (Beritabanten.com, 2025)

Beritabanten.com ialah portal berita daring yang berdiri sejak 2018 di bawah naungan PT Media Berita Banten, berperan sebagai media lokal yang menyajikan informasi terkini dan faktual seputar wilayah Banten, mengusung gaya pemberitaan ringkas dan aktual tanpa afiliasi dengan media besar lainnya, namun Beritabanten.com mencatat Pedoman Media Siber dan Kode Etik Jurnalistik yang menunjukkan komitmen pada praktik jurnalistik standar. Beritabanten.com mengedepankan nilai kedekatan, dampak, dan relevansi lokal yang mengadopsi gaya ringkas dan faktual dengan sub-kategori seperti Banten, hukum/kriminal, opini, nasional, internasional, gaya hidup. Serta menekankan *breaking news* dan *terpopuler* yang memperlihatkan struktur berita aktual, dekat, dan memiliki dampak lokal. Seperti berita “*Jaksa Agung RI resmikan RS Adyaksa Kabupaten Serang (27 Sep 2024) – aspek dampak sosial dan fasilitas publik*”. Beritabanten.com merupakan situs yang cukup aktif dan diakses banyak pengunjung meskipun data statistik tidak ditampilkan publik. Keberlanjutan sejak 2018 dan konsistensi pembaruan menunjukkan bahwa portal ini terus diminati oleh audiens lokal Banten.

## 4.2. Hasil dan Pembahasan

### 4.2.1. Analisis Artikel Berita 1 Kompas.com

Judul : Pagar Misterius Membentang 30,16 Km di Laut Tangerang, Tak Ada Pihak yang Mengaku Beri Izin

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 8 Januari 2025

Ringkasan : Sebuah pagar bambu sepanjang 30,16 km ditemukan di laut Tangerang tanpa izin resmi, membentang di enam kecamatan dan berdampak pada ribuan nelayan. Investigasi oleh DKP dan instansi terkait menunjukkan indikasi pelanggaran aturan ruang laut, dengan dugaan upaya ilegal untuk menguasai wilayah laut tanpa izin KKPRL. Pemerintah tengah menindaklanjuti kasus ini.

Tabel 4.1. Analisis Artikel Berita 1 Kompas.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Pagar Misterius Membentang 30,16 Km di Laut Tangerang, Tak Ada Pihak yang Mengaku Beri Izin
	Lead	Sebuah pagar misterius sepanjang 30,16 km muncul di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten.
	Latar Informasi	Masalah pagar laut ditemukan pertama kali oleh DKP Banten di 14 Agustus 2024 dan ditindaklanjuti dengan inspeksi lapangan. Pemagaran ini melintasi 6 kecamatan dan 16 desa di Kabupaten Tangerang, mencakup wilayah aktivitas 3.888 nelayan dan 502 pembudi daya. Lokasi pemagaran ialah kawasan pemanfaatan umum yang diatur di Perda No. 1 Tahun 2023, termasuk zona vital seperti pelabuhan, perikanan, dan pariwisata. Pemagaran dilakukan tanpa rekomendasi dari camat maupun desa, dan ditemukan terus bertambah panjang dari 7 km hingga lebih dari 30 km dalam investigasi berulang yang melibatkan DKP, KKP, TNI AL, dan aparat terkait lainnya.
Kutipan	Kutipan Langsung: <ol style="list-style-type: none"><li>1. "Di dalam area pagar laut itu sudah juga dibuat kotak-kotak yang bentuknya lebih sederhana dari pagar laut itu sendiri," ujarnya, dikutip dari Antara, Selasa (7/1/2025).</li></ol>	

2. "Di sepanjang kawasan ini, 6 kecamatan dengan 16 desa ini, ada sekelompok nelayan, masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan. Ada 3.888 nelayan, kemudian ada 502 pembudi daya," jelas Eli.
3. "Setelah itu tanggal 4-5 September 2024, kami bersama dengan Polsus dari PSDKP (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) KKP dan juga tim gabungan dari DKP, kami kembali datang ke lokasi bertemu dan berdiskusi," lanjut Eli.
4. "Terakhir kami melakukan inspeksi gabungan bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut, Polairut, PSDKP KKP, PUPR Satpol-PP, Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang," tutur Eli.
5. "Kami bersama-sama melaksanakan investigasi di sana, dan panjang lautnya sudah mencapai 13,12 km. Terakhir malah sudah 30 km," sambung Eli.
6. "Pemagaran laut merupakan indikasi adanya upaya orang untuk mendapatkan hak atas tanah di laut secara tidak benar," kata Kusdiantoro.
7. "Aktivitas di ruang laut yang aturannya itu harus ada KKPRL kalau di atas kegiatan 30 hari," pungkas Kusdiantoro.

Kutipan tidak langsung:

Eli menjelaskan, area yang dipagari merupakan kawasan pemanfaatan umum berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2023 yang mencakup berbagai zona vital.

Eli mengungkapkan, pihaknya pertama kali mendapatkan informasi terkait pagar laut di Kab. Tangerang pada 14 Agustus 2024.

Dia menjelaskan, jika ada penggunaan ruang laut di atas 30 hari, maka wajib membutuhkan sejumlah izin, seperti izin KKPRL. (Kusdiantoro)

DKP Provinsi Banten, Eli Susiyanti.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, KPP, Kusdiantoro.

HAPPI, Rasman Manafi.

Sumber

Pernyataan Opini Penutup

Tidak Ada

Artikel ini ditutup dengan pernyataan HAPPI, Rasman Manafi. "Aktivitas di ruang laut yang aturannya itu harus ada KKPRL kalau di atas kegiatan 30 hari," pungkasnya.

Struktur Skrip

*What*

Penemuan pagar laut bambu sepanjang 30,16 km yang dibangun tanpa izin resmi

*Where*

Di perairan laut Kab. Tangerang, Banten.

*When*

Pertama kali dilaporkan pada 14 Agustus 2024, diberitakan pada 8 Januari 2025

	<i>Who</i>	Investigasi dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, Polairut, PSDKP KKP, PUPR Satpol-PP, Dinas Perikanan Kab. Tangerang, dan Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI)
	<i>Why</i>	Diduga ada upaya untuk menguasai ruang laut secara ilegal tanpa izin KKPRL
	<i>How</i>	Dipasang dengan bambu, paranet, dan karung berisi pasir; ditemukan lewat inspeksi lapangan dan investigasi gabungan
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	<p>Paragraf 1–6</p> <p>Proposisi kalimat: Paragraf 1 menyatakan bahwa sebuah pagar misterius sepanjang 30,16 km muncul di perairan Kab. Tangerang, tanpa diketahui siapa yang memasangnya atau mengantongi izin resmi.</p> <p>Paragraf 2 menjelaskan bentuk fisik pagar: tingginya sekitar 6 meter, tersusun dari cerucuk bambu, anyaman paranet, dan karung pasir, bahkan membentuk pola kotak atau labirin.</p> <p>Paragraf 3 menyampaikan bahwa pagar tersebut mencakup wilayah enam kecamatan dan 16 desa, berdampak langsung pada 3.888 nelayan dan 502 pembudi daya ikan.</p> <p>Paragraf 4 menegaskan bahwa tidak ada izin resmi atau rekomendasi atas aktivitas pemasangan, sehingga melanggar regulasi daerah dan nasional. Pihak seperti KKP, ATR/BPN, dan Ombudsman diminta menyelidiki kasus ini.</p> <p>Paragraf 5 memuat kronologi kemunculan pagar, yang pertama kali ditemukan di 14 Agustus 2024 sepanjang 7 km, dan berkembang menjadi lebih dari 30 km dalam waktu singkat.</p> <p>Paragraf 6 memberikan interpretasi makna pemagarannya ini: diduga sebagai upaya privatisasi ruang laut secara ilegal, yang bisa membahayakan akses publik dan ekosistem.</p> <p>Hubungan antar kalimat: Paragraf 1 membuka dengan elemen kejutan dan kejanggalan (pagar misterius tanpa izin).</p> <p>Paragraf 2 melanjutkan dengan deskripsi visual dan teknis, memperjelas bahwa struktur ini bukan buatan sembarangan, melainkan terencana dan masif.</p> <p>Paragraf 3 menggambarkan skala kerugian sosial dan ekonomi secara kuantitatif.</p> <p>Paragraf 4 memperkuat urgensi masalah dengan menunjuk pelanggaran hukum dan absennya</p>

legitimasi legal ini memberi dasar bagi dorongan investigasi oleh lembaga negara.

Paragraf 5 memberi konteks waktu dan eskalasi, memperlihatkan bahwa struktur ini dibangun dengan cepat dan sistematis.

Paragraf 6 memuat analisis motif dan dampak jangka panjang—baik dari sisi hukum maupun ekologi—dengan menyoroti bahwa ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi juga bentuk penguasaan ruang laut.

Struktur Retoris

Kata, Idiom,  
Gambar, Grafik

Kata: Penggunaan kata "misterius" menggunakan kiasan yang memperkuat urgensi pada keseriusan kasus, karena adanya ketidakjelasan dalam perizinan pengelolaan sehingga disebut "misterius".

Gambar: menggunakan dokumentasi yang disisipkan oleh penulis hanya untuk mendukung latar belakang kasus laut, namun tidak dapat mewakili kondisi pagar laut yang terjadi pada saat pemberitaan.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Struktur ini di berita ini menunjukkan bagaimana media menyusun elemen-elemen teks berita secara sistematis untuk membingkai isu pagar laut sebagai persoalan yang serius dan penuh ketidakjelasan. Judul berita, "*Pagar Misterius Membentang 30,16 Km di Laut Tangerang, Tak Ada Pihak yang Mengaku Beri Izin*", dibentuk dengan gaya yang provokatif dan menggugah rasa ingin tahu. Judul tersebut tidak hanya menyampaikan informasi faktual, tetapi juga menyiratkan adanya pelanggaran regulasi serta absennya pertanggungjawaban aktor. Lead berita langsung mengarahkan perhatian pembaca pada temuan utama, yakni keberadaan pagar laut sepanjang > 30 km yang terpasang tanpa izin jelas. Informasi selanjutnya dikembangkan melalui penyusunan kronologi kejadian, dimulai dari penemuan oleh DKP pada 14 Agustus 2024 hingga respons investigatif oleh sejumlah lembaga terkait. Struktur berita juga memperkuat kredibilitas narasi melalui kutipan langsung dari institusi seperti DKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI), yang menunjukkan adanya keterlibatan multi-pihak

dalam menangani kasus ini. Meski tidak secara eksplisit menyampaikan opini wartawan, berita dibingkai sedemikian rupa dengan menyisipkan kutipan bernuansa kritis dan evaluatif, yang secara implisit menilai keberadaan pagar laut sebagai bentuk pelanggaran tata kelola wilayah pesisir. Penutup berita menekankan urgensi izin KKPRL menjadi syarat mutlak di setiap aktivitas pemanfaatan ruang laut. Hal ini menjadi bentuk resolusi yang mengarahkan pembaca pada pemahaman bahwa peristiwa ini bukan sekadar temuan fisik, tetapi juga persoalan regulasi dan tata kelola lingkungan yang perlu ditindaklanjuti secara hukum.

## 2. Struktur Skrip

Struktur ini di berita ini mencakup seluruh unsur 5W + 1H secara eksplisit dan saling mendukung. Unsur *What* menyampaikan bahwa telah ditemukan pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer yang dibangun tanpa izin resmi dan berdampak pada ribuan nelayan. *Where* disebutkan secara spesifik di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, Banten, melintasi enam kecamatan dan enam belas desa. *When* dijelaskan melalui dua kerangka waktu: pertama kali ditemukan di 14 Agustus 2024, serta diberitakan secara nasional pada 8 Januari 2025. *Who* melibatkan banyak institusi: DKP Banten, KKP, TNI AL, Polairud, Satpol PP, dan HAPPI. *Why* ditekankan melalui dugaan bahwa ada upaya sistematis untuk menguasai ruang laut secara ilegal, tanpa izin KKPRL yang diwajibkan. Sementara itu, *How* dijelaskan dengan detail teknis, bahwa pagar dibangun dari bambu, paranet, dan karung pasir, membentuk pola menyerupai labirin, dan ditemukan melalui inspeksi lapangan dan investigasi gabungan. Dengan demikian, struktur skrip berita ini utuh, rinci, dan menyampaikan informasi dengan akurasi tinggi.

## 3. Struktur Tematik

Struktur ini di berita ini berkembang dari satu paragraf ke paragraf lain dengan logika progresif dan argumentatif. Paragraf 1 membuka narasi dengan elemen kejutan, yaitu temuan pagar laut misterius tanpa izin. Paragraf 2 menyajikan deskripsi visual dan teknis pagar, menegaskan

bahwa strukturnya tidak dibuat secara sembarangan. Paragraf 3 menyampaikan skala dampak sosial dan ekonomi dari keberadaan pagar terhadap ribuan nelayan dan pembudi daya. Paragraf 4 memperkuat urgensi dan legitimasi isu dengan menjelaskan tidak adanya rekomendasi atau izin dari pihak berwenang dan memunculkan reaksi dari lembaga negara. Paragraf 5 memuat kronologi kemunculan pagar dan lonjakan panjangnya dari 7 km menjadi lebih dari 30 km dalam waktu singkat. Paragraf 6 menutup dengan analisis bahwa kegiatan ini merupakan bentuk privatisasi ruang laut yang ilegal dan membahayakan. Semua paragraf membentuk narasi yang menyeluruh dan terstruktur. Oleh karena itu, artikel ini termasuk dalam *framing* tematik karena membingkai isu pagar laut sebagai permasalahan sistemik yang melibatkan banyak aspek: hukum, sosial, ekologis, dan kebijakan, bukan sebagai peristiwa tunggal atau sensasional sebagaimana *framing* episodik.

#### 4. Struktur Retoris

Dalam laporan berita ini, media menyusun narasi yang memadukan gaya faktual dengan sentuhan retoris yang halus namun bermakna. Meskipun struktur penulisan utamanya mengikuti kaidah jurnalisme hard news—dengan penyampaian langsung terhadap pernyataan dan peristiwa lapangan—pilihan diksi seperti “misterius” menunjukkan bahwa wartawan tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga sedang membangun atmosfer ketidakpastian dan urgensi dalam pemberitaan. Kata “misterius” yang ditempatkan di judul menjadi pintu masuk retoris yang penting. Ia menyiratkan adanya ketidakterbukaan, bahkan potensi penyimpangan dalam aspek legal pengelolaan wilayah laut, tanpa perlu mengungkapkan secara eksplisit pihak yang bertanggung jawab. Dalam pendekatan kualitatif, penggunaan kata ini bukan sekadar dekoratif, melainkan memiliki fungsi semiotik: ia mengaktifkan rasa ingin tahu pembaca, sekaligus membentuk asumsi awal bahwa ada yang tidak beres dalam pengelolaan wilayah tersebut. Di sinilah terlihat bahwa media sedang melakukan proses konstruksi makna melalui bahasa yang tidak sepenuhnya netral. Lebih jauh,

meski tidak menggunakan metafora eksplisit, terdapat deskripsi visual-verbal seperti “kotak-kotak” dan “labirin” yang menggambarkan struktur pagar laut. Ungkapan ini bukan hanya menggambarkan bentuk fisik, tetapi secara implisit membangun asosiasi dengan sesuatu yang membingungkan, berlapis, dan sulit diurai. Artinya, pagar laut tidak hanya dibingkai sebagai objek fisik, tapi juga sebagai simbol persoalan yang kompleks dan penuh teka-teki. Elemen retorik lainnya terletak pada penggunaan kutipan langsung dari tokoh-tokoh otoritatif, seperti pejabat DKP serta KKP. Kutipan ini berfungsi untuk memperkuat legitimasi informasi dan membangun kesan bahwa isu ini sedang dalam perhatian serius negara. Strategi ini memperlihatkan bahwa media mencoba membangun kredibilitas melalui suara institusional, bukan hanya melalui narasi jurnalistik. Namun, dari sisi visual, dokumentasi yang disisipkan dalam artikel tidak secara langsung menggambarkan pagar laut yang sedang dipersoalkan. Gambar hanya menunjukkan latar belakang kondisi laut dan aktivitas inspeksi oleh tim gabungan. Dalam pendekatan kualitatif, ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam menghadirkan bukti visual yang sepadan dengan bobot narasi. Meskipun demikian, kehadiran gambar tetap menjadi elemen pendukung untuk menghadirkan kesan “turun ke lapangan”, meski tidak sepenuhnya mendukung pernyataan tentang bentuk atau kondisi pagar itu sendiri. Tidak adanya grafik atau infografik menunjukkan bahwa media memilih untuk membangun kekuatan narasi melalui deskripsi verbal dan sumber kutipan, bukan melalui pendekatan visual data. Strategi ini sesuai dengan karakter berita yang bersifat investigatif awal dan belum berbasis pada pelaporan teknis atau analisis kuantitatif. Secara keseluruhan, artikel ini menyusun kekuatan retorik melalui kombinasi diksi yang sugestif, narasi faktual, dan legitimasi dari tokoh institusional. Sementara itu, visual digunakan secara terbatas namun tetap strategis dalam menciptakan atmosfer dan kredibilitas lapangan. Ini memperlihatkan bagaimana media tidak hanya memberi berita, tetapi juga membentuk interpretasi pembaca melalui pilihan bahasa, sudut pandang, serta seleksi visual yang disisipkan.

#### 4.2.2. Analisis Artikel Berita 2 Kompas.com

Judul : KKP Segel Pagar Laut di Tangerang, Pemasangan Dianggap Ilegal

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 10 Januari 2025

Ringkasan : KKP menyegel pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Kab. Tangerang sebab dipasang tanpa izin resmi KKPRL. Pagar tersebut ada di zona perikanan tangkap serta pengelolaan energi yang seharusnya tidak boleh dibatasi. Penyegehan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, terutama nelayan yang merasa dirugikan. Investigasi menunjukkan pagar dipasang menggunakan cerucuk bambu di dasar laut tanpa persetujuan pemerintah desa maupun kecamatan. KKP menegaskan bahwasanya tindakan ini melanggar aturan tata ruang laut dan mengganggu ekosistem serta akses publik.

Tabel 4.2. Analisis Artikel Berita 2 Kompas.com

<b>Perangkat Framing</b>	<b>Unit Pengamatan</b>	<b>Hasil Pengamatan</b>
Struktur Sintaksis	Judul	KKP Segel Pagar Laut di Tangerang, Pemasangan Dianggap Ilegal
	Lead	KKP menyegel pagar laut yang tidak memiliki izin di perairan Kab. Tangerang, Banten, pada Kamis (9/1/2024).
	Latar Informasi	KKP menyegel pagar bambu sepanjang sekitar 30,16 km di perairan Kab. Tangerang pada Kamis (9/1/2025) karena dipasang tanpa izin KKPRL, padahal berada di Zona Perikanan Tangkap dan Zona Pengelolaan Energi yang dilindungi. Operasi ini dipimpin langsung oleh Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono, sebagai respons atas aduan nelayan yang merasa dirugikan. Investigasi awal sejak September 2024 melibatkan tim gabungan PSDKP dan DKP Banten, yang menemukan bahwa pagar menjangkau Desa Margamulya hingga Ketapang, menggunakan cerucuk bambu di area pasir dan rubble tanpa rekomendasi kecamatan atau desa. KKP menegaskan penyegehan ini untuk melindungi nelayan serta menegakkan regulasi tata ruang laut, dengan tindak lanjut berupa identifikasi pihak pemasang untuk dipanggil dan digugat sesuai hukum
Kutipan	Kutipan langsung: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Saat ini, kita hentikan kegiatan pemagaran sambil terus dalam siapa</li> </ol>	

pelaku yang bertanggung jawab atas kegiatan ini,” ujar Ipunk dalam keterangan resminya pada Kamis (9/1/2025).

2. “Tim juga menganalisis foto *drone* dan *arcgis*. Berdasarkan data tersebut, kondisi dasar perairan adalah area rubble dan pasir dengan jarak pemagaran sekitar 700 m dari garis pantai,” ungkap Sumono.
3. “Kegiatan pemagaran ini tidak memiliki Persetujuan KKPRL,” tambah Sumono.
4. “Pada 4-5 September 2024, kami bersama Polsus dari PSDKP dan tim gabungan dari DKP kembali datang ke lokasi untuk bertemu dan berdiskusi,” ujar Eli.

Kutipan tidak langsung:

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto, menjelaskan bahwa lokasi pemagaran berada di zona yang dilindungi sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang DKP Provinsi Banten No. 2 Tahun 2023.

Sumber

KKP.  
Polsus (Polisi Khusus) Kelautan Ditjen PSDKP.  
DKP Provinsi Banten

Pernyataan Opini  
Penutup

Tidak Ada  
Dengan penyegelan pagar laut ilegal ini, KKP berharap ekosistem pesisir dapat terlindungi dan aktivitas perikanan di Kab. Tangerang dapat kembali berjalan normal tanpa hambatan.

Struktur Skrip

What

Penyegelan pagar laut ilegal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Where

Perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

When

9 Januari 2025

Who

Polisi khusus kelautan Ditjen PSDKP

Why

KKP  
DKP Banten  
Karena pagar dipasang tanpa izin resmi dan melanggar ketentuan tata ruang laut.

How

KKP menyegel pagar setelah investigasi gabungan bersama DKP dan Polsus

Struktur Tematik

Paragraf,  
Proposisi kalimat,  
Hubungan antar  
kalimat

Paragraf 1-2 memuat fakta, KKP menyegel pagar laut ilegal di perairan Kab. Tangerang. Pemagaran dianggap melanggar aturan karena tidak mengantongi izin KKPRL dan berada di zona penting: Zona Perikanan Tangkap dan Zona Pengelolaan Energi. Pejabat Dirjen PSDKP, Ipunk, memimpin penyegelan dan menyatakan bahwa tindakan ini dilakukan sambil menyelidiki siapa pihak yang bertanggung jawab. Hal ini merupakan respons terhadap laporan dari masyarakat, terutama nelayan yang merasa dirugikan.

Paragraf 3-4 Paragraf ini menjelaskan hasil investigasi awal yang dilaksanakan di September 2024 oleh tim gabungan dari Polsus PSDKP dan

DKP Banten. Pagar ditemukan membentang di beberapa desa dan dibuat dari cerucuk bambu. Lokasi pemagaran disebut masuk dalam zona lindung berdasarkan Perda Tata Ruang DKP Banten. Kemudian, disebutkan bahwa tim melakukan analisis data menggunakan *drone* dan ArcGIS. Hasilnya menunjukkan bahwa dasar laut terdiri atas pasir dan rubble (karang mati), dengan pagar terletak sekitar 700 m dari garis pantai. Poin pentingnya: kegiatan itu tidak memiliki izin KKPRL.

Paragraf 5-6 menunjukkan perkembangan: pagar laut yang tadinya hanya 7 km kini sudah mencapai panjang total 30,16 km. Perhatian publik mulai meningkat. Pejabat DKP Banten, Eli Susiyanti, mengungkap bahwa laporan pertama diterima 14 Agustus 2024, lalu pengecekan dilakukan 19 Agustus. Saat itu, pagar baru sepanjang 7 km.

Paragraf 7-8 dijelaskan bahwa tim kembali ke lokasi pada awal September dan dibagi dua: satu tim mengecek lokasi fisik, satu tim berkoordinasi dengan pejabat setempat. Hasilnya, tidak ditemukan izin atau rekomendasi dari camat maupun desa.

Ini memperkuat dugaan bahwa proyek pagar laut tidak dilakukan secara sah atau transparan di level pemerintahan lokal.

Paragraf 9 KKP berharap bahwa dengan adanya penyegelan, ekosistem pesisir dapat terlindungi, dan aktivitas perikanan bisa kembali normal.

Hubungan antar kalimat:

Paragraf 1-2 kalimat-kalimat dalam dua paragraf ini saling mendukung: dari tindakan penyegelan, alasan hukum dan lingkungan, reaksi pejabat, keluhan masyarakat.

Paragraf 3-4 membentuk alur kronologis dari investigasi temuan teknis kesimpulan soal legalitas.

Paragraf 5-6 ini mengembangkan perubahan situasi, dari pengamatan awal, pertumbuhan skala, peningkatan perhatian.

Paragraf 7-8 menjelaskan alur investigasi administratif, lalu menyampaikan hasilnya secara eksplisit.

Paragraf 9 bersifat penutup atau simpulan, menyampaikan harapan atau tujuan akhir dari seluruh tindakan pemerintah.

Struktur Retoris

Kata, Idiom,  
Gambar, Grafik

Gambar pada artikel ini merupakan dokumentasi yang diambil pada saat melakukan penyegelan pagar bambu misterius sepanjang 30,6 kilometer yang membentang di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Struktur ini di berita ini disusun dengan pola ekspositori yang terstruktur dan berorientasi pada pembentukan persepsi terhadap legitimasi tindakan pemerintah. Judul berita, “*KKP Segel Pagar Laut di Tangerang, Pemasangan Dianggap Ilegal*”, disusun secara langsung dan tegas, menampilkan tiga elemen utama dalam satu kalimat: pelaku tindakan (KKP), bentuk tindakan (penyegehan), dan alasan hukum (pemasangan dianggap ilegal). Penyusunan judul seperti ini tidak hanya memberi informasi dasar, tetapi juga mengarahkan pembaca melihat persoalan pagar laut menjadi pelanggaran yang ditindak secara resmi oleh otoritas negara.

Lead berita melanjutkan arah *framing* yang dibangun oleh judul, dengan memberikan detail mengenai waktu, lokasi, dan status legal pagar laut.

Bagian ini memperkuat kesan bahwa tindakan penyegehan merupakan bagian dari proses penegakan hukum atas pelanggaran tata ruang laut. Latar informasi dalam berita ini dikembangkan secara menyeluruh, mencakup aspek teknis pemasangan pagar, proses investigasi, serta dasar hukum yang digunakan sebagai legitimasi tindakan pemerintah. Hal ini memperlihatkan bahwasanya media tidak hanya menyampaikan peristiwa, tetapi juga membongkai tindakan pemerintah sebagai rasional dan terstruktur. Kutipan dalam berita berasal dari pejabat KKP serta DKP, baik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung. Kutipan ini digunakan secara strategis untuk memperkuat kredibilitas narasi serta membangun otoritas atas tindakan penyegehan yang dilakukan. Meskipun penulis tidak menyampaikan opini secara eksplisit, berita ini menyisipkan proposisi penting bahwa keberadaan pagar laut berdampak negatif terhadap kehidupan nelayan dan bertentangan dengan aturan tata ruang laut. Penutup berita menekankan bahwa tujuan akhir dari penyegehan ini adalah pemulihan ekosistem pesisir dan normalisasi aktivitas nelayan. Bagian ini berfungsi sebagai resolusi naratif yang menyempurnakan alur informasi dari awal hingga akhir, sekaligus menegaskan sikap media dalam memosisikan negara sebagai aktor yang bertindak untuk kepentingan publik. Dengan

demikian, struktur sintaksis berita ini menyampaikan informasi secara utuh dan terarah, dari tindakan, alasan hukum, pembenaran institusional, hingga tujuan akhir yang bersifat normatif.

## 2. Struktur Skrip

Struktur ini di berita ini memenuhi seluruh unsur 5W1H secara lengkap dan eksplisit. *What* dijelaskan sebagai tindakan penyegelan pagar laut ilegal oleh KKP. *Where* disebut secara spesifik yaitu di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. *When* dituliskan dengan tepat, yaitu pada tanggal 9 Januari 2025. *Who* terdiri dari beberapa aktor kelembagaan, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Polisi Khusus Kelautan Ditjen PSDKP, serta DKP Provinsi Banten. *Why* diungkapkan secara detail yaitu karena pagar tersebut tidak mempunyai izin KKPRL serta ada di zona perikanan serta zona lindung yang strategis. *How* dijelaskan melalui langkah investigasi dan koordinasi lintas lembaga yang berujung pada penyegelan fisik. Semua unsur tersebut tersaji dalam struktur naratif yang jelas, membuat pembaca memahami konteks dan substansi berita secara menyeluruh tanpa kebingungan.

## 3. Struktur Tematik

Struktur ini dalam berita ini berkembang dengan kronologis serta tematis. Paragraf 1–2 menjelaskan fakta utama, yaitu penyegelan oleh KKP dan alasan hukumnya. Paragraf 3–4 menyajikan hasil investigasi awal pada September 2024, serta data teknis seperti lokasi, bahan pagar, dan posisi zona yang dilanggar. Paragraf 5–6 menyoroti perkembangan panjang pagar laut dari 7 km menjadi 30,16 km, dan meningkatnya perhatian publik. Paragraf 7–8 menjelaskan investigasi administratif, termasuk tidak adanya rekomendasi dari camat maupun desa, yang memperkuat ketidaksahihan proyek. Paragraf 9 menyimpulkan dengan harapan agar kondisi ekosistem pesisir dan perikanan bisa pulih. Hubungan antar paragraf bersifat progresif dan elaboratif: masing-masing paragraf membangun informasi dari temuan teknis hingga legitimasi hukum dan sosial. Artikel ini termasuk ke dalam

*framing* tematik karena mengangkat masalah pagar laut sebagai bagian dari persoalan tata ruang laut dan penegakan hukum. Tidak hanya memuat peristiwa sesaat, berita ini membingkai konteks, latar belakang, temuan investigatif, serta dampaknya terhadap masyarakat dan ekosistem. Dengan demikian, pembaca diarahkan untuk memahami isu secara struktural, bukan sebagai insiden tunggal atau sensasional (yang khas pada *framing* episodik).

#### 4. Struktur Retoris

Artikel ini membentuk narasi pemberitaan melalui kombinasi diksi hukum, kutipan dari otoritas negara, serta dokumentasi visual yang merekam langsung proses penyegelan di lapangan. Seluruh elemen ini bekerja untuk menciptakan representasi bahwa tindakan penyegelan pagar bambu merupakan bentuk penegakan hukum yang sah dan perlu dilakukan oleh pemerintah. Penekanan utama dari struktur retorik dalam berita ini tidak diarahkan pada unsur emosi atau dramatisasi, tetapi lebih pada pembentukan wacana institusional yang bersandar pada legalitas dan kredibilitas otoritas. Dari segi bahasa, tidak ditemukan penggunaan idiom, metafora, atau gaya kiasan lainnya. Gaya penulisan yang digunakan cenderung informatif dan langsung, mengikuti kaidah penulisan jurnalistik hard news. Namun demikian, pemilihan diksi seperti “penyegelan”, “ilegal”, “zona lindung”, dan “tanpa izin” mengandung bobot retorik karena memberikan tekanan hukum dan memperkuat posisi naratif pemerintah sebagai pelindung kepentingan publik dan lingkungan. Diksi ini membingkai kasus sebagai pelanggaran yang serius, bukan sekadar kesalahan administratif atau teknis. Struktur retorik juga dibentuk melalui kutipan langsung dari pejabat Ditjen PSDKP dan DKP Banten. Kutipan ini tidak hanya berfungsi menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi elemen penting dalam membangun otoritas narasi. Dalam konteks penelitian kualitatif, keberadaan kutipan tokoh otoritatif memperlihatkan adanya konstruksi realitas sosial yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama yang sah dalam menyelesaikan konflik atau pelanggaran yang terjadi. Elemen visual dalam artikel ini ditopang oleh dokumentasi saat

penyegehan pagar bambu dilakukan. Meskipun tidak disertai grafik atau visualisasi data, keberadaan gambar ini memperkuat legitimasi tindakan karena menunjukkan keterlibatan langsung aparat negara di lapangan. Gambar bukan hanya berfungsi sebagai bukti visual, tetapi juga sebagai sarana membentuk persepsi publik bahwa tindakan yang diambil adalah nyata, terukur, dan dilakukan dengan kewenangan resmi. Dalam pendekatan kualitatif, visualisasi ini memiliki makna simbolik yang menyampaikan pesan ketegasan negara terhadap aktivitas ilegal di wilayah pesisir. Artikel ini juga menyajikan data kuantitatif seperti panjang pagar yang mencapai 30,16 kilometer serta keterangan lokasi geografis yang spesifik. Penyertaan data ini memberikan landasan faktual yang menguatkan struktur tematik berita, sekaligus memperluas jangkauan pemahaman pembaca terhadap skala persoalan. Meski tidak divisualisasikan dalam bentuk grafik, data numerik yang dimunculkan tetap berfungsi sebagai penanda bahwa masalah ini berdimensi besar dan kompleks. Secara keseluruhan, artikel ini mengandalkan gaya penyampaian yang faktual, otoritatif, dan visual untuk membingkai kasus penyegehan pagar laut sebagai bagian dari upaya negara menegakkan hukum dan melindungi kawasan pesisir. Tidak adanya elemen retorik emosional atau kiasan mempertegas bahwa pendekatan yang digunakan lebih bersifat legalistik dan administratif, dengan tujuan membangun kredibilitas berita melalui suara otoritas dan bukti lapangan.

#### **4.2.3. Analisis Artikel Berita 3 Kompas.com**

Judul : Prabowo Perintahkan Pagar Laut Tangerang Dicabut dan Diusut Tuntas

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 15 Januari 2025

Ringkasan : Presiden terpilih Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan pagar laut di kawasan reklamasi PIK 2, Kabupaten Tangerang, karena dinilai menghalangi akses nelayan ke laut. Ia juga meminta agar kasus ini diusut aparat penegak hukum sebab dicurigai melanggar aturan

hukum dan merugikan masyarakat pesisir. Keputusan ini diambil setelah menerima laporan dari warga dan nelayan yang kesulitan melaut. Pemerintah pusat akan meninjau proyek reklamasi tersebut secara menyeluruh.

Tabel 4.3. Analisis Artikel Berita 3 Kompas.com

<b>Perangkat Framing</b>	<b>Unit Pengamatan</b>	<b>Hasil Pengamatan</b>
Struktur Sintaksis	Judul	Prabowo Perintahkan Pagar Laut Tangerang Dicaput dan Diusut Tuntas
	Lead	Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar pagar sepanjang 30 km di perairan Kab. Tangerang, disegel dan dicabut.
	Latar Informasi	Permasalahan pagar laut di kawasan reklamasi PIK 2, Kabupaten Tangerang, mencuat ke publik sejak akhir tahun 2024 ketika sejumlah nelayan tradisional melaporkan sulitnya mengakses wilayah tangkapan mereka karena dibatasi pagar besi panjang di laut. Akses yang tertutup ini berdampak langsung pada penghasilan mereka dan memunculkan kekhawatiran akan dampak ekologis di wilayah pesisir utara Tangerang. Berbagai media dan organisasi masyarakat sipil mulai menyoroti proyek reklamasi tersebut karena diduga dilakukan tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat pesisir dan kelestarian lingkungan. Sorotan publik memuncak ketika isu ini sampai ke perhatian presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam konteks ini, latar informasi dari berita adalah konflik antara pembangunan (reklamasi dan pagar laut) dengan akses serta hak hidup nelayan, yang mendorong campur tangan dari negara melalui Prabowo.
	Kutipan	<p>Kutipan langsung :</p> <p>"Sudah. Beliau sudah setuju pagar laut. Pertama, itu disegel. Kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabutkan, gitu," ujar Muzani</p> <p>"Saya tidak sampai di situ, pengetahuan saya. Saya Ketua MPR," imbuh Muzani.</p> <p>"Enggak ada (hubungannya dengan PSN PIK 2)," ujar Airlangga</p> <p>Kutipan tidak langsung: Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar pagar sepanjang 30 km di perairan Kab. Tangerang, disegel dan dicabut. Muzani mengatakan bahwa Prabowo juga memerintahkan agar pembangunan pagar laut ini diusut.</p>
Sumber		Ahmad Muzani, Ketua MPR RI

		Presiden Prabowo Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
	Pernyataan Opini Penutup	Tidak ada “Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya,” ujar dia. (Airlangga Hartarto)
Struktur Skrip	<i>What</i>	Pencabutan pagar laut dan pengusutan pelanggaran proyek reklamasi.
	<i>Where</i>	Perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
	<i>When</i>	15 Januari 2025
	<i>Who</i>	Ahmad Muzani, Ketua MPR RI Presiden Prabowo Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
	<i>Why</i>	Karena pagar laut dianggap menutup akses nelayan dan berpotensi melanggar hukum.
Struktur Tematik	<i>How</i>	Prabowo menyampaikan perintah secara terbuka dan meminta aparat menindaklanjuti secara hukum.
	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	Paragraf 1-2 Paragraf pertama menyoroti pernyataan langsung dari Prabowo Subianto yang memerintahkan pencabutan pagar laut dan pengusutan hukum. Paragraf kedua menjelaskan alasan perintah tersebut, yaitu keresahan dari para nelayan akibat akses laut yang tertutup.
		Paragraf 3-4 Paragraf ketiga menjelaskan lokasi pagar laut, yaitu di wilayah reklamasi PIK 2, dan bahwa area ini sudah lama menuai protes karena membatasi pergerakan nelayan. Paragraf keempat berisi kutipan dari tokoh masyarakat atau warga pesisir yang mendukung pernyataan Prabowo.
Struktur Retoris		Paragraf 5-6 Paragraf kelima menyampaikan bahwa aparat penegak hukum akan mengusut pelanggaran hukum atas proyek tersebut. Paragraf keenam ditutup dengan komitmen dari pemerintah pusat (kementerian) untuk meninjau ulang proyek reklamasi di wilayah pesisir.
	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Gambar yang dipergunakan penulis dalam artikel, merupakan dokumentasi pada saat penghentian kegiatan pemagaran laut tanpa izin yang dilakukan oleh KKP

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Struktur ini di berita ini disusun dengan pola naratif yang terfokus dan berorientasi pada penegasan otoritas aktor politik dalam merespons isu

pagar laut. Judul berita, “*Prabowo Perintahkan Pagar Laut Tangerang Dicabut dan Diusut Tuntas*”, menggunakan struktur kalimat aktif dan langsung, menempatkan “Prabowo” sebagai subjek utama dan pengambil keputusan. Penyusunan judul ini tidak hanya menyampaikan tindakan, tetapi juga membingkai posisi Prabowo sebagai figur yang tegas dan solutif dalam menangani persoalan publik. Lead berita melanjutkan bingkai tersebut dengan menjelaskan secara padat konteks dari perintah tersebut, yakni permintaan untuk mencabut pagar laut sepanjang 30 km di wilayah pesisir Kab. Tangerang. Penyusunan informasi dilaksanakan secara bertahap serta terarah, dimulai dari aksi pemerintah, latar belakang sosial berupa keluhan nelayan, hingga tekanan opini publik yang memicu reaksi dari aktor politik. Latar informasi disusun untuk memperkuat narasi bahwa keputusan ini merupakan respons terhadap masalah yang mengganggu kepentingan masyarakat pesisir. Kutipan langsung dari Prabowo Subianto digunakan untuk mempertegas legitimasi tindakan tersebut serta menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat nelayan. Tidak terdapat opini atau interpretasi pribadi dari penulis dalam narasi berita, sehingga menunjukkan upaya untuk menjaga objektivitas dan netralitas dalam penyampaian informasi. Meskipun demikian, pemilihan kutipan dan susunan informasi membentuk narasi bahwa Prabowo adalah pihak yang solutif dan responsif dalam konflik ini. Penutup berita diarahkan pada langkah kebijakan yang lebih luas, yakni rencana peninjauan ulang terhadap proyek reklamasi, yang memperluas cakupan isu dari sekadar pencabutan pagar menjadi evaluasi tata kelola pesisir secara menyeluruh. Dengan demikian, struktur sintaksis dalam berita ini membentuk narasi yang tidak hanya menyampaikan rangkaian peristiwa, tetapi juga membangun citra positif terhadap aktor politik tertentu serta mengarahkan pembaca pada penyelesaian berbasis kebijakan.

## 2. Struktur Skrip

Berita ini memenuhi unsur 5W + 1H dengan lengkap serta eksplisit. Unsur *What* dijelaskan melalui tindakan pencabutan pagar laut dan pengusutan

hukum terhadap pelanggaran proyek reklamasi. *Where* disampaikan dengan jelas, yaitu di Perairan, Kab. Tangerang, Banten. *When* ditulis di 15 Januari 2025 sebagai waktu penyampaian perintah oleh Prabowo. *Who* merujuk pada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, serta melibatkan Ahmad Muzani, Ketua MPR RI dan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. *Why* dijelaskan melalui dampak pagar laut yang menutup akses laut bagi nelayan dan dugaan pelanggaran hukum. Terakhir, *How* diuraikan lewat pernyataan langsung Prabowo yang menyampaikan perintah terbuka kepada aparat penegak hukum. Keenam elemen tersebut disusun secara sistematis dan saling melengkapi, menjadikan berita ini sangat informatif dan mudah dipahami oleh pembaca tanpa menyisakan celah informasi penting.

### 3.● **Struktur Tematik**

Struktur ini di berita ini dibangun dengan bertahap dan koheren. Paragraf pertama dan kedua menyoroti pernyataan tegas Prabowo sebagai bentuk respon atas keresahan nelayan. Paragraf ketiga dan keempat memberikan latar geografis dan suara masyarakat sebagai pihak terdampak, menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat struktural dan menyentuh hak dasar masyarakat. Paragraf kelima dan keenam memperluas dimensi berita ke arah kebijakan hukum dan evaluasi kebijakan reklamasi secara umum. Hubungan antar paragraf bersifat sebab-akibat, elaboratif, dan progresif, yang menandakan keterkaitan logis dan naratif yang kuat. Masing-masing paragraf berkontribusi memperdalam pemahaman pembaca terhadap isu yang sedang diangkat, mulai dari aktor, latar, dampak, hingga tindak lanjut. Berdasarkan alur ini, berita ini menggunakan *framing* tematik, karena mengangkat isu secara struktural dan mendalam, dengan menjelaskan konteks sosial, dampak kebijakan, dan peran institusi, bukan sekadar melaporkan peristiwa tunggal atau insiden individual. *Framing* tematik memperlihatkan bahwa masalah pagar laut merupakan bagian dari persoalan pembangunan pesisir yang kompleks.

#### 4. Struktur Retoris

Dalam laporan berita ini, strategi retorik yang digunakan cenderung menekankan pada penyampaian fakta secara langsung melalui kutipan-kutipan dari aktor kunci yang memiliki peran dalam proses penyegelan pagar laut tanpa izin. Bahasa yang digunakan dalam narasi bersifat formal, lugas, dan informatif. Tidak ditemukan upaya membangun suasana emosional ataupun menggunakan gaya bahasa simbolik atau metaforis. Hal ini mencerminkan pendekatan pemberitaan yang mengutamakan klarifikasi terhadap dinamika peristiwa dan posisi resmi dari masing-masing tokoh. Kutipan langsung dari tokoh seperti Muzani dan Airlangga menjadi pusat kekuatan retorik dalam artikel ini. Tidak hanya menyampaikan pendapat, kutipan tersebut juga merepresentasikan posisi politik dan legal mereka dalam kasus ini. Misalnya, pernyataan Muzani yang menjelaskan tahapan penyegelan dan pencabutan pagar laut, serta penegasan posisinya sebagai Ketua MPR, secara tidak langsung menunjukkan pembatasan otoritasnya dalam isu ini. Sedangkan pernyataan Airlangga yang menyangkal keterkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) memberikan arah naratif bahwa kasus pagar laut tidak berhubungan dengan kepentingan negara dalam proyek pembangunan strategis. Dalam konteks analisis kualitatif, kutipan-kutipan ini bukan hanya sekadar bentuk pernyataan, melainkan juga merefleksikan konstruksi legitimasi dan penegasan otoritas tokoh dalam menjawab polemik publik. Tidak ada elemen idiomatik, hiperbola, atau bahasa kiasan lainnya yang digunakan dalam struktur tulisan. Ketiadaan elemen gaya ini menunjukkan bahwa berita tidak ditujukan untuk memancing respons emosional, melainkan sebagai sarana penyampaian posisi resmi yang ingin disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Ini juga menunjukkan bagaimana media memosisikan dirinya dalam ranah jurnalisme politik yang lebih mengutamakan verifikasi, kutipan, dan otoritas dibanding persuasi emosional atau gaya naratif yang dramatis. Dari sisi visual, gambar yang ditampilkan adalah dokumentasi kegiatan penghentian pemagaran laut yang dilaksanakan KKP. Meskipun tidak terdapat grafik atau infografik dalam artikel, keberadaan gambar

lapangan ini memperkuat kesan bahwa tindakan penghentian benar-benar terjadi dan dilakukan secara resmi oleh institusi negara. Dalam penelitian kualitatif, gambar ini berfungsi sebagai penanda visual yang tidak hanya menambah kredibilitas, tetapi juga mendukung konstruksi wacana hukum dan birokratis yang sedang dibentuk oleh media. Gambar menjadi medium penting dalam menciptakan kesan otentik dan memperjelas posisi pemerintah sebagai aktor penegak hukum. Secara keseluruhan, retorika dalam berita ini dibangun dengan mengandalkan kekuatan kutipan tokoh resmi dan dokumentasi visual sebagai bukti lapangan. Tidak adanya gaya bahasa simbolik atau puitik mengarahkan pembaca pada pemahaman yang faktual dan otoritatif, bukan pada pemaknaan simbolis atau emosional. Pendekatan ini memperlihatkan posisi media sebagai penyampai legitimasi tindakan negara dalam menangani kasus pagar laut secara formal dan administratif.

#### **4.2.4. Analisis Artikel Berita 4 Kompas.com**

Judul : Soal Pagar Laut di Tangerang, Polisi: Kami Belum Temukan Adanya Tindak Pidana

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 27 Januari 2025

Ringkasan : dalam pernyataan resmi dari Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Metro Jaya terkait polemik pagar laut di perairan Pakuhaji, Kab. Tangerang. Kombes Pol Joko Sadono menyampaikan bahwa dari hasil penyelidikan sementara, belum ditemukan unsur tindak pidana atas keberadaan pagar laut sepanjang 30,6 km yang sebelumnya telah dibongkar KKP. Pihak kepolisian menyatakan bahwa penyelidikan masih berjalan dan berkoordinasi dengan instansi terkait, terutama PSDKP KKP, yang menangani aspek teknis hukum laut.

Tabel 4.4. Analisis Artikel Berita 4 Kompas.com

<b>Perangkat Framing</b>	<b>Unit Pengamatan</b>	<b>Hasil Pengamatan</b>
Struktur Sintaksis	Judul	Soal Pagar Laut di Tangerang, Polisi: Kami Belum Temukan Adanya Tindak Pidana
	Lead	Ditpolairud Polda Metro Jaya Kombes Pol Joko Sadono mengatakan, pihaknya belum menemukan dugaan tindak pidana atas polemik pagar laut di perairan Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang, Banten
Struktur Skrip	Latar Informasi	Polisi tengah menyelidiki polemik pagar laut sepanjang 30,6 km di perairan Muncung-Pakuahaji, yang sebelumnya sudah dibongkar oleh KKP. Namun, hingga kini belum ditemukan unsur pidana oleh Ditpolairud Polda Metro Jaya, sementara urusan hukum teknis masih ditangani oleh PSDKP KKP
	Kutipan	Kutipan langsung: <p>“Kami hanya menyelidiki terkait dengan apa-apa saja yang ada di lapangan, ada tindak pidana atau tidak,” kata Joko</p> <p>“Tapi karena sudah diambil oleh KKP, kami tunggu saja dari KKP ya. Sementara, kami belum temukan adanya tindak pidana, dan sekarang ranahnya masih di KKP,” sambungnya (Joko)</p> <p>“Kalau hasilnya mungkin barangkali dari KKP diduga ada tindak pidana, mungkin dari Pak Menteri bisa menindaklanjuti dengan instansi aparat penegak hukum lainnya,” pungkask dia.</p> <p>Kutipan tidak langsung:            Dalam hal ini, Joko menjelaskan, penyelidikan polemik pagar laut di perairan Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang, masih ditelusuri oleh PSDKP KKP.</p>
	Sumber	Ditpolairud Polda Metro Jaya Kombes Pol Joko Sadono PSDKP KKP
	Pernyataan Opini Penutup	Tidak ada  Pagar laut yang menjadi polemik ini akhirnya dibongkar pada Sabtu (18/1/2025) dengan melibatkan sedikitnya 600 prajurit TNI AL yang dibantu warga setempat.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Penyelidikan pagar laut oleh Ditpolairud, belum ditemukan unsur pidana.
	<i>Where</i>	Perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
	<i>When</i>	27 Januari 2025
	<i>Who</i>	Ditpolairud Polda Metro Jaya Kombes Pol Joko Sadono dan PSDKP KKP
	<i>Why</i>	Untuk menindaklanjuti kasus pagar laut yang sudah dibongkar oleh KKP dan menentukan apakah ada pelanggaran hukum.

	<i>How</i>	Melalui penyelidikan dan koordinasi antarinstansi antara polisi dan lembaga kelautan.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	Paragraf 1-2 Paragraf pertama dan kedua fokus pada pernyataan Kombes Pol Joko Sadono dari Ditpolairud Polda Metro Jaya. Dalam dua paragraf ini ditegaskan bahwa hingga saat ini penyelidikan belum menemukan unsur pidana dalam kasus pagar laut di perairan Pakuhaji, Kab. Tangerang.
		Paragraf 3 Paragraf ini menyampaikan bahwa meski Ditpolairud belum menemukan unsur pidana, proses penyelidikan hukum tetap dilanjutkan, dan instansi lain seperti PSDKP KKP masih memproses aspek hukum teknis yang berkaitan dengan tata ruang laut.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Paragraf 4 Paragraf ini menyatakan bahwa penyelidikan belum selesai, dan hasil temuan bersifat sementara. Gambar yang dipergunakan penulis di artikel, merupakan dokumentasi pada saat Ditpolairud di Lokasi terkait penyelidikan tindakan pidana

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Struktur ini di berita ini ditata dengan pendekatan eksplanatif yang menekankan pada penyampaian informasi resmi dari pihak kepolisian. Judul berita bersifat informatif dan menekankan posisi netral dari lembaga kepolisian, yakni tidak ditemukan indikasi tindak pidana dalam kasus pagar laut. Lead menampilkan kutipan langsung dari Kombes Pol Joko Sadono, memperkuat kesan objektivitas dan kejelasan sumber informasi. Latar informasi diperluas dengan penjelasan mengenai peran PSDKP KKP dalam menangani aspek hukum teknis. Kutipan langsung dan tidak langsung dari Joko digunakan secara strategis untuk menjelaskan posisi hukum dan koordinasi antarinstansi. Penutup berita merangkum bahwa pagar laut telah dibongkar oleh aparat gabungan, termasuk TNI AL, menandai penyelesaian aspek fisik namun bukan aspek hukum. Secara keseluruhan, struktur

sintaksis membentuk narasi yang terpusat pada proses hukum dan koordinasi antar lembaga, tanpa intervensi opini dari penulis berita.

## 2. Struktur Skrip

Struktur ini di berita ini tersusun lengkap berdasarkan elemen-elemen 5W1H yang membentuk narasi utuh dan sistematis. Unsur *What* atau "apa" dalam berita ini adalah penyelidikan terhadap polemik pemasangan pagar laut sepanjang 30,6 km di perairan Pakuhaji, Kab. Tangerang. Ditpolairud Polda Metro Jaya menyatakan bahwa sejauh ini belum ditemukan unsur pidana dari kasus tersebut. Unsur *Where* dijelaskan secara spesifik, yaitu di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, Banten, dengan fokus lokasi pada Kecamatan Pakuhaji. Unsur *When* atau "kapan" tertulis dalam waktu pemberitaan, yakni pada 27 Januari 2025, yang juga mencerminkan perkembangan penyelidikan terkini. Unsur *Who* dijelaskan melalui lembaga yang terlibat, yakni Ditpolairud Polda Metro Jaya yang diwakili Kombes Pol Joko Sadono, serta instansi teknis kelautan yaitu PSDKP dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Unsur *Why* atau alasan penyelidikan muncul karena pagar laut tersebut telah menjadi polemik sejak dibongkar oleh KKP dan perlu dikaji apakah ada pelanggaran hukum dalam pemasangannya. Sementara unsur *How* dijelaskan melalui metode investigasi hukum dan kerja sama lintas institusi, di mana Ditpolairud menunggu hasil teknis dari KKP sebelum menentukan langkah hukum lebih lanjut. Seluruh elemen 5W1H disampaikan secara jelas dan saling mendukung, memperkuat struktur informasi dalam berita agar mudah dipahami dan tidak menimbulkan bias informasi.

## 3. Struktur tematik

Struktur ini dalam berita ini mengalir secara kronologis serta terstruktur. Paragraf 1–2 membahas posisi Ditpolairud yang belum menemukan unsur pidana, sekaligus memuat kutipan langsung dari pejabat berwenang. Paragraf 3 memperluas perspektif dengan menjelaskan bahwa proses hukum belum selesai karena aspek teknis masih ditangani oleh PSDKP

KKP. Paragraf 4 menutup berita dengan menyampaikan bahwa hasil penyelidikan bersifat sementara dan masih akan berlanjut. Hubungan antarparagraf bersifat elaboratif dan progresif, dari pernyataan ke konteks hingga penegasan akhir. Berita ini menggunakan *framing* tematik karena fokus pada isu secara menyeluruh, mencakup proses hukum, koordinasi antarinstansi, dan konsekuensi kebijakan, bukan hanya peristiwa sesaat atau narasi insiden tunggal.

#### 4. Struktur Retoris

Berita ini membangun struktur retorik yang sangat dipengaruhi oleh gaya penulisan jurnalistik institusional, di mana fokus utama diarahkan pada pelaporan prosedural dan aspek legal dari suatu peristiwa. Bahasa yang digunakan bersifat formal, lugas, dan minim dari unsur subjektivitas emosional. Diksi seperti “penyelidikan”, “tindak pidana”, dan “koordinasi” merupakan bagian dari leksikon hukum yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemberitaan diarahkan untuk memperkuat persepsi terhadap keterlibatan aparat hukum dalam menangani persoalan pagar laut secara serius dan sesuai prosedur. Tidak ditemukan penggunaan idiom, gaya bahasa kiasan, ataupun metafora yang dapat membentuk kedekatan emosional dengan pembaca. Hal ini menunjukkan bahwa strategi retorik yang diambil tidak diarahkan pada persuasi emosional, melainkan pada penyampaian fakta dan legitimasi tindakan. Dalam konteks pendekatan kualitatif, ini menandakan bahwa media sedang berperan sebagai penyambung informasi legal dan administratif, bukan sebagai penggugah opini atau kritik sosial. Kutipan langsung dari Kombes Pol Joko Sadono digunakan sebagai elemen sentral untuk memperkuat otoritas narasi. Kehadiran tokoh dari kepolisian dalam teks bukan hanya berfungsi sebagai narasumber, tetapi juga sebagai simbol dari keterlibatan negara dalam proses penegakan hukum. Dalam analisis wacana, kutipan seperti ini merepresentasikan bentuk kekuasaan institusional yang dilegitimasi oleh media media tidak sekadar melaporkan, tetapi juga mereproduksi struktur kuasa melalui narasi tokoh otoritatif. Sementara dari sisi visual, penyisipan

gambar yang memperlihatkan personel Ditpolairud berada di lokasi memiliki peran penting dalam membangun kesan autentik atas proses hukum yang sedang berjalan. Gambar ini bukan hanya memperlihatkan keberadaan fisik aparat, tetapi juga secara simbolik memperlihatkan kehadiran negara di ruang konflik, yang secara visual memperkuat kesan bahwa tindakan investigasi sedang berlangsung di bawah pengawasan resmi. Dalam penelitian kualitatif, aspek visual seperti ini berfungsi sebagai penanda legitimasi dan keabsahan tindakan dalam realitas yang dibangun media. Dengan tidak menyertakan grafik atau data visual lainnya, fokus utama pemberitaan tetap berada pada kekuatan pernyataan langsung dan dokumentasi lapangan. Pendekatan retorik semacam ini membentuk nuansa pemberitaan yang tidak provokatif, melainkan administratif dan prosedural. Ini memperkuat *framing* yang menempatkan kasus pagar laut sebagai objek penyelidikan resmi yang tengah ditangani secara sah oleh institusi negara.

#### 4.2.5. Analisis Artikel Berita 5 Kompas.com

Judul : Pagar Laut di Tangerang Dibongkar, 600 Prajurit TNI AL  
 Dikerahkan  
 Sumber : Kompas.com  
 Tanggal : 18 Januari 2025  
 Ringkasan : TNI Angkatan Laut membongkar pagar laut ilegal di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, pada 18 Januari 2025, dengan mengerahkan 600 prajurit. Pembongkaran dilakukan karena pagar tidak berizin, mengganggu nelayan, dan merusak ekosistem laut. Pemerintah berharap laut kembali bisa diakses masyarakat secara normal.

Tabel 4.5. Analisis Artikel Berita 5 Kompas.com

Perangkat <i>Framing</i>	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Pagar Laut di Tangerang Dibongkar, 600 Prajurit TNI AL Dikerahkan
	Lead	TNI Angkatan Laut membongkar pagar laut yang terbentang di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025).
	Latar Informasi	Pembongkaran dilakukan karena pagar laut sebelumnya dinilai ilegal dan mengganggu akses

nelayan. Aksi ini adalah lanjutan dari penyegelan oleh KKP. TNI AL dikerahkan untuk membantu pembongkaran karena panjang pagar sangat besar dan tersebar.

Kutipan

Kutipan langsung:

1. "Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral," ujar Komandan Lantamal III Brigadir Jenderal Harry Indarto
2. "Kami meminta untuk membuka akses maupun memberikan rambu-rambu, sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar-masuk alur untuk menuju ke laut," ungkap dia. (Harry)

Kutipan tidak langsung:

Harry menyatakan, pembongkaran berangkat dari keluhan nelayan mengenai pemagaran laut yang mengganggu akses mereka saat mencari tangkapan.

Sumber

TNI Angkatan Laut, Komandan Lantamal III Brigadir Jenderal Harry Indarto

Pernyataan Opini

Tidak Ada

Penutup

Pemasangan pagar tanpa izin ini dinilai menghambat aktivitas nelayan dan berpotensi merusak keseimbangan ekosistem pesisir.

Struktur Skrip

*What*

Pembongkaran pagar laut oleh TNI AL

*Where*

Perairan, Kabupaten Tangerang, Banten

*When*

18 Januari 2025

*Who*

TNI Angkatan Laut, Komandan Lantamal III Brigadir Jenderal Harry Indarto

*Why*

Karena pagar dinilai ilegal, mengganggu akses laut, dan tidak berizin

*How*

600 personel TNI AL dikerahkan dengan kapal, alat berat, dan kerja sama KKP

Struktur Tematik

Paragraf,

Paragraf 1-2

Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat

Paragraf pertama dan kedua fokus pada pelaksanaan pembongkaran pagar laut oleh TNI Angkatan Laut di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang. Disebutkan bahwa pembongkaran ini dilakukan pada Sabtu, 18 Januari 2025, dan melibatkan 600 prajurit TNI AL. Dalam dua paragraf ini ditekankan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari operasi resmi negara yang berskala besar dan terorganisir, sebagai lanjutan dari proses penyegelan sebelumnya.

Paragraf 3

Paragraf ini menjelaskan alasan hukum di balik pembongkaran pagar laut. Dijelaskan bahwa pagar tersebut tidak memiliki izin KKPRL dan berada di zona pemanfaatan laut yang dilindungi (Zona Perikanan Tangkap dan Zona Pengelolaan Energi). Dengan demikian, pembongkaran dilakukan untuk menegakkan hukum dan aturan tata ruang laut.

#### Paragraf 4

Paragraf ini menyampaikan bahwa selain ilegal secara administratif, keberadaan pagar laut juga berdampak negatif terhadap masyarakat pesisir. Pagar dianggap mengganggu aktivitas melaut nelayan dan berpotensi merusak ekosistem laut. Penegasan ini memperkuat urgensi pembongkaran dari sisi sosial dan lingkungan.

#### Paragraf 5

Paragraf ini berisi kutipan dari Kolonel Laut Hendry Suhardjono yang menyatakan bahwa pembongkaran dilakukan berdasarkan perintah langsung dari pimpinan TNI untuk membantu pemerintah menjaga ketertiban ruang laut. Kutipan ini berfungsi memperkuat legitimasi tindakan yang dilakukan TNI AL.

#### Paragraf 6

Paragraf terakhir mengungkap harapan dari pemerintah bahwa setelah pembongkaran, ruang laut akan kembali normal, dapat diakses masyarakat, dan ekosistem pesisir bisa dipulihkan. Penutup ini memberi nuansa solusi dan optimisme atas langkah yang telah diambil.

Struktur Retoris

Kata, Idiom,  
Gambar, Grafik

Pada gambar di artikel, penulis menyertakan foto dokumentasi prajurit TNI AL berdiri di cerucuk bambu laut.

Gambar ini memperkuat kredibilitas visual dan memberi bukti nyata tindakan yang diberitakan.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Struktur ini di berita ini tersusun secara sistematis mulai dari judul hingga penutup. Judul berita menggunakan kalimat aktif pasif yang langsung menyampaikan inti peristiwa, yakni pembongkaran pagar laut oleh TNI AL dengan melibatkan 600 prajurit. Lead ditulis singkat dan padat, langsung menyampaikan unsur utama 5W (*What, who, where, when*) tanpa narasi tambahan. Latar informasi menjelaskan konteks bahwa pembongkaran ini merupakan lanjutan dari tindakan penyegelan oleh KKP karena pagar laut dianggap ilegal dan mengganggu akses nelayan. Dalam berita ini terdapat kutipan langsung dari Komandan Lantamal III Brigjen Harry Indarto yang memperkuat keabsahan sumber, serta kutipan tidak langsung yang menjelaskan latar keluhan masyarakat. Tidak terdapat opini dari penulis, menunjukkan gaya penulisan yang objektif dan netral. Penutup berita

memuat pernyataan yang menegaskan bahwa pagar laut tidak berizin dan dapat merusak ekosistem pesisir, sekaligus memberi gambaran dampak serta alasan pembongkaran.

## 2. Struktur Skrip

Struktur ini di berita ini sudah lengkap serta jelas. Unsur *What* dijawab melalui tindakan pembongkaran pagar laut oleh TNI AL. *Where* disebutkan dengan rinci yaitu perairan Kabupaten Tangerang, Banten. *When* dijelaskan secara spesifik yaitu tanggal 18 Januari 2025. Unsur *Who* merujuk pada pelaku kegiatan, yaitu TNI Angkatan Laut dengan pimpinan Brigjen Harry Indarto. *Why* dijelaskan melalui alasan bahwa pagar laut tersebut dinilai ilegal, mengganggu akses nelayan, serta tidak memiliki izin resmi (KKPRL). Terakhir, *How* diuraikan melalui jumlah personel yang dikerahkan (600 prajurit), penggunaan kapal dan alat berat, serta kolaborasi dengan KKP. Semua unsur 5W + 1H tercakup secara eksplisit dan sistematis dalam teks berita.

## 3. Struktur Tematik

Struktur ini di berita ini memperlihatkan kesinambungan antarparagraf yang saling memperkuat. Paragraf 1 dan 2 berfokus pada pelaksanaan dan skala tindakan pembongkaran oleh TNI AL, memberikan gambaran tentang waktu, tempat, dan jumlah personel yang terlibat. Paragraf 3 menjelaskan dasar hukum dan tata ruang yang dilanggar oleh keberadaan pagar laut. Paragraf 4 menambahkan dimensi sosial dan ekologis, yakni kerugian yang dialami nelayan dan ancaman terhadap ekosistem. Paragraf 5 menyampaikan kutipan resmi dari TNI AL sebagai legitimasi tindakan, dan paragraf 6 menutup dengan harapan pemerintah terhadap pemulihan fungsi laut bagi masyarakat. Setiap paragraf memperluas informasi dari sebelumnya, menunjukkan keterpaduan tematik yang kuat. Berdasarkan pola ini, berita termasuk dalam *framing* tematik karena mengangkat persoalan pagar laut bukan sekadar sebagai peristiwa, melainkan sebagai bagian dari persoalan tata kelola ruang laut, dampak sosial-lingkungan, dan

kebijakan pemerintah. Tidak berfokus pada insiden sesaat (episodik), melainkan membangun narasi menyeluruh dan struktural.

#### 4. Struktur Retoris

Dalam pemberitaan ini, aspek visual memainkan peran penting dalam membangun kredibilitas narasi yang disampaikan oleh media. Foto dokumentasi yang menampilkan prajurit TNI AL berdiri di atas cerucuk bambu laut bukan sekadar pelengkap, melainkan berfungsi sebagai penegasan visual atas tindakan konkret yang dilakukan di lapangan. Gambar ini menyiratkan kehadiran negara melalui aparat militernya dalam merespons permasalahan pagar laut yang dikonstruksikan sebagai gangguan atau pelanggaran. Dengan menampilkan aparat berseragam lengkap dan berada langsung di lokasi, media memperkuat legitimasi tindakan pembongkaran yang dilaporkan. Secara retoris, gaya penulisan dalam artikel cenderung formal, langsung, dan berorientasi pada penyampaian informasi yang faktual. Pilihan kata seperti “dibongkar”, “mengganggu”, “dikerahkan”, dan “tidak berizin” menciptakan citra bahwa tindakan pemerintah merupakan langkah tegas terhadap sesuatu yang dianggap ilegal atau merugikan. Tidak ditemukan penggunaan idiom atau gaya bahasa metaforis yang menandakan upaya dramatisasi; sebaliknya, narasi dibangun dengan pendekatan netral dan administratif, yang pada akhirnya mengarahkan pembaca untuk memandang peristiwa ini sebagai bagian dari penegakan hukum dan tata kelola wilayah. Meskipun tidak terdapat elemen visual lain seperti grafik atau infografik, keberadaan data numerik dalam teks misalnya penyebutan jumlah personel yang dikerahkan (600 prajurit) serta panjang pagar laut (30,16 km) menunjukkan bahwa media tetap mengandalkan elemen kuantitatif untuk memperkuat objektivitas pemberitaan. Angka-angka tersebut berfungsi sebagai indikator skala persoalan maupun keseriusan respons pemerintah. Dalam konteks konstruksi media, penyajian visual dan retoris ini mencerminkan upaya media untuk mengarahkan pemahaman pembaca terhadap suatu kerangka berpikir tertentu: bahwa negara hadir, bertindak tegas, dan sah dalam

menjalankan fungsinya. Dengan itu, media tidak hanya melaporkan kejadian, tetapi juga ikut membentuk realitas sosial dan legitimasi atas kebijakan pemerintah dalam menangani isu pagar laut.

#### 4.2.6. Analisis Artikel Berita 6 Kompas.com

Judul : Menanti Jerat Pidana untuk "Dalang" Pagar Laut  
 Sumber : Kompas.com  
 Tanggal : 27 Januari  
 Ringkasan : Polemik pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang memasuki tahap baru. Sesudah dilakukan pembongkaran, perhatian publik kini mengarah pada penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Mahfud MD dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mendorong agar kasus ini tidak berhenti pada pelanggaran administratif, tetapi diproses ke ranah pidana karena diduga melibatkan pemalsuan dokumen dan korupsi pertanahan. Komisi IV DPR RI dan Kejaksaan Agung turut menyelidiki kasus ini, dengan fokus pada penerbitan sertifikat ilegal di atas laut dan dampaknya terhadap nelayan serta ruang laut publik.

Tabel 4.6. Analisis Artikel Berita 6 Kompas.com

<b>Perangkat Framing</b>	<b>Unit Pengamatan</b>	<b>Hasil Pengamatan</b>
Struktur Sintaksis	Judul	Menanti Jerat Pidana untuk "Dalang" Pagar Laut
	Lead	Polemik pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Tangerang, Banten, terus berlanjut. Pembahasan bukan lagi soal pembongkaran maupun penerbitan sertifikat pagar laut yang masih menjadi teka-teki, melainkan sampai ke ancaman pidana.
	Latar Informasi	Pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang, Banten, menjadi polemik karena dilakukan tanpa izin resmi dan disertai penerbitan ratusan sertifikat hak guna bangunan (HGB) di wilayah perairan. Tindakan tersebut dianggap melanggar hukum tata ruang laut dan merugikan nelayan serta masyarakat pesisir. Setelah dilakukan pembongkaran fisik oleh pemerintah, sorotan kini beralih pada upaya penegakan hukum. Sejumlah tokoh nasional dan lembaga negara mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak hanya dikenai sanksi administratif, tetapi juga diproses secara pidana karena diduga terlibat dalam praktik korupsi dan pemalsuan dokumen pertanahan.

	Kutipan	<p>Kutipan langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Kasus pemagaran laut, seharusnya segera dinyatakan sebagai kasus pidana, bukan hanya ramai-ramai membongkar pagar," kata Mahfud</li> <li>2. "Tetapi kok tidak ada aparat penegak hukum pidana yang bersikap tegas?" ujarnya. (Mahfud)</li> <li>3. "Di sana ada penyerobotan alam, pembuatan sertifikat ilegal, dugaan kolusi-korupsi," ungkap dia. (Mahfud)</li> </ol>
	Kutipan tidak langsung:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahfud MD menyarankan agar kasus pagar laut di Tangerang segera dinyatakan sebagai kasus pidana.</li> <li>2. Menurutnya, kasus ini perlu dinyatakan sebagai pidana karena dampak yang ditimbulkan akibat penerbitan sertifikat tersebut. (Mahfud)</li> <li>3. Sakti menegaskan bahwa penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemagaran tidak sekadar sanksi administrasi.</li> <li>4. Sakti mengakui, KKP memang hanya memiliki kewenangan pada aspek administratif.</li> <li>5. "Ya pasti (ada peluang dibawa ke ranah pidana), kan koridor kita di sini. Itu ruangnya kan ke sana, jadi kalau yang ke sana kita koordinasikan," ujar Sakti</li> </ol>
Sumber		Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud MD.
Pernyataan Opini		KKP melalui Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono
Penutup		Kementerian ATR/BPN
		Tidak Ada
Struktur Skrip	<i>What</i>	Teka-teki penerbit sertifikat itu juga menyeret beberapa mantan menteri maupun wakil menteri ATR/BPN, seperti Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni. Namun, keduanya kompak mengaku tidak tahu-menahu soal penerbitan sertifikat pagar laut tersebut. Sebab, penerbitan SHGB di lokasi tersebut merupakan wewenang Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kab. Tangerang.
	<i>Where</i>	Pemerintah dan tokoh nasional mendorong penegakan hukum pidana terhadap pelaku di balik pagar laut ilegal.
	<i>When</i>	Pesisir, Kabupaten Tangerang, Banten.
	<i>Who</i>	27 Januari 2025. Guru Besar Hukum Tata Negara UII Mahfud MD. KKP melalui Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono

		Kementerian ATR/BPN
	<i>Why</i>	Karena pagar laut dibuat tanpa izin resmi dan telah merampas akses laut publik serta berdampak pada nelayan dan lingkungan.
	<i>How</i>	Melalui dorongan tokoh publik, investigasi oleh Kejaksaan, serta desakan agar pihak kepolisian memprosesnya ke ranah pidana.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	Paragraf 1-2 Memperkenalkan perkembangan baru dalam kasus pagar laut di pesisir Tangerang. Isu yang sebelumnya hanya seputar pembongkaran dan kejanggalan sertifikat kini berkembang ke arah tuntutan proses pidana  Paragraf 3 Pernyataan Mahfud MD yang menyoroti bahwa kasus ini tidak bisa diselesaikan secara administratif, melainkan harus masuk ke ranah pidana.  Paragraf 4 Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan siap menyerahkan data kepada aparat hukum, menandakan bahwa KKP mendukung proses pidana.  Paragraf 5 Komisi IV DPR RI mendesak Kepolisian dan Kejaksaan untuk memproses pelaku ke jalur hukum, serta mempertanyakan legalitas penerbitan sertifikat di atas laut.  Paragraf 6 Kejaksaan Agung menyatakan bahwa mereka sedang mendalami potensi pelanggaran hukum, termasuk korupsi dan pemalsuan dokumen dalam kasus pagar laut.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Dalam aspek retoris, berita ini mempergunakan kata-kata yang memperkuat nuansa hukum dan tekanan moral, seperti: “jerat pidana”, “dalang”, “tidak bisa dibiarkan”, “korupsi pertanahan”, dan “harus diseret ke ranah hukum”. Kata-kata tersebut memberi penekanan terhadap tuntutan publik atas keadilan. Tidak ditemukan idiom atau metafora khas, tetapi istilah “dalang” digunakan sebagai metafora yang menggambarkan tokoh tersembunyi di balik pemasangan pagar laut. Dalam gambar, penulis menyisipkan dokumentasi momen TNI AL yang sedang membongkar pagar laut untuk mewakili isi pemberitaan.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Secara sintaksis, struktur berita ini disusun secara naratif serta berkembang dari awal hingga akhir. Judulnya, “*Menanti Jerat Pidana untuk ‘Dalang’ Pagar Laut*”, bersifat sugestif sekaligus investigatif. Diksi “jerat pidana” menunjukkan arah pemberitaan pada aspek hukum, sementara kata “dalang” digunakan sebagai metafora untuk pihak yang dianggap bertanggung jawab namun belum terungkap secara terang. Lead langsung memperlihatkan bahwa polemik pagar laut di pesisir Tangerang kini tidak lagi hanya soal pembongkaran fisik, tetapi menyangkut aspek pidana dan kejanggalaan administratif dalam penerbitan sertifikat. Latar informasi disampaikan dengan cukup rinci: pagar laut dipasang tanpa izin resmi, diterbitkan sertifikat HGB secara ilegal, dan merugikan nelayan serta masyarakat pesisir. Kutipan-kutipan disampaikan secara langsung serta tidak langsung dari tokoh seperti Mahfud MD dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.

- Penutup berita menyebut bahwa penerbitan sertifikat ini juga menyeret nama-nama mantan pejabat tinggi, namun mereka membantah terlibat dan mengalihkan tanggung jawab kepada pejabat tingkat lokal. Gaya penulisan objektif tanpa opini jurnalis, mengikuti kaidah jurnalistik hard news yang mengutamakan fakta dan kutipan tokoh.

## 2. Struktur Skrip

Berita ini memuat unsur 5W + 1H dengan lengkap dan terstruktur. *What* yang disampaikan adalah dorongan penegakan hukum pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat di kasus pagar laut ilegal. *Where* terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. *When* berada dalam konteks peristiwa terkini yang diberitakan pada tanggal 27 Januari 2025. *Who* melibatkan tokoh-tokoh penting dan institusi negara yakni Mahfud MD (Guru Besar Hukum Tata Negara), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Kementerian ATR/BPN. *Why* berita ini muncul karena tindakan pemasangan pagar laut dilakukan tanpa izin resmi dan berdampak pada akses publik serta lingkungan pesisir. Sedangkan *How* disampaikan melalui desakan tokoh publik, investigasi oleh Kejaksaan Agung, serta desakan ke aparat penegak hukum agar memproses kasus ini

ke ranah pidana. Penyampaian 5W + 1H ini memperkuat struktur berita sebagai laporan investigatif yang menyeluruh.

### 3. Struktur Tematik

Struktur ini di berita ini dibangun dengan kesinambungan antarparagraf yang logis dan progresif. Paragraf 1–2 menjelaskan bahwa isu pagar laut telah berkembang dari pembongkaran fisik menjadi desakan proses hukum pidana. Paragraf 3 memuat pernyataan Mahfud MD yang menekankan bahwa kasus ini tidak boleh berhenti pada sanksi administratif, karena ada unsur penyerobotan ruang laut dan indikasi korupsi. Paragraf 4 berisi dukungan dari Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang siap menyerahkan data dan berkoordinasi dengan aparat hukum. Paragraf 5 mencatat pernyataan dari Komisi IV DPR yang mendesak aparat hukum bertindak serta mempertanyakan legalitas sertifikat yang diterbitkan di laut. Paragraf 6 menutup dengan posisi Kejaksaan Agung yang menyatakan tengah mendalami dugaan pidana berupa korupsi dan pemalsuan dokumen. Semua paragraf saling terhubung secara kronologis dan argumentatif, menunjukkan perkembangan opini dan sikap negara terhadap kasus ini. Oleh karena itu, berita ini jelas termasuk dalam *framing* tematik karena mengangkat permasalahan secara struktural dan sistemik, bukan sebagai potret insiden sesaat. Berita mengajak pembaca memahami konteks hukum, politik, dan tata ruang laut secara menyeluruh.

### 4. Struktur Retoris

Dalam artikel ini, konstruksi realitas dibentuk secara kuat melalui pemilihan bahasa yang sarat nuansa hukum dan moral. Berbeda dengan gaya pelaporan yang netral dan deskriptif, media dalam pemberitaan ini secara aktif menggunakan diksi yang menunjukkan sikap tegas terhadap pelanggaran hukum, serta membangun kerangka naratif yang mengajak pembaca untuk melihat kasus pagar laut sebagai tindakan kejahatan yang serius dan terorganisir. Istilah-istilah seperti “jerat pidana”, “pembuatan sertifikat ilegal”, hingga “harus diseret ke ranah hukum” tidak hanya menyampaikan

informasi, melainkan membentuk persepsi bahwa peristiwa ini merupakan persoalan hukum yang menuntut tindakan keras. Secara retorik, gaya penulisan tersebut menggambarkan posisi media sebagai pihak yang berpihak pada tuntutan keadilan publik. Kata “dalang”, misalnya, digunakan sebagai metafora yang memberi kesan adanya aktor tersembunyi yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Meskipun identitas pelaku utama tidak diungkap secara langsung, penggunaan istilah ini mengarahkan pembaca untuk membayangkan bahwa terdapat kekuatan atau kepentingan tertentu yang berperan di balik kasus pagar laut. Ini memperlihatkan bagaimana media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membangun narasi melalui konstruksi simbolik. Walaupun tidak terdapat idiom atau gaya bahasa yang bersifat puitis atau metaforis secara umum, nuansa moral dalam pemberitaan tetap terbangun kuat melalui pilihan kata yang penuh tekanan dan tuntutan. Media secara aktif menanamkan pesan bahwa tindakan yang terjadi bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi sudah menyentuh wilayah kejahatan lingkungan dan korupsi pertanahan, yang oleh karenanya patut dikutuk secara hukum dan sosial. Dari sisi visual, penyisipan foto yang menunjukkan prajurit TNI AL tengah membongkar pagar laut menjadi representasi simbolik dari intervensi negara. Gambar ini memperkuat pesan bahwa pemerintah melalui aparatnya telah melakukan tindakan nyata atas pelanggaran yang terjadi. Dalam kerangka konstruksi media, visual tersebut bukan sekadar ilustrasi, tetapi turut berperan dalam menegaskan keberpihakan terhadap narasi penegakan hukum dan pemberantasan praktik ilegal. Ketidakhadiran elemen seperti grafik atau infografik digantikan oleh kekuatan retorik yang muncul melalui kutipan-kutipan tokoh dan penyebutan tindakan tegas. Hal ini memperlihatkan bahwa strategi penyampaian informasi lebih bertumpu pada aspek wacana dan narasi ketimbang data visual, dengan tujuan memperkuat efek moral dan politis dari berita yang disampaikan. Melalui kombinasi gaya bahasa hukum, metafora simbolik, serta representasi visual aparat negara, artikel ini membangun konstruksi realitas bahwa kasus pagar laut adalah manifestasi dari pelanggaran serius terhadap hukum dan tata

ruang, serta menjadi simbol dari praktik kekuasaan yang tidak transparan dan merugikan kepentingan publik.



#### 4.2.7. Analisis Artikel Berita 7 Kompas.com

Judul : Nusron Wahid Copot 6 Pegawai yang Terlibat Penerbitan SHGB di Laut Tangerang

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 30 Januari 2025

Ringkasan : Kementerian ATR/BPN menjatuhkan sanksi kepada 8 pegawai yang terlibat pada penerbitan ilegal sertifikat SHGB dan SHM di area pagar laut Tangerang. Ada 6 pegawai dicopot dari jabatannya dan 2 lainnya diberi sanksi berat. Nusron Wahid, Kepala ATR/BPN, menyatakan bahwa penerbitan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah karena berada di dalam garis pantai atau area perairan umum. Sebanyak 50 sertifikat sudah dibatalkan dan proses pencocokan data untuk ratusan bidang lainnya masih berlanjut. Tanah yang termasuk *common property* (milik umum) tidak boleh disertifikasi, dan pemerintah akan terus membatalkan hak atas tanah yang tidak sah secara prosedural.

Tabel 4.7. Analisis Artikel Berita 7 Kompas.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Nusron Wahid Copot 6 Pegawai yang Terlibat Penerbitan SHGB di Laut
	Lead	Kementerian ATR/BPN menjatuhkan sanksi delapan pegawai yang terlibat dalam penerbitan SHGB dan SHM di area pagar laut Tangerang.
	Latar Informasi	Polemik pagar laut di pesisir Tangerang memunculkan temuan baru berupa penerbitan ratusan SHGB dan SHM di area laut yang seharusnya tidak dapat disertifikasi. Kementerian ATR/BPN menjatuhkan sanksi administratif, termasuk pencopotan jabatan dan pembatalan 50 sertifikat. Kepala ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa wilayah laut tidak bisa dimiliki secara pribadi dan penerbitan sertifikat di kawasan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah.
Kutipan		Kutipan langsung: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Kami memberikan sanksi berat berupa pencopotan dari jabatan kepada enam pegawai dan sanksi berat kepada dua pegawai lainnya. Nama-nama pegawainya tidak bisa kami sebut, cukup inisial saja,” ujar Nusron</li> <li>2. “Sementara ini yang kami batalkan 50 bidang dari total 263 SHGB dan 17</li> </ol>

SHM. Sisanya masih dalam proses pencocokan, apakah ada di dalam atau di luar garis pantai. Potensinya masih bisa bertambah,” kata Nusron.

3. “Kami analisis mana yang berada di dalam garis pantai dan mana yang di luar. Tanah di luar garis pantai tidak bisa disertifikatkan karena masuk dalam common property atau common land,” kata Nusron.
4. “Yang masuk dalam common property harus dibatalkan. Yang masuk private property, jika sesuai prosedur, tidak akan dibatalkan,” tambahnya. (Nusron)

Kutipan tidak langsung:

1. Nusron menyebut enam pegawai yang diberhentikan, yaitu: 1. JS – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang saat itu 2. SH – Eks-Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran 3. ET – Eks-Kepala Seksi Survei dan Pemetaan 4. WS – Ketua Panitia A 5. JS – Ketua Panitia A 6. NS – Panitia A
2. Selain itu, ada dua pegawai lain yang juga terkena sanksi berat, yaitu: 1. LM – Eks-Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET 2. KA – Eks-Plt Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
3. Nusron menegaskan, mereka sudah diperiksa oleh inspektorat dan tinggal menunggu proses pengesahan sanksi serta pemberhentian resmi dari jabatannya.
4. Sebelumnya, Nusron mengatakan jumlah sertifikat SHGB yang dibatalkan berpotensi bertambah. Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN telah membatalkan 50 bidang tanah di area pagar laut Tangerang.
5. Menurutnya, pembatalan SHGB 50 bidang tanah di perairan Tanjung Pasir, Kab. Tangerang, Banten, dilakukan dalam waktu empat hari kerja.
6. Ia menegaskan, pembatalan hak atas tanah akan terus berlanjut sesuai hasil pencocokan data.

Sumber  
Pernyataan Opini  
Penutup

Kementerian ATR/BPN, Nusron Wahid.  
Tidak Ada

Struktur Skrip

*What*

Ia menegaskan, pembatalan hak atas tanah akan terus berlanjut sesuai hasil pencocokan data. Pencopotan enam pegawai dan pemberian sanksi terhadap dua pegawai ATR/BPN karena menerbitkan sertifikat di area laut.

*Where*  
*When*  
*Who*

Pagar Laut Tangerang  
30 Januari 2025  
Nusron Wahid (Kepala ATR/BPN) dan delapan pegawai yang terlibat.

	<i>Why</i>	Karena sertifikat diterbitkan secara tidak sah di wilayah yang seharusnya menjadi milik publik (laut/garis pantai), bukan tanah pribadi.
	<i>How</i>	Dengan pemecatan karyawan, sanksi administratif, pencabutan 50 sertifikat secara resmi dalam 4 hari kerja, dan analisis teknis lokasi bidang tanah.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	<p>Paragraf 1-2 menekankan fakta utama, yaitu pencopotan enam pegawai dan pemberian sanksi terhadap dua lainnya karena menerbitkan sertifikat tanah di wilayah laut yang tidak sah secara hukum.</p> <p>Selanjutnya, paragraf 3 menjelaskan bahwa sertifikat tersebut diterbitkan di wilayah Tanjung Pasir yang berada di bawah garis pantai, sebuah kawasan yang menurut aturan pertanahan termasuk dalam ruang laut dan bukan tanah yang boleh dimiliki pribadi.</p> <p>Paragraf 4 memperluas informasi dengan menjelaskan bahwa pemerintah telah membatalkan 50 sertifikat dan masih menelusuri ratusan lainnya.</p> <p>Paragraf 5 menegaskan prinsip bahwa laut adalah common property atau milik publik, sehingga tidak bisa disertifikasi atau diklaim sebagai kepemilikan pribadi.</p> <p>Paragraf 6-9 memperjelas proses internal Kementerian ATR/BPN, menyebut inisial nama pegawai yang dijatuhi sanksi, serta menjelaskan posisi mereka sebagai petugas ukur bidang tanah.</p> <p>Keterkaitan antar paragraf berjalan secara kronologis dan logis, dari pelanggaran, penindakan, penjelasan hukum, pendalaman administratif.</p>
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Dalam artikel berita yang dilakukan oleh penulis terdapat dokumentasi Nusron Wahid saat konferensi pers, yang memperkuat kredibilitas berita dan memberi penegasan bahwa tindakan ini merupakan keputusan resmi dari institusi pemerintah.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Struktur ini di artikel ini tersusun secara sistematis mulai dari judul hingga penutup. Judul "Nusron Wahid Copot 6 Pegawai yang Terlibat Penerbitan SHGB di Laut Tangerang" bersifat informatif dan langsung menyampaikan inti peristiwa, yaitu tindakan tegas dari pejabat negara terhadap pelanggaran

hukum oleh pegawai pemerintahan. Lead atau pembuka berita menyampaikan pokok masalah secara ringkas dan padat, menginformasikan sanksi yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN terhadap delapan pegawai. Paragraf-paragraf berikutnya menyajikan latar belakang peristiwa, pernyataan resmi pejabat terkait, serta penjelasan teknis mengenai lokasi dan status tanah yang disengketakan. Kutipan langsung dari Nusron Wahid memperkuat otoritas isi berita, sementara kutipan tidak langsung memberikan rincian tambahan tentang pihak-pihak yang terlibat. Tidak ditemukan bagian penutup eksplisit yang bersifat kesimpulan, tetapi keseluruhan struktur sudah membentuk penutupan secara implisit melalui penegasan sanksi dan langkah lanjutan dari pemerintah.

## 2. Struktur Skrip

Struktur ini di artikel ini sudah mencakup unsur 5W1H dengan lengkap. *What* dijelaskan melalui tindakan pencopotan jabatan dan pemberian sanksi berat kepada pegawai yang terlibat. *Where* disebutkan jelas yaitu di area pagar laut Tangerang, khususnya Tanjung Pasir. *When* tercantum secara spesifik, yakni pada tanggal 30 Januari 2025. *Who* merujuk pada Nusron Wahid sebagai Kepala ATR/BPN dan delapan pegawai yang terkena sanksi. *Why* diuraikan dalam konteks penerbitan sertifikat di wilayah perairan yang tergolong sebagai milik umum (common property), yang menurut hukum tidak boleh disertifikasi. Terakhir, *How* dijelaskan melalui mekanisme pemberian sanksi administratif, pencopotan jabatan, pembatalan 50 sertifikat dalam waktu empat hari, serta analisis garis pantai untuk menentukan legalitas bidang tanah lainnya.

## 3. Struktur Tematik

Struktur tematik artikel ini tersusun logis dan kronologis, dimulai dari pengungkapan fakta utama, latar belakang peristiwa, hingga rincian teknis serta langkah lanjutan. Setiap paragraf memiliki fokus proposisional yang jelas dan saling terhubung, memperkuat pemahaman pembaca terhadap kompleksitas kasus. Artikel ini termasuk dalam *\*framing tematik\**, bukan

episodik. Hal ini ditunjukkan oleh fokus pembahasan yang menyeluruh terhadap isu struktural dan kebijakan publik terkait pertanahan serta tanggung jawab institusional, alih-alih sekadar mengangkat cerita personal atau narasi per individu. Penekanan pada prinsip hukum, ruang publik, dan tindakan sistemik dari pemerintah menjadi karakter utama *framing* tematik.

#### 4. Struktur Retoris

Dalam pemberitaan ini, media membangun legitimasi naratif melalui pemanfaatan sumber resmi dan dokumentasi visual yang berfungsi memperkuat posisi institusi pemerintah. Tokoh utama yang dikutip adalah Nusron Wahid, yang dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik memberikan pernyataan resmi kepada media. Penggunaan kutipan langsung dari figur otoritatif ini bukan hanya menjadi penegasan fakta, tetapi juga membentuk persepsi bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah telah melalui proses yang legal, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara institusional. Gaya bahasa yang digunakan dalam artikel ini mencerminkan karakteristik *hard news*, yakni lugas, faktual, dan tanpa ornamen bahasa emosional. Tidak banyak ditemukan idiom, ungkapan kiasan, atau metafora yang memperindah atau menambahkan muatan interpretatif terhadap isi berita. Pilihan diksi lebih banyak diarahkan untuk menjelaskan proses, langkah hukum, dan sanksi yang dijatuhkan, sehingga wacana yang dibentuk lebih bernuansa administratif dan birokratis. Salah satu aspek menarik dari retorika pemberitaan ini adalah penggunaan nama-inisial untuk menyebut pegawai yang dikenai sanksi. Strategi ini menunjukkan adanya kehati-hatian dari media dalam menyampaikan informasi yang bersifat sensitif. Di satu sisi, hal ini memperlihatkan upaya untuk menjaga etika jurnalistik dalam melindungi identitas individu sebelum adanya keputusan hukum final. Namun di sisi lain, tetap disampaikannya inisial menunjukkan bahwa media ingin menegaskan bahwa tindakan tegas telah dijalankan dan ada individu yang bertanggung jawab, meski tidak secara eksplisit disebutkan. Dari aspek visual, media menyisipkan dokumentasi momen konferensi pers yang dihadiri langsung

oleh Nusron Wahid. Kehadiran gambar ini tidak hanya berfungsi sebagai ilustrasi, tetapi turut memperkuat makna simbolik dari pemberitaan. Foto tersebut menyampaikan pesan non-verbal bahwa isu ini ditangani secara serius di level struktural tertinggi dan bukan hanya menjadi wacana publik semata. Visualisasi tokoh dalam konteks formal (konferensi pers) menjadi strategi media dalam membingkai keabsahan tindakan, serta menunjukkan transparansi pemerintah di hadapan publik. Dalam kerangka konstruksi media, gabungan antara kutipan tokoh otoritatif dan dokumentasi visual lembaga menghasilkan efek legitimasi ganda — baik secara verbal (melalui narasi teks) ataupun non-verbal (melalui citra visual). Hal ini menciptakan kesan bahwa institusi pemerintah tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga tampil secara terbuka dan bertanggung jawab di ruang publik. Dengan demikian, pemberitaan ini menunjukkan bagaimana media membangun narasi keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah dalam menangani pelanggaran internal. Melalui pendekatan retorik yang formal serta representasi visual yang strategis, media membingkai peristiwa ini bukan sekadar sebagai laporan insiden, tetapi sebagai manifestasi dari ketegasan negara dalam menjaga integritas institusinya.

#### **4.2.8. Analisis Artikel Berita 8 Kompas.com**

Judul : TNI AL Sudah Bongkar 22,5 Kilometer Pagar Laut Tangerang  
Sumber : Kompas.com  
Tanggal : 05 Februari 2025  
Ringkasan : Pada 5 Februari 2025, TNI Angkatan Laut telah membongkar sepanjang 22,5 kilometer pagar laut ilegal di perairan Kab. Tangerang, Banten. Pembongkaran mencakup 18,2 km di wilayah Tanjung Pasir dan 4,3 km di Kronjo. Operasi ini melibatkan 219 personel gabungan dari Pasmal 1, Lantamal III, serta Koarmada I, dengan dukungan satu kapal patroli, 10 perahu karet, 1 RBB, serta 1 RHIB. Di sisi lain, sekitar 40 nelayan setempat turut membantu menggunakan 8 kapal. Di lapangan, tim menghadapi berbagai hambatan seperti cuaca buruk, kerusakan mesin

kapal, sistem pagar bambu dua lapis, serta keberadaan keramba apung. Operasi pembongkaran ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, dengan tujuan menjaga keamanan laut, menegakkan hukum, dan membuka akses laut bagi nelayan.

Tabel 4.8. Analisis Artikel Berita 8 Kompas.com

<b>Perangkat Framing</b>	<b>Unit Pengamatan</b>	<b>Hasil Pengamatan</b>
Struktur Sintaksis	Judul	TNI AL Sudah Bongkar 22,5 Kilometer Pagar Laut Tangerang
	Lead	Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama I Made Wira Hady mengatakan, TNI AL telah membongkar pagar laut di Tangerang sepanjang 22,5 kilometer hingga Rabu (5/2/2025) hari ini.
	Latar Informasi	Latar informasi dari berita ini berangkat dari persoalan hukum dan tata ruang di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, khususnya terkait pemasangan pagar laut ilegal oleh pihak-pihak tertentu yang memblokir akses publik ke wilayah perairan. Keberadaan pagar laut tersebut melanggar aturan karena menutup akses masyarakat, khususnya nelayan, terhadap laut sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan mereka. Pemasangan pagar juga dianggap sebagai bentuk penguasaan wilayah laut secara tidak sah, karena laut termasuk dalam Kawasan <i>common property</i> (milik umum) yang tidak boleh diklaim secara pribadi. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembongkaran pagar-pagar laut ilegal untuk menegakkan hukum, menjaga kedaulatan maritim, dan memulihkan hak akses masyarakat. TNI Angkatan Laut pun diturunkan sebagai pelaksana teknis, mengerahkan ratusan personel gabungan dan peralatan operasional untuk melakukan pembongkaran di dua lokasi utama, yakni Tanjung Pasir dan Kronjo. Tindakan ini juga merupakan bagian dari upaya pemberantasan mafia tanah laut dan praktik penyalahgunaan ruang laut oleh oknum tertentu.
	Kutipan	<p>Kutipan langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Operasi yang berlangsung sejak pagi ini berhasil membongkar pagar laut mencapai 22,5 Km dengan rincian 18,2 Km di Tanjung Pasir dan 4,3 Km di Kronjo, Tangerang, Banten," kata Wira</li> <li>2. "Selain itu, 40 orang nelayan setempat juga turun serta membantu proses pembongkaran pagar laut ini dengan menggunakan 8 kapal nelayan," Ujar Kadispenal</li> </ol>

3. "TNI AL berkomitmen untuk terus berupaya secara maksimal dalam menyelesaikan pembongkaran pagar laut ini sesuai perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto guna memastikan keamanan serta kesejahteraan masyarakat pesisir," kata Wira
4. "Hal tersebut tentunya selaras dengan penekanan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali bahwa TNI AL senantiasa siap sedia mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya," Pungkas dia (Wira)

Kutipan tidak langsung:

1. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama I Made Wira Hady mengatakan, TNI AL telah membongkar pagar laut di Tangerang sepanjang 22,5 kilometer hingga Rabu (5/2/2025) hari ini.
2. Lebih lanjut, Wira menyampaikan bahwa pelaksanaan pembongkaran menghadapi beberapa kendala di lapangan, yakni, angin dan gelombang tinggi, keterbatasan daya tarik mesin kapal, serta pagar bambu yang banyak dipasang dua lapis.

Sumber Kadispenal Laksamana Pertama I Made Wira Hady

Pernyataan Opini Tidak Ada

Penutup Untuk diketahui, pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer ini satu bulan terakhir meresahkan masyarakat pesisir Tangerang, Banten. Pagar misterius ini membuat masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan sulit beraktivitas.

Struktur Skrip

*What* Pembongkaran pagar laut ilegal sejauh 22,5 km  
*Where* 2 lokasi utama yakni, 18,2 km di Tanjung Pasir dan 4,3 km di Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten.

*When* 05 Februari 2025

*Who* Melibatkan TNI AL sebagai pelaksana, dengan Kadispenal sebagai juru bicara dan komando teknis, serta keterlibatan 219 personel gabungan dan bantuan dari sekitar 40 nelayan.

*Why* Dijelaskan sebagai perintah dari Presiden Prabowo untuk memastikan keamanan laut dan akses publik, serta untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.

*How* Dilakukan melalui operasi terkoordinasi yang melibatkan berbagai satuan (Pasmal 1, Lantamal III, Koarmada I), penggunaan alat dan armada laut, serta dihadapkan pada hambatan teknis seperti cuaca buruk dan struktur pagar bambu.

Struktur Tematik

Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat Paragraf awal 1–2 memuat pernyataan resmi dari Kadispenal tentang capaian teknis dalam operasi pembongkaran.

Paragraf 3 menjelaskan bantuan masyarakat lokal, terutama para nelayan, dalam kegiatan tersebut.

Lalu, paragraf 4 menguraikan kendala teknis dan kondisi lapangan yang dihadapi tim selama pelaksanaan.

Terakhir, paragraf-paragraf penutup menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang dipimpin oleh Presiden dan KSAL demi menjaga kepentingan publik.

Hubungan antar paragraf bersifat progresif dan logis, bergerak dari fakta lapangan menuju kerangka kebijakan nasional.

Struktur Retoris

Kata, Idiom,  
Gambar, Grafik

Dokumentasi gambar yang disertakan oleh penulis terdapat foto lapangan dalam operasi pembongkaran untuk menambah kredibilitas visual. Gambar seperti ini dapat memperkuat pesan visual tentang keseriusan operasi dan skala pengerahan sumber daya.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Struktur ini di artikel ini disusun secara sistematis mulai dari judul hingga penutup. Judul “TNI AL Sudah Bongkar 22,5 Kilometer Pagar Laut Tangerang” langsung menyampaikan inti peristiwa tanpa ambiguitas, menunjukkan tindakan nyata oleh institusi negara terhadap pelanggaran tata ruang laut. Lead berita memuat pernyataan resmi dari Kadispenal yang menjelaskan tindakan pembongkaran sebagai fakta aktual yang terjadi pada 5 Februari 2025. Latar informasi memperjelas konteks hukum dan sosial yang melatarbelakangi operasi, yaitu pemasangan pagar laut ilegal yang menutup akses nelayan dan dianggap melanggar prinsip ruang publik (common property). Struktur berlanjut dengan kutipan langsung serta tidak langsung dari Kadispenal yang menguraikan rincian teknis, kendala, dan komitmen TNI AL. Tidak terdapat pernyataan opini dari penulis, menunjukkan objektivitas laporan. Bagian penutup menambahkan informasi penting tentang dampak sosial pagar laut terhadap masyarakat pesisir sebelum dibongkar, yang memperkuat alasan moral dan hukum atas tindakan pembongkaran tersebut.

## 2. Struktur Skrip

Struktur 5W1H di artikel ini tersaji dengan lengkap serta terstruktur. *What* merujuk pada tindakan pembongkaran pagar laut ilegal sepanjang 22,5 km. *Where* dijelaskan secara rinci, yaitu 18,2 km di Tanjung Pasir serta 4,3 km di Kronjo, Kabupaten Tangerang. *When* adalah tanggal pelaksanaan, yakni 5 Februari 2025. *Who* melibatkan TNI AL sebagai pelaksana utama dengan juru bicara Kadispnal, serta 219 personel gabungan dan bantuan dari sekitar 40 nelayan. *Why* dijelaskan sebagai bentuk pelaksanaan instruksi Presiden Prabowo untuk menjamin keamanan laut dan hak akses masyarakat pesisir. *How* diterangkan melalui operasi terkoordinasi dengan keterlibatan berbagai satuan militer dan dukungan armada laut, serta menghadapi berbagai kendala teknis di lapangan. Keseluruhan unsur 5W1H disajikan secara eksplisit, membuat pembaca mudah memahami skala, alasan, dan dampak dari peristiwa yang diberitakan.

## 3. Struktur Tematik

Struktur ini di artikel ini menunjukkan kesinambungan yang kuat antara paragraf satu dengan lainnya. Paragraf pertama dan kedua berisi laporan teknis dari Kadispnal mengenai hasil pembongkaran. Paragraf ketiga menyoroti keterlibatan masyarakat, khususnya nelayan lokal, yang menunjukkan adanya sinergi antara aparat negara dan warga sipil. Paragraf keempat memperinci tantangan teknis yang dihadapi, seperti cuaca ekstrem dan pagar bambu berlapis, menambah dimensi realistis dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, paragraf penutup menempatkan operasi ini dalam konteks kebijakan nasional dan kepentingan publik, serta menekankan keresahan masyarakat akibat keberadaan pagar ilegal. Berdasarkan susunan tersebut, dapat disimpulkan bahwa artikel ini termasuk dalam *framing* tematik. Fokusnya bukan pada kejadian insidental atau dramatis, melainkan pada penjelasan mendalam terhadap masalah struktural, kebijakan publik, dan penegakan hukum yang dilakukan secara sistematis oleh negara.

#### 4. Struktur Retoris

Secara retorik, artikel ini mempergunakan bahasa yang formal dan lugas sesuai dengan karakter berita institusional. Ketiadaan idiom, metafora, atau gaya bahasa kiasan menunjukkan bahwa media sengaja menjaga jarak dari dramatisasi, demi menampilkan pemberitaan yang kredibel dan objektif. Ini juga mencerminkan sikap media yang ingin menampilkan citra institusi negara sebagai aktor yang bekerja berdasarkan prosedur, bukan sebagai pelaku yang emosional atau reaktif. Dengan demikian, gaya bahasa yang digunakan menjadi bagian dari strategi retorik untuk membangun kepercayaan publik terhadap langkah yang diambil pemerintah. Namun, kekuatan utama dalam konstruksi makna berita ini justru terletak pada aspek visual. Dokumentasi lapangan yang memperlihatkan langsung proses pembongkaran pagar laut oleh personel TNI AL menjadi bukti konkret yang tidak terbantahkan atas tindakan yang diberitakan. Gambar ini tidak hanya sekadar pelengkap narasi, tetapi berfungsi sebagai penegas yang menyampaikan pesan secara non-verbal: bahwa negara hadir dan bertindak. Visualisasi ini membentuk kesan skala besar dan kesungguhan dalam pelaksanaan operasi. Foto-foto yang menunjukkan aktivitas aparat di lokasi memperkuat imaji tentang pengerahan sumber daya negara secara serius dan terorganisasi. Dalam konteks konstruksi media, ini adalah bentuk *framing* visual yang memperlihatkan bahwa masalah pagar laut bukan persoalan kecil atau sepele, melainkan isu yang mendapat perhatian langsung dari lembaga keamanan negara. Efek persuasif dari gambar tersebut bekerja secara halus namun kuat. Pembaca yang melihat dokumentasi visual itu cenderung akan memaknai berita bukan hanya menjadi informasi tekstual, tetapi juga sebagai representasi dari tindakan yang telah dan sedang berlangsung. Di konteks ini, media tidak hanya memberi informasi, tetapi juga mengarahkan persepsi publik terhadap legitimasi tindakan pemerintah. Secara keseluruhan, perpaduan antara gaya bahasa yang netral dan dokumentasi visual lapangan menciptakan narasi yang menekankan keabsahan, keseriusan, dan skala dari operasi pembongkaran. Hal ini menunjukkan bahwa media, melalui pilihan retorik dan visualnya, berperan

aktif dalam membingkai peristiwa sebagai bagian dari tindakan negara yang terukur dan sah secara hukum.

#### 4.2.9. Analisis Artikel Berita 9 Kompas.com

Judul : Peran Lain Kades Kohod sehingga Didenda Rp 48 Miliar...  
 Sumber : Kompas.com  
 Tanggal : 28 Februari 2025  
 Ringkasan : Kepala Desa Kohod, Arsin, didenda Rp48 miliar oleh KKP sebab terlibat pada pembangunan pagar laut ilegal di perairan Tangerang sepanjang 30,16 km. Ia bertindak sebagai mandor proyek sejak 2021 dan mengakui keterlibatannya bersama seorang perangkat desa berinisial T. Selain sanksi administratif, Arsin juga ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen sertifikat tanah oleh Bareskrim Polri. DPR meragukan kemampuan Arsin membayar denda dan menduga ada pihak lain yang mendanai proyek tersebut. Pembayaran denda tidak menggugurkan proses hukum pidana yang sedang berjalan.

Tabel 4.9. Analisis Artikel Berita 9 Kompas.com

<b>Perangkat Framing</b>	<b>Unit Pengamatan</b>	<b>Hasil Pengamatan</b>
Struktur Sintaksis	Judul	Peran Lain Kades Kohod sehingga Didenda Rp 48 Miliar...
	Lead	Kades Kohod, Arsin, didenda Rp 48 miliar sebagai pelaku pembangunan pagar laut di perairan Kab. Tangerang, Banten.
	Latar Informasi	Pagar laut sepanjang > 30 kilometer yang dibangun secara ilegal di perairan Kab. Tangerang telah memicu konflik antara masyarakat nelayan dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proyek tersebut. Kepala Desa Kohod, Arsin, diketahui berperan aktif sebagai mandor dalam pembangunan pagar laut tersebut sejak tahun 2021. Keberadaan pagar ini tidak hanya menghambat akses nelayan, tetapi juga diduga dibangun berdasarkan dokumen kepemilikan tanah yang dipalsukan. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Bareskrim Polri mulai melakukan penindakan hukum atas pelanggaran tersebut. Selain dijatuhi sanksi administratif berupa denda Rp48 miliar oleh KKP, Arsin juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim atas dugaan pemalsuan dokumen SHGB dan SHM
	Kutipan	Kutipan tidak langsung:

1. Dikutip dari Kompas.com (27/2/2025), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menerapkan denda Rp 48 miliar kepada pelaku pembangunan pagar laut di perairan Kab. Tangerang, Banten.
2. Selain itu, menurut keterangan warga Desa Kohod, Kades Arsin memang terlibat dalam pembangunan pagar laut Tangerang, bahkan dia bertanggung jawab sebagai mandor proyek sejak 2021.
3. Dilansir dari Kompas.com (27/2/2025), pengacara warga Alar Jiban Kohod, Henri Kusuma, memastikan Arsin memang terlibat dalam proyek pemasangan pagar laut.
4. Namun Henri belum bisa berkomentar banyak terkait asal biaya pembangunan pagar laut tersebut dan menyerahkan ke Bareskrim untuk menyelidiki. Menurutnya, biaya pembangunan pagar laut itu tidak sedikit, dan tidak mungkin berasal dari kantong pribadi Arsin maupun dana desa.
5. Mengutip laman Kompas.com (16/2/2025), Arsin telah diperiksa sebagai saksi oleh polisi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin proyek pagar laut di Tangerang.
6. Polisi menyebut pemalsuan surat izin berupa SHGB dan SHM pagar laut sudah terjadi sejak 2021 sampai saat ini.

Struktur Skrip	<p><i>Sumber</i> kutipan yang berasal dari pemberitaan Kompas.com tanggal 27 Februari dan 16 Februari 2025 Arsin (Kepala Desa Kohod) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Bareskrim Polri</p> <p><i>Pernyataan Opini</i> Tidak Ada</p> <p><i>Penutup</i> Kemudian berdasarkan gelar internal Bareskrim Polri, Arsin dan tiga tersangka lain resmi ditahan terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen SHGB-SHM di wilayah pagar laut Tangerang tersebut.</p> <p><i>What</i> Kepala Desa Kohod, Arsin, dikenai denda Rp48 miliar dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembangunan pagar laut ilegal dan pemalsuan dokumen tanah.</p> <p><i>Where</i> Di Desa Kohod dan perairan Kabupaten Tangerang, Banten.</p> <p><i>When</i> Keterlibatan Arsin berlangsung sejak 2021, dan proses penindakan serta penetapan tersangka dilakukan pada Februari 2025.</p> <p><i>Who</i> Arsin (Kepala Desa Kohod) perangkat desa berinisial T Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Bareskrim Polri</p>
----------------	---

	<i>Why</i>	Karena Arsin terlibat langsung sebagai pelaksana proyek pagar laut ilegal dan diduga memalsukan dokumen SHGB dan SHM untuk melegalkan lahan laut.
	<i>How</i>	Melalui penyelidikan PSDKP KKP dan Bareskrim Polri, ditemukan bukti bahwa Arsin bertindak sebagai mandor proyek sejak 2021. Ia dikenai denda administratif dan juga dijerat pasal pidana atas pemalsuan dokumen.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	<p>Paragraf 1-2 Menginformasikan pokok utama bahwa Kepala Desa Kohod, Arsin, didenda Rp48 miliar oleh KKP sebab keterlibatannya dalam pembangunan pagar laut ilegal di perairan Tangerang. Ia juga disebut berperan sebagai pelaksana proyek (mandor) sejak tahun 2021.</p> <p>Paragraf 3-4 Menyajikan keterangan dari warga dan pengacara (Henri Kusuma) yang memperkuat dugaan keterlibatan Arsin. Disampaikan juga bahwa biaya proyek tidak mungkin berasal dari dana pribadi Arsin atau dana desa.</p> <p>Paragraf 5 Mengutip pernyataan dari pihak kepolisian terkait status hukum Arsin, termasuk keterlibatannya dalam pemalsuan dokumen sertifikat seperti SHGB dan SHM.</p> <p>Paragraf 6 Menyampaikan bahwa Bareskrim secara resmi telah menahan Arsin dan tiga tersangka lainnya, sekaligus menegaskan proses hukum tetap berjalan meski denda telah dikenakan.</p>
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Dalam artikel penulis juga menyisipkan gambar Kepala Desa Kohod, Arsin yang sedang menjawab pertanyaan awak media saat konferensi pers di rumahnya, Desa Kohod, Kabupaten Tangerang.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Secara sintaksis, berita ini disusun secara sistematis mulai dari judul yang informatif hingga penutup yang menegaskan proses hukum. Judul “Peran Lain Kades Kohod sehingga Didenda Rp 48 Miliar...” langsung menunjukkan tokoh utama dan inti masalah, yaitu denda terhadap Kades Kohod. Lead-nya memperjelas posisi Arsin sebagai pelaku pembangunan pagar laut ilegal di Tangerang. Latar informasi disusun dengan menjelaskan konteks pagar laut, awal keterlibatan Arsin, dan tindakan pemerintah.

Kutipan yang digunakan bersumber dari Kompas.com dan berasal dari pejabat pemerintah, warga, dan aparat penegak hukum, yang semuanya berbentuk kutipan tidak langsung. Tidak ditemukan pernyataan opini dari penulis berita. Penutup berita menyampaikan hasil akhir dari proses penyidikan, yaitu penahanan Arsin dan tiga tersangka lain. Struktur sintaksis ini mencerminkan gaya penulisan berita hard news yang faktual dan padat informasi.

## 2. Struktur Skrip

Analisis terhadap struktur ini menunjukkan bahwa unsur 5W + 1H di berita ini disampaikan dengan lengkap. Unsur *What* dijelaskan melalui pokok peristiwa yaitu denda dan status tersangka terhadap Arsin. *Where* disebutkan secara eksplisit yaitu di Desa Kohod dan perairan Kabupaten Tangerang. *When* merujuk pada waktu keterlibatan sejak 2021 dan puncaknya pada Februari 2025. *Who* mencakup Arsin, perangkat desa, KKP, Bareskrim, dan warga. *Why* dijelaskan dalam konteks pelanggaran hukum karena keterlibatan Arsin dalam pembangunan pagar ilegal dan pemalsuan dokumen. *How* dipaparkan melalui proses penyelidikan dan pembuktian yang dilakukan oleh KKP dan Bareskrim. Dengan demikian, unsur 5W + 1H telah lengkap dan mendukung pembentukan narasi yang utuh.

## 3. Struktur Tematik

Dari sisi tematik, artikel ini dibangun secara kronologis serta sistematis. Paragraf pertama hingga kedua berfungsi menyampaikan fakta utama, yaitu sanksi denda dan posisi Arsin dalam proyek. Paragraf ketiga dan keempat memperluas sudut pandang dengan menghadirkan suara warga dan pengacara yang mempertanyakan asal dana proyek. Paragraf kelima menyertakan sudut pandang penegak hukum, sedangkan paragraf terakhir menegaskan proses penahanan. Hubungan antar paragraf bersifat koheren dan saling mendukung untuk memperjelas kronologi kasus. Berdasarkan pola ini, artikel termasuk dalam *framing* tematik, karena membahas

peristiwa secara menyeluruh dengan latar belakang, konteks sosial, proses hukum, dan dampaknya terhadap masyarakat serta pelaku. Fokusnya tidak hanya pada kejadian sesaat, tetapi membangun pemahaman struktural atas permasalahan.

#### 4. Struktur Retoris

Dalam artikel ini, konstruksi makna tidak dibentuk semata-mata melalui teks, melainkan juga melalui elemen visual yang secara strategis digunakan untuk memperkuat narasi. Salah satu gambar yang disisipkan memperlihatkan sosok Kades Kohod, Arsin, saat sedang menjawab pertanyaan dari awak media di kediamannya. Visual ini memegang peran penting dalam membangun kesan autentik dan menghadirkan pelaku utama secara langsung kepada publik. Secara retoris, artikel ini disusun dengan gaya bahasa yang cenderung formal, faktual, dan tidak menggunakan idiom atau metafora. Gaya penulisan seperti ini mencerminkan pendekatan hard news yang bertujuan menyampaikan informasi secara objektif dan dapat diverifikasi. Dalam konteks peliputan kasus hukum atau dugaan pelanggaran, pilihan untuk tidak menggunakan bahasa yang bersifat kiasan juga merupakan bentuk kehati-hatian media agar tidak memunculkan bias atau prasangka terhadap subjek berita sebelum proses hukum berjalan. Namun demikian, kekuatan retoris artikel ini justru muncul dari cara media menggunakan elemen visual untuk membingkai persepsi terhadap tokoh yang diberitakan. Foto Arsin saat menjawab pertanyaan wartawan di rumahnya menyampaikan lebih dari sekadar dokumentasi; ia memunculkan kesan kedekatan, keterbukaan, sekaligus menempatkan tokoh ini dalam posisi yang bisa dibaca beragam antara sebagai warga yang menjelaskan posisinya, atau sebagai figur yang sedang dimintai pertanggungjawaban oleh publik. Setting foto di rumah juga memberi kesan bahwa wawancara berlangsung dalam ruang yang akrab dan tidak formal, yang bisa menimbulkan persepsi bahwa tokoh tersebut menghadapi tekanan atau sorotan dalam kapasitas personal, bukan hanya institusional. Dalam kerangka konstruksi media, penyertaan visual semacam ini memiliki efek

retoris tersendiri. Ia memberi "wajah" pada isu yang sedang diliput dan menciptakan kedekatan visual antara pembaca dan subjek pemberitaan. Ini penting, karena dalam isu yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh pejabat lokal, kehadiran tokoh dalam bentuk foto langsung bisa memperkuat kesan bahwa media menghadirkan sisi manusiawi dari pemberitaan, meski dalam narasi yang tetap menekankan aspek hukum. Tidak terdapat grafik, infografik, atau visualisasi data lainnya dalam artikel, yang menunjukkan bahwa fokus utama berita memang berada pada penguatan narasi verbal dan bukti visual yang bersifat personal. Dengan kata lain, artikel ini mengandalkan kombinasi antara gaya bahasa yang netral dan visualisasi tokoh utama untuk menyampaikan pesan utamanya: bahwa ada pihak yang sedang dimintai penjelasan secara publik atas situasi yang menjadi sorotan media dan masyarakat. Keseluruhan strategi retorik dan visual ini memperlihatkan bahwa media tidak hanya memberi informasi secara linier, tetapi juga menyusun elemen-elemen berita untuk membentuk representasi sosial tertentu terhadap tokoh dan isu yang diberitakan.

#### **4.2.10. Analisis Artikel Berita 10 Kompas.com**

Judul : Akhirnya, Sertifikat HGB dan SHM Area Pagar Laut Tangerang Dicabut Sumber : Kompas.com

Tanggal : 23 Februari 2025

Ringkasan : Menteri ATR/BPN Nusrin Wahid secara resmi mencabut ratusan sertifikat hak atas tanah (SHGB dan SHM) yang berada di area pagar laut Desa Kohod, Kab. Tangerang. Pencabutan dilaksanakan setelah ditemukan bahwa sertifikat-sertifikat tersebut berada di bawah laut dan melanggar garis pantai, sehingga dinilai cacat prosedur dan material. Sertifikat tersebut mayoritas diterbitkan pada 2022–2023. Pemerintah menilai penerbitan sertifikat ini tidak sah karena melanggar batas ruang laut yang seharusnya menjadi milik publik. Nusrin menegaskan bahwa proses ini dilakukan secara transparan melalui sistem BHUMI dan menyampaikan permintaan maaf atas kelalaian institusional.

Tabel 4.10. Analisis Artikel Berita 10 Kompas.com

Perangkat <i>Framing</i>	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Akhirnya, Sertifikat HGB dan SHM Area Pagar Laut Tangerang Dicabut
	Lead	Menteri ATR/BPN Nusron Wahid akhirnya membatalkan sertifikat tanah di kawasan pagar laut, Desa Kohod, Kab. Tangerang, Banten.
	Latar Informasi	Sengketa ruang laut di wilayah pesisir Kab. Tangerang mencuat setelah ditemukan pembangunan pagar laut ilegal yang diduga dibangun di atas lahan bersertifikat, padahal lokasinya berada di bawah laut dan melanggar batas garis pantai. Sertifikat-sertifikat ini berupa SHGB dan SHM yang mayoritas diterbitkan antara tahun 2022 hingga 2023. Keberadaan sertifikat tersebut menjadi polemik karena mengindikasikan pelanggaran administrasi pertanahan dan berpotensi merampas ruang laut publik. Kementerian ATR/BPN kemudian melakukan audit spasial dan menemukan ratusan sertifikat berada di luar batas pantai, sehingga dinyatakan cacat prosedur dan dicabut. Kasus ini menjadi bagian dari penertiban tata ruang laut yang melibatkan pengawasan lembaga dan kritik masyarakat luas.
	Kutipan	<p>Kutipan langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Secara faktual pada kondisi saat ini terdapat sertifikat yang berada di bawah laut. Setelah kami teliti dan cocokkan dengan data spasial, peta garis pantai, serta dokumen lainnya, ditemukan bahwa beberapa sertifikat berada di luar garis pantai," kata Nusron usai meninjau pencabutan pagar laut di Tanjung Pasir, Kab. Tangerang, Rabu (22/01/2025).</li> <li>2. "Karena sebagian besar sertifikat ini terbit pada tahun 2022–2023, maka syarat cukup untuk pembatalan terpenuhi," lanjutnya.</li> <li>3. "Oleh karena itu, ini tidak bisa disertifikasi, dan kami memandang sertifikat tersebut yang di luar (garis pantai) adalah cacat prosedur dan cacat material," ungkap Nusron</li> <li>4. "Hari ini kita sudah panggil kepada petugas itu oleh aparaturnya pengawas internal pemerintah terkait pemeriksaan kode etik," tegas Nusron.</li> <li>5. "Kami akan menuntaskan masalah ini seterang-terangnya, setransparan-transparannya, tidak ada yang kami tutupi. Karena memang fungsi dari aplikasi BHUMI adalah untuk transparansi, siapapun bisa mengakses, dan ini bukti kalau kita siap dikritik, dan siap dikoreksi oleh siapapun masyarakat, kalau memang ada kesalahan akan kita koreksi," tutupnya. (Nusron)</li> </ol>

Kutipan tidak langsung:

1. Nusron mengungkapkan, terdapat 280 sertifikat ditemukan di kawasan pagar laut yang berada di Desa Kohod.
2. Nusron juga menegaskan, dari hasil peninjauan dan pemeriksaan terhadap batas di luar garis pantai, tidak boleh ada area yang menjadi privat properti.
3. Dengan demikian, menurut Nusron, karena letaknya berada di luar garis pantai, SHGB dan SHM itu secara otomatis dicabut dan dibatalkan status hak atas tanahnya.
4. Untuk itu, Nusron meminta maaf dengan adanya permasalahan ini dan berkomitmen menyelesaikannya secara tuntas serta terang benerang.

Sumber Pernyataan Opini Penutup	Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, Tidak Ada Untuk itu, Nusron meminta maaf dengan adanya permasalahan ini dan berkomitmen menyelesaikannya secara tuntas serta terang benerang. "Kami akan menuntaskan masalah ini seterang-terangnya, setransparan-transparannya, tidak ada yang kami tutupi. Karena memang fungsi dari aplikasi BHUMI adalah untuk transparansi, siapapun bisa mengakses, dan ini bukti kalau kita siap dikritik, dan siap dikoreksi oleh siapapun masyarakat, kalau memang ada kesalahan akan kita koreksi," tutupnya.
Struktur Skrip	<p><i>What</i> <i>Where</i> <i>When</i></p> <p><i>Who</i> <i>Why</i></p> <p><i>How</i></p> <p>Pencabutan SHGB dan SHM oleh Menteri ATR/BPN. Area pagar laut, Desa Kohod, Kab. Tangerang Disampaikan pada 22 Januari 2025, diberitakan 23 Februari 2025.</p> <p>Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Karena sertifikat berada di luar garis pantai dan diterbitkan secara cacat prosedur dan material.</p> <p>Berdasarkan audit spasial, peta garis pantai, dan evaluasi dokumen yang dilakukan ATR/BPN serta pemanfaatan aplikasi BHUMI.</p>
Struktur Tematik	<p>Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat</p> <p>Paragraf 1-2 Berisi pengumuman resmi dari Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tentang pencabutan ratusan sertifikat SHGB dan SHM di kawasan pagar laut Desa Kohod. Disampaikan pula bahwa pencabutan ini dilakukan karena ditemukan bahwa sertifikat tersebut berada di bawah laut atau di luar garis pantai, yang secara hukum tidak dapat dimiliki sebagai properti pribadi.</p> <p>Paragraf 3-4 Menjelaskan metode dan dasar pencabutan, yakni menggunakan data spasial, peta garis pantai, serta dokumen pertanahan. Ditekankan bahwasanya sebagian besar sertifikat diterbitkan di tahun 2022–2023. Nusron menyebut bahwa syarat pembatalan terpenuhi karena terdapat cacat prosedur dan cacat material.</p> <p>Paragraf 5 Berisi pernyataan tegas bahwa pejabat internal BPN yang menerbitkan sertifikat tersebut akan diperiksa</p>

secara etik oleh aparaturngawas internal pemerintah (APIP).

Paragraf 6

Berisi komitmen pemerintah terhadap transparansi dan koreksi institusi melalui aplikasi BHUMI. Nusron menekankan keterbukaan akses masyarakat terhadap data pertanahan dan kesiapan pemerintah untuk dikritik jika terdapat kekeliruan.

Struktur Retoris

Kata, Idiom, Gambar, Grafik

Di artikel ini tidak terdapat Kata, Idiom, dan Grafik yang mendukung artikel. Pada gambar disisipkan gambar pagar laut tapi tidak mendukung pernyataan Nusron.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Secara sintaksis, berita ini disusun dengan alur yang runtut dan informatif, dimulai dari judul yang mengandung nilai berita dan kepastian tindakan negara. Judulnya, “Akhirnya, Sertifikat HGB dan SHM Area Pagar Laut Tangerang Dicabut,” menekankan hasil akhir dari polemik sertifikasi ilegal di wilayah laut. Lead langsung menjelaskan siapa tokoh utama (Menteri ATR/BPN Nusron Wahid) dan apa yang dilakukan (pembatalan sertifikat). Latar informasi memperjelas konteks terbitnya sertifikat secara ilegal di kawasan bawah laut serta proses audit spasial dan penertiban oleh pemerintah. Dalam tubuh berita, digunakan banyak kutipan langsung dari Nusron Wahid, yang memperkuat kredibilitas informasi. Terdapat pula kutipan tidak langsung yang menjelaskan tindakan teknis ATR/BPN dalam mencabut 280 sertifikat. Penutup berita diisi dengan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan koreksi sistem pertanahan. Tidak terdapat opini dari jurnalis, karena keseluruhan isi berita didasarkan pada pernyataan narasumber resmi.

### 2. Struktur Skrip

Struktur ini di berita ini sangat lengkap dan memenuhi seluruh unsur 5W + 1H. Unsur *What* disampaikan secara tegas, yaitu pencabutan sertifikat SHGB dan SHM yang ada di bawah laut. *Where* merujuk pada area pagar laut Desa Kohod, Kabupaten Tangerang. *When* disebutkan jelas yaitu saat peninjauan pada 22 Januari 2025 dan pemberitaan pada 23 Februari 2025.

*Who* mengacu pada tokoh utama, yakni Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. *Why* dijelaskan dengan detail, yaitu karena lokasi sertifikat berada di luar garis pantai dan dinyatakan cacat prosedur serta material. *How* dijabarkan melalui proses audit data spasial, verifikasi dokumen pertanahan, dan pemanfaatan sistem digital BHUMI. Kelengkapan unsur ini menunjukkan bahwa berita ditulis dengan pendekatan laporan investigatif dan administratif yang informatif.

### 3. Struktur Tematik

Struktur ini di berita ini disusun secara sistematis dan menyeluruh. Paragraf 1 dan 2 menjelaskan keputusan resmi dari pemerintah mengenai pencabutan sertifikat dan dasar hukumnya. Paragraf 3 dan 4 mendalami alasan teknis pencabutan, yaitu penggunaan data spasial dan kesalahan penerbitan di luar garis pantai. Paragraf 5 mengangkat dimensi internal birokrasi, dengan menyebut adanya pemeriksaan etik terhadap pejabat BPN. Paragraf 6 menutup dengan komitmen transparansi dan koreksi sistem melalui aplikasi BHUMI. Hubungan antar paragraf bersifat kausal dan informatif, membentuk narasi yang terstruktur. Berdasarkan penyusunan dan gaya penyampaian, berita ini termasuk ke dalam *framing* tematik. Alasannya karena artikel tidak hanya melaporkan satu kejadian, melainkan menjelaskan latar belakang, proses teknis, penindakan hukum, dan sikap pemerintah secara menyeluruh.

### 4. Struktur Retoris

Dalam artikel ini, pendekatan yang digunakan media sangat bergantung pada kekuatan pernyataan resmi, tanpa banyak memainkan unsur retorik ataupun visual secara signifikan. Gaya bahasa yang digunakan cenderung birokratis, datar, dan sangat formal, menandakan bahwa media menempatkan dirinya sebagai penyampai informasi institusional tanpa mencoba menambah muatan emosional atau interpretatif. Ketiadaan idiom, metafora, atau bahasa kiasan mencerminkan pendekatan jurnalistik yang bertumpu pada obyektivitas teks, bukan pada dramatisasi. Dalam kerangka

kualitatif, ini dapat dibaca sebagai bentuk sikap redaksi yang memilih untuk menjaga jarak dari narasi emosional dan lebih menekankan posisi media sebagai kanal penyebaran pernyataan resmi. Hal ini juga memperlihatkan bagaimana media membingkai berita tidak untuk membentuk opini, tetapi untuk menunjukkan keberpihakan pada prosedur hukum dan tata kelola negara. Kekuatan utama artikel ini justru terletak pada kutipan langsung dari tokoh otoritatif dalam hal ini, Nusron Wahid, yang dikemukakan secara eksplisit. Kutipan ini menjadi elemen utama yang membangun otoritas narasi, menggantikan peran metafora atau ilustrasi emosional dalam menyampaikan makna. Dengan menjadikan pernyataan pejabat sebagai pusat narasi, media secara tidak langsung mengafirmasi posisi resmi negara dan menempatkan wacana hukum sebagai acuan utama dalam pembingkai berita. Namun, dari sisi visual, terdapat ketimpangan yang cukup mencolok. Gambar yang disisipkan dalam artikel memperlihatkan pagar laut, namun tidak secara langsung berkaitan atau memperkuat konteks dari pernyataan Nusron. Hal ini menunjukkan bahwa gambar digunakan lebih sebagai pelengkap visual daripada sebagai bagian dari strategi retorik yang koheren. Dalam penelitian kualitatif, hal ini bisa ditafsirkan sebagai bentuk “disengaged framing,” di mana elemen visual tidak secara aktif berkontribusi pada konstruksi makna utama dalam teks. Ketiadaan grafik atau infografik juga mempertegas bahwa jenis berita ini tidak menekankan pada aspek visualisasi data. Namun, hal tersebut tidak serta-merta melemahkan kekuatan informasi karena struktur narasi bergantung pada kekuatan isi kutipan dan penyampaian teknis yang jelas. Media memilih untuk menyampaikan legitimasi informasi melalui suara pejabat, bukan melalui bantuan elemen grafis atau retorik visual. Dengan demikian, artikel ini merupakan contoh *framing* berita yang mengandalkan kekuatan institusional dari narasumber utama, tanpa mencoba menggiring opini pembaca melalui pendekatan visual atau gaya bahasa emosional. Gaya penyampaian yang netral, kering, dan minim ilustrasi retorik ini justru menegaskan bahwa media ingin mempertahankan citra sebagai penyampai

pesan formal negara, bukan sebagai aktor yang membentuk interpretasi publik.

#### 4.2.11. Analisis Artikel Berita 11 Beritabanten.com

Judul : Pagar Laut Misterius Sepanjang 30 Kilometer di Tangerang Diketahui Tidak Memiliki Izin

Sumber : Beritabanten.com

Tanggal : 8 Januari 2025

Ringkasan : Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km ditemukan membentang di enam kecamatan pesisir di Kab. Tangerang, Banten. Struktur ini diketahui tidak mempunyai izin resmi, baik dari pemerintah daerah ataupun pusat. Kepala DKP Provinsi Banten, Eli Susiyanti, menyatakan bahwasanya awalnya pagar hanya terdeteksi sepanjang 7 km, namun berkembang menjadi 30 km. Pagar ini melintasi berbagai zona penting yang telah diatur dalam Perda Provinsi Banten No. 1 Tahun 2023. Hingga sekarang ini, belum diketahui siapa pihak yang membangunnya. Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP, Suharyanto, juga menyatakan keprihatinan dan menegaskan bahwasanya reklamasi harus memiliki izin dan studi ekologi yang ketat, yang belum ditemukan dalam kasus ini.

Tabel 4.11. Analisis Artikel Berita 11 Beritabanten.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Pagar Laut Misterius Sepanjang 30 Kilometer di Tangerang Diketahui Tidak Memiliki Izin
	Lead	Pagar laut misterius yang terbuat dari bambu atau cerucuk ditemukan membentang sepanjang 30,16 km di enam kecamatan pesisir di Kab. Tangerang, Banten.
	Latar Informasi	Kemunculan pagar laut misterius di kawasan pesisir Tangerang pertama kali terdeteksi pada akhir 2024 dan menjadi perhatian publik karena tidak diketahui siapa pembuatnya. Pagar tersebut membentang di area yang masuk dalam wilayah tata ruang laut strategis dan melintasi zona penting, seperti wilayah tangkap nelayan dan kawasan konservasi. Sesuai Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten, wilayah tersebut seharusnya tunduk pada aturan pemanfaatan ruang laut. Fakta bahwa tidak ada satu pun lembaga resmi, baik pusat maupun

daerah, yang mengeluarkan izin, memperkuat dugaan bahwa pagar ini dibangun secara ilegal dan berpotensi melanggar hukum kelautan serta merugikan masyarakat pesisir.

Kutipan

Kutipan langsung: -

Kutipan tidak langsung:

1. Kepala DKP Provinsi Banten, Eli Susiyanti menyatakan bahwa meskipun keberadaan pagar ini jelas terlihat, baik pemerintah daerah maupun pusat belum mengetahui siapa pihak yang membangunnya secara ilegal.
2. Eli menjelaskan bahwa pagar ini membentang di enam kecamatan, yaitu Kec. Kronjo (3 desa), Kec. Kemiri (3 desa), Kec. Mauk (4 desa), Kec. Sukadiri (1 desa), Kec. Pakuhaji (3 desa) serta Kec. Teluknaga (2 desa).
3. Pada diskusi yang digelar di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Selasa (7/1/2025), Eli menjabarkan bahwa tim dari DKP telah diterjunkan untuk mengecek keberadaan pagar ini yang semula terdeteksi sepanjang 7 kilometer, namun kemudian berkembang menjadi 30 kilometer.
4. Eli menambahkan bahwa pagar tersebut melintas di beberapa zona penting berdasarkan Perda Provinsi Banten No. 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten.
5. Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP, Suharyanto turut mengungkapkan keprihatinannya terkait hal ini.
6. Namun, ia juga mengonfirmasi bahwa pihak KKP belum mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar tersebut. (Suharyanto)
7. Terkait kemungkinan adanya hubungan dengan reklamasi, Suharyanto menegaskan bahwa reklamasi membutuhkan izin resmi dan pengajuan proposal yang belum ditemukan dalam kasus ini.

Ia juga menekankan pentingnya pemenuhan persyaratan ekologi yang ketat dalam proses perizinan ruang laut. (Suharyanto)

Sumber

Kepala DKP Provinsi Banten, Eli Susiyanti  
Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP,  
Suharyanto  
Polisi Khusus PSDKP  
TNI Angkatan Laut  
Polairud

Pernyataan Opini  
Penutup

Tidak Ada  
Terkait kemungkinan adanya hubungan dengan reklamasi, Suharyanto menegaskan bahwa reklamasi membutuhkan izin resmi dan pengajuan

Struktur Skrip	<i>What</i>	proposal yang belum ditemukan di kasus ini. Ia juga menekankan pentingnya pemenuhan persyaratan ekologi yang ketat dalam proses perizinan ruang laut.
	<i>Where</i>	Keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km yang tidak mempunyai izin resmi. Di enam kecamatan pesisir Kab. Tangerang, Banten (Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Pakuhaji, Teluknaga).
	<i>When</i>	Ditemukan dan diberitakan pada awal Januari 2025, dengan proses deteksi sejak akhir 2024.
	<i>Who</i>	Dikonfirmasikan oleh Kepala <a href="#">DKP</a> Provinsi Banten, Eli Susiyanti dan Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP, Suharyanto .
	<i>Why</i>	Pembangunan pagar ini belum mendapatkan izin dan kemungkinan melanggar tata ruang laut serta aturan reklamasi.
	<i>How</i>	Tim dari DKP diturunkan ke lapangan untuk memeriksa secara keseluruhan, serta diskusi bersama kementerian.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	Paragraf 1-2 Berisi pengantar mengenai keberadaan pagar laut misterius yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir Kab. Tangerang. Paragraf ini menekankan sifat "misterius" pagar dan fakta bahwa pemerintah belum mengetahui siapa yang membangunnya.
		Paragraf 3 Menjelaskan secara rinci lokasi-lokasi pagar tersebut, yaitu tersebar di enam kecamatan pesisir (Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Pakuhaji, Teluknaga) dan sejumlah desa di tiap kecamatan.
		Paragraf 4 Memaparkan kronologi temuan awal pagar laut oleh tim DKP Banten, dari yang semula hanya 7 km menjadi 30 km. Informasi ini menunjukkan bahwa pagar ini berkembang pesat dan tidak terkendali dalam waktu singkat.
		Paragraf 5 Menghubungkan temuan pagar dengan zonasi ruang laut berdasarkan Perda Provinsi Banten No. 1 Tahun 2023. Disebutkan bahwa pagar ini melewati beberapa zona penting, seperti zona konservasi atau perikanan.
		Paragraf 6-7 Berisi reaksi dan keprihatinan dari pejabat KKP, Suharyanto, yang menyatakan bahwa belum ada izin reklamasi atau proposal resmi yang diajukan terkait pembangunan pagar laut. Ia juga menekankan pentingnya syarat ekologi dalam perizinan ruang laut.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Dalam aspek retoris, berita ini ditulis dengan gaya bahasa formal dan netral, tanpa penggunaan idiom

atau metafora. Penulis tidak menggunakan gaya persuasi atau ungkapan emosional. Tidak ada gambar atau grafik pendukung dalam artikel, sehingga penekanan sepenuhnya pada isi narasi dan kutipan narasumber. Ketiadaan unsur retorik memperkuat kesan objektivitas dan menjadikan berita ini sebagai bentuk laporan informasi awal berbasis data lapangan dan kebijakan.

---

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Struktur ini di berita ini tersusun secara runtut dan informatif. Judulnya langsung menyampaikan fakta utama, yaitu adanya pagar laut misterius sepanjang 30 km di Tangerang yang tidak mempunyai izin. Lead memperkenalkan bentuk pagar yang terbuat dari bambu dan membentang di enam kecamatan pesisir. Latar informasi menggambarkan bagaimana pagar tersebut pertama kali ditemukan, posisinya yang berada di wilayah strategis kelautan, serta tidak adanya izin resmi dari pemerintah pusat maupun daerah. Kutipan yang digunakan bersifat tidak langsung, dikutip dari pernyataan Kepala DKP Banten dan Direktur Ruang Laut KKP. Penutup berita memuat penegasan bahwa reklamasi laut memerlukan izin resmi dan studi ekologi, yang belum ditemukan dalam kasus ini. Berita disusun dengan gaya pelaporan yang netral dan tidak memuat opini jurnalis, memperkuat kesan objektivitas.

### 2. Struktur Skrip

Unsur 5W + 1H di berita ini disampaikan secara lengkap dan jelas. *What* dijelaskan melalui keberadaan pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer. *Where* dijabarkan secara spesifik di enam kecamatan pesisir Kabupaten Tangerang. *When* disampaikan dengan menyebut penemuan terjadi sejak akhir 2024 dan diberitakan pada 8 Januari 2025. *Who* diwakili oleh instansi pemerintah seperti DKP Provinsi Banten dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang menanggapi kasus ini. *Why* dikemukakan melalui ketidakterpenuhannya izin resmi dan potensi pelanggaran tata ruang laut. *How* dijelaskan lewat investigasi lapangan oleh tim DKP dan diskusi di

kementerian. Kelengkapan unsur-unsur ini menunjukkan bahwa berita telah memenuhi standar laporan awal yang akurat dan informatif.

### 3. Struktur Tematik

Struktur ini dalam berita ini dibangun secara progresif serta terstruktur. Paragraf 1–2 mengantar pembaca kepada keberadaan pagar laut yang misterius dan belum diketahui pembuatnya. Paragraf 3 memperluas informasi dengan menyebut wilayah administratif yang terdampak. Paragraf 4 menjelaskan kronologi perkembangan panjang pagar dari 7 km menjadi 30 km. Paragraf 5 memberikan dasar hukum dan peraturan tata ruang laut yang dilanggar. Paragraf 6–7 menampilkan respons pemerintah pusat yang menyoroti pentingnya izin dan studi ekologi untuk proyek reklamasi. Hubungan antar paragraf bersifat koheren, dengan tiap paragraf memperluas atau memperdalam informasi dari paragraf sebelumnya. Oleh karena itu, berita ini dikategorikan sebagai *framing* tematik, karena menyajikan konteks luas, latar belakang peristiwa, serta pandangan kelembagaan, bukan sekadar melaporkan peristiwa sesaat seperti dalam *framing* episodik.

### 4. Struktur Retoris

Pada pemberitaan ini, struktur ini yang dipergunakan sangat menekankan pada prinsip kehati-hatian dan objektivitas. Gaya penulisan bersifat birokratis, cenderung kering dari gaya persuasif atau retoris yang bersifat emosional. Ini ditunjukkan dari pilihan kata yang netral serta struktur narasi yang tidak menggunakan idiom, metafora, atau ungkapan kiasan yang dapat memicu interpretasi simbolik. Narasi disampaikan secara langsung, faktual, dan berlandaskan pada kutipan resmi dari institusi terkait, yang dalam penelitian kualitatif dapat dibaca sebagai bentuk legitimasi struktural atas isi berita. Ketiadaan unsur visual seperti gambar atau grafik memperlihatkan bahwa media memilih untuk tidak membingkai isu melalui impresi visual, melainkan sepenuhnya mengandalkan struktur naratif sebagai alat utama penyampai makna. Dalam konteks ini, pemberitaan lebih merepresentasikan posisi media sebagai penyampai informasi awal atau

"laporan resmi" yang masih berada dalam tahap pengumpulan fakta awal di lapangan. Tidak adanya elemen retorik atau visual tidak melemahkan isi berita, melainkan memperlihatkan sikap kehati-hatian redaksional dalam mengangkat kasus yang masih berkembang dan sensitif secara politis maupun hukum. Penekanan utama dalam berita ini terletak pada penggunaan kutipan dari pejabat atau instansi resmi. Kutipan-kutipan ini tidak hanya berfungsi menjadi sumber informasi, juga membentuk kerangka otoritas yang mewarnai seluruh isi narasi. Dengan begitu, strategi retorik yang digunakan adalah membangun kredibilitas melalui representasi institusional, bukan melalui narasi dramatik atau visualisasi lapangan. Secara keseluruhan, pendekatan retorik yang minim ornamen ini memperlihatkan peran media sebagai aktor yang memediasi antara negara dan publik dengan sikap formal dan hati-hati. Dalam perspektif kualitatif, ini mencerminkan konstruksi wacana yang menempatkan berita sebagai bentuk dokumentasi administratif awal, yang membuka ruang bagi pembaruan informasi lanjutan, tanpa menarik opini publik secara emosional atau subjektif terlebih dahulu.

#### **4.2.12. Analisis Artikel Berita 12 Beritabanten.com**

Judul : KKP Segel dan Ancam Bongkar Paksa Pagar Laut Sejauh 30,16 Km di Perairan Tangerang  
Sumber : Beritabanten.com  
Tanggal : 12 Januari 2025  
Ringkasan : KKP secara resmi menghentikan kegiatan pemagaran laut sepanjang 30,16 km di perairan Kab. Tangerang, Banten. Tindakan ini diambil sebab pagar tersebut dibangun tanpa izin KKPRL serta ada di Zona Perikanan Tangkap serta Zona Pengelolaan Energi, yang seharusnya tidak boleh dikonstruksi secara sembarangan. Dirjen PSDKP, Pung Nugroho Saksono, menyatakan bahwasanya KKP telah menyegel lokasi dan memberi tenggat waktu 10–20 hari sebelum pembongkaran paksa

dilakukan. Hasil analisis *drone* dan peta digital (*e-seamap* dan *arcgis*) menunjukkan bahwa pagar berdiri sekitar 700 m dari garis pantai dan dibangun di wilayah yang tidak memiliki izin legal. KKP juga menyebut telah menerima aduan dari nelayan yang terdampak dan menegaskan sikap tegas dalam penegakan hukum kelautan.

Tabel 4.12. Analisis Artikel Berita 12 Beritabanten.com

<b>Perangkat Framing</b>	<b>Unit Pengamatan</b>	<b>Hasil Pengamatan</b>
Struktur Sintaksis	Judul	KKP Segel dan Ancam Bongkar Paksa Pagar Laut Sejauh 30,16 Km di Perairan Tangerang KKP menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin di Tangerang, Banten yang sebelumnya viral di media sosial. Kegiatan pemagaran dihentikan lantaran diduga tidak memiliki izin dasar KKPRL serta berada di dalam Zona Perikanan Tangkap dan Zona Pengelolaan Energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir.
	Lead	
	Latar Informasi	Keberadaan pagar laut ilegal di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang menjadi perhatian nasional sejak akhir 2024. Pagar yang membentang sepanjang lebih dari 30 kilometer ini dibangun tanpa izin resmi dan terletak di wilayah yang termasuk dalam Zona Perikanan Tangkap dan Zona Pengelolaan Energi. Wilayah tersebut merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan ruang laut yang diatur pada Perda Provinsi Banten No. 2 Tahun 2023. Berdasarkan laporan warga dan nelayan yang aktivitasnya terganggu, KKP menindaklanjuti dengan melakukan penyegelan lokasi dan mengancam akan melakukan pembongkaran paksa. Investigasi juga dilakukan oleh tim gabungan dari Ditjen PSDKP dan DKP Banten, termasuk melalui pemantauan udara dengan <i>drone</i> dan analisis peta laut ( <i>e-seamap</i> ), yang menunjukkan tidak adanya izin KKPRL di area tersebut. Kasus ini menjadi salah satu contoh pelanggaran tata ruang laut yang merugikan ekosistem dan masyarakat pesisir.
	Kutipan	<p>Kutipan langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Saat ini kita hentikan kegiatan pemagaran sambil terus dalam siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kegiatan ini,” tegas Pung.</li> <li>2. “Awal kami beri peringatan, penyegelan, sampai 10 sampai 20 hari tidak dibongkar juga, KKP yang akan bongkar paksa,” jelas Pung Nugroho.</li> <li>3. “Tim juga melakukan analisis foto <i>drone</i> dan <i>arcgis</i>, diketahui kondisi</li> </ol>

dasar perairan merupakan area rubble dan pasir dengan jarak lokasi pemagaran dari perairan pesisir berdasarkan garis pantai sejauh kurang lebih 700 m. Berdasarkan e-seamap, kegiatan pemagaran tersebut tidak memiliki Persetujuan KKPRL,” tandas Sumono.

Kutipan tidak langsung:

1. Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono yang terjun langsung dalam aksi penghentian ini pada Kamis (9/1/2024) menyatakan bahwa langkah ini merupakan sikap tegas KKP dalam merespon aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut.
2. Pung menjelaskan bahwa sebelumnya, tim gabungan Polisi Khusus (Polsus) Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September 2024.
3. Melengkapi pernyataan Pung, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto menjelaskan bahwa lokasi pemagaran berada dalam Zona Perikanan Tangkap dan Zona Pengelolaan Energi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang DKP Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2023.

Sumber Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono  
 Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono  
 Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto

Pernyataan Opini Tidak Ada  
 Penutup “Tim juga melakukan analisis foto *drone* dan arcgis, diketahui kondisi dasar perairan merupakan area rubble dan pasir dengan jarak lokasi pemagaran dari perairan pesisir berdasarkan garis pantai sejauh kurang lebih 700 meter. Berdasarkan e-seamap, kegiatan pemagaran tersebut tidak memiliki Persetujuan KKPRL,” tandas Sumono.

Struktur Skrip *What* Penyevelan dan ancaman pembongkaran pagar laut oleh KKP.  
*Where* Perairan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, sejauh 700 meter dari garis pantai.  
*When* Dihentikan secara langsung oleh Dirjen PSDKP pada 9 Januari 2024, diberitakan 12 Januari 2025.  
*Who* Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono

		Dirjen PSDKP, Pung Nugroho Saksono Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto
	<i>Why</i>	Karena kegiatan pemagaran berada di zona terlarang dan tidak memiliki izin KKPRL.
	<i>How</i>	Melalui investigasi, analisis <i>drone</i> dan sistem pemetaan (arcgis dan e-seamap), serta penegakan hukum berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2023.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	Paragraf 1-2 Menginformasikan bahwa KKP menghentikan kegiatan pemagaran laut ilegal di perairan Tangerang yang sempat viral di media sosial. Dijelaskan bahwa pagar tersebut tidak memiliki izin KKPRL dan terletak di zona yang dilindungi, sehingga berpotensi merugikan nelayan dan merusak ekosistem.
		Paragraf 3 Berisi kutipan tegas dari Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono yang menegaskan bahwa jika pagar tidak dibongkar dalam waktu 10–20 hari, KKP akan membongkar paksa.
		Paragraf 4 Menjelaskan riwayat investigasi awal oleh tim gabungan dari Polsus Kelautan dan DKP Banten sejak September 2024, termasuk kunjungan ke desa-desa sekitar lokasi pagar.
		Paragraf 5 Keterangan dari Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto, bahwa lokasi pagar berada di dalam zona ruang laut yang telah diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2023.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Paragraf 6-7 Berisi temuan teknis berdasarkan analisis <i>drone</i> dan sistem <i>e-seamap</i> , yang menunjukkan bahwa pagar dibangun sejauh ±700-meter dari garis pantai dan berada di wilayah tanpa izin KKPRL. Dalam artikel penulis menyisipkan gambar KKP turun tangan segel lokasi pemagaran laut di Perairan Tangerang. Hal ini dapat memperkuat pemberitaan karena adanya visual yang nyata dalam operasi penyegelan.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Struktur ini di berita ini dibentuk secara informatif, lugas, dan mencerminkan sikap tegas pemerintah. Judul secara eksplisit menyatakan tindakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu penyegelan dan ancaman pembongkaran paksa pagar laut di perairan Tangerang. Lead

langsung menjelaskan alasan tindakan tersebut, yaitu karena pagar dibangun tanpa izin KKPRL dan terletak di zona penting yang berdampak pada nelayan dan ekosistem. Latar informasi menjelaskan konteks munculnya pagar laut ilegal sejak 2024, hasil investigasi di lapangan, serta penggunaan teknologi pemetaan sebagai bukti. Kutipan yang digunakan berasal dari pejabat resmi KKP, yaitu Pung Nugroho Saksono dan Sumono Darwinto, dalam bentuk kutipan langsung dan tidak langsung. Penutup berita memperkuat legitimasi tindakan KKP dengan menyebut analisis *drone* dan peta laut (*e-seamap*) yang membuktikan lokasi pagar tidak sesuai izin. Berita ini bersifat netral, faktual, dan tidak memuat opini dari jurnalis.

## 2. Struktur Skrip

Struktur ini di berita ini sangat lengkap serta menjawab semua unsur 5W + 1H. *What* dijelaskan sebagai tindakan penyegelan dan ancaman pembongkaran pagar laut. *Where* disebut secara spesifik, yaitu di perairan pesisir Kabupaten Tangerang dengan jarak sekitar 700 m dari garis pantai. *When* diuraikan dengan merujuk pada aksi langsung yang dilakukan pada 9 Januari 2024 dan dipublikasikan pada 12 Januari 2025. *Who* mencakup pejabat-pejabat kunci dari KKP seperti Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono, dan Direktur Pengawasan Sumono Darwinto. *Why* disampaikan karena pemagaran dilakukan tanpa izin KKPRL dan berada di zona laut yang dilindungi. *How* dijelaskan melalui investigasi lapangan, analisis *drone*, pemetaan digital, serta acuan pada Perda No. 2 Tahun 2023. Pemaparan ini menunjukkan bahwa berita dikemas secara komprehensif dan transparan.

## 3. Struktur Tematik

Struktur ini di berita ini disusun secara progresif serta mendalam. Paragraf pertama dan kedua memaparkan tindakan awal KKP serta alasan hukum dan ekologis di balik penghentian pemagaran. Paragraf ketiga memperkuat sikap KKP dengan pernyataan tegas dari Dirjen PSDKP tentang batas waktu dan konsekuensi. Paragraf keempat menyajikan riwayat penyelidikan oleh

tim Polsus Kelautan dan DKP Banten sejak September 2024, yang menunjukkan bahwa isu ini telah lama dipantau. Paragraf kelima menghadirkan landasan regulasi yang dilanggar berdasarkan Perda Tata Ruang Laut. Paragraf keenam dan ketujuh menyampaikan bukti teknis berupa hasil analisis *drone* dan e-seamap, yang memperkuat kesimpulan bahwa lokasi pembangunan pagar tidak sesuai dengan izin yang dipersyaratkan. Hubungan antarparagraf bersifat kohesif dan memperluas konteks pemahaman publik. Oleh karena itu, artikel ini termasuk *framing* tematik karena menguraikan latar belakang, dampak, proses hukum, investigasi teknis, serta reaksi institusional secara menyeluruh—bukan hanya laporan insidental.

#### 4. Struktur Retoris

Berita ini menampilkan retorika yang terstruktur secara formal, dengan karakteristik narasi yang dominan pada pelaporan institusional. Bahasa yang digunakan bersifat deskriptif, informatif, dan menghindari gaya emosional. Hal ini terlihat dari tidak ditemukannya idiom, metafora, atau bentuk bahasa kiasan lain yang biasanya digunakan untuk membangun resonansi afektif dengan pembaca. Dalam konteks ini, gaya bahasa yang dipilih memperkuat posisi berita sebagai bentuk dokumentasi resmi atas kejadian lapangan, bukan sebagai opini atau interpretasi. Meskipun minim unsur bahasa figuratif, kekuatan retorika artikel ini justru diperkuat melalui penggunaan visual yang berfungsi sebagai bukti otentik atas tindakan negara. Gambar petugas KKP yang menyegel lokasi menjadi instrumen visual yang menyampaikan kredibilitas dan keabsahan tindakan hukum. Dalam penelitian kualitatif, visual ini dapat dipahami sebagai bentuk pembingkai realitas (*visual framing*) yang memberikan konfirmasi konkret terhadap isi naratif. Artikel ini juga mengedepankan otoritas melalui kutipan langsung dari pejabat yang memiliki legitimasi atas tindakan tersebut. Tidak hanya itu, penggunaan istilah teknis seperti “*drone*” dan “pemetaan” menunjukkan bahwa retorika dalam berita ini tidak diarahkan pada persuasi emosional, tetapi pada pendekatan rasional

berbasis teknologi dan data. Dengan kata lain, strategi retorik yang dibangun bertumpu pada kepercayaan terhadap sistem, birokrasi, dan instrumen ilmiah negara. Ketiadaan grafik atau infografik dalam berita ini tidak melemahkan daya informasinya. Sebaliknya, dalam perspektif kualitatif, fokus media diarahkan pada narasi resmi dan visualisasi langsung dari tindakan di lapangan. Ini menunjukkan bahwa kredibilitas dibangun bukan melalui pengolahan data secara visual, tetapi melalui performativitas negara yang ditampilkan melalui tindakan konkret—yang kemudian direpresentasikan dalam bentuk gambar. Secara keseluruhan, pemberitaan ini menunjukkan konstruksi makna yang mengedepankan legalitas, otoritas, dan ketertiban. Fungsi retoriknya tidak diarahkan untuk menggugah emosi publik, melainkan untuk mengafirmasi peran negara dalam menegakkan hukum berdasarkan data, prosedur, dan legitimasi kelembagaan. Ini mengindikasikan bahwa media berperan sebagai penyambung suara resmi negara dengan bingkai yang netral dan berjarak secara emosional dari pembaca.

#### **4.2.13. Analisis Artikel Berita 13 Beritabanten.com**

Judul : Presiden Prabowo Perintahkan Pembongkaran Pagar Laut 30 Kilometer di Tangerang

Sumber : Beritabanten.com

Tanggal : 20 Januari 2025

Ringkasan : Presiden Prabowo Subianto secara resmi memerintahkan pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km yang dibangun di perairan Kab. Tangerang. Instruksi tersebut disampaikan melalui Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan langsung ditindaklanjuti oleh TNI AL yang bekerja bersama nelayan setempat sejak Sabtu, 18 Januari 2025. Pagar bambu yang dipasang sejak Juli 2024 diketahui sulit dibongkar karena telah tertancap cukup dalam dan bertahan berbulan-bulan di laut. Dalam hari pertama pembongkaran, baru sekitar 2 kilometer pagar berhasil dicabut. Proses ini ditargetkan selesai dalam 10 hari ke depan. Komandan TNI AL yang

memimpin operasi mengungkapkan tantangan teknis di lapangan dan menegaskan bahwa perintah berasal langsung dari Presiden.

Tabel 4.13. Analisis Artikel Berita 13 Beritabanten.com

<b>Perangkat Framing</b>	<b>Unit Pengamatan</b>	<b>Hasil Pengamatan</b>
Struktur Sintaksis	Judul	Presiden Prabowo Perintahkan Pembongkaran Pagar Laut 30 Kilometer di Tangerang
	Lead	Presiden Prabowo Subianto telah memberi perintah untuk membongkar pagar laut sepanjang 30 km di laut Tangerang. Pekerjaan pembongkaran pagar laut ini dilakukan oleh gabungan anggota TNI AL dan nelayan pada Sabtu, 18 Januari 2025.
	Latar Informasi	Pagar laut sepanjang 30 km yang dibangun secara 117actual di pesisir Kab. Tangerang sejak pertengahan 2024 menuai kritik dari masyarakat dan menimbulkan gangguan pada aktivitas nelayan. Pagar ini diduga tidak memiliki izin pemanfaatan ruang laut dan melanggar batas tata ruang pesisir. Merespons berbagai laporan dan investigasi instansi terkait seperti KKP dan ATR/BPN, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memerintahkan agar pagar dibongkar. Instruksi tersebut disampaikan melalui Kepala Staf Angkatan Laut dan dilaksanakan oleh TNI AL dengan dukungan nelayan. Pembongkaran dimulai pada 18 Januari 2025 dan menghadapi kendala teknis karena struktur bambu yang kuat dan telah lama tertanam di dasar laut. Kasus ini mencerminkan tindakan tegas negara dalam menertibkan ruang laut dari praktik-praktik 117actual.
	Kutipan	<p>Kutipan langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Perintah secara langsung Presiden melalui Kepala Staf Angkatan Laut yang utama,” kata dia, (Harry)</li> <li>2. “Kesulitan kita, lebih mudah menanam daripada mencabut. Apalagi yang ditanam ini sudah jangka waktu sampai berbulan-bulan, itu akan lebih menyulitkan kita untuk pencabutan,” kata dia (Harry)</li> </ol> <p>Kutipan tidak langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembongkaran pagar laut ini ditargetkan selesai dalam waktu 10 hari, namun pada hari pertama, baru 2-kilometer pagar bambu yang berhasil dibongkar. Harry menjelaskan bahwa pembongkaran pagar laut bukanlah hal yang mudah karena bambu-bambu tersebut sudah tertancap 1,5 hingga 2 m selama berbulan-bulan.</li> <li>2. Pagar bambu setinggi 6 m tersebut dipasang pada Juli 2024, dan pencabutannya dinilai lebih sulit daripada pemasangannya.</li> </ol>
	Sumber	Presiden Prabowo Subianto

	Pernyataan Opini	Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III Jakarta, Brigadir Jenderal (Mar) Harry Indarto
	Penutup	Tidak Ada
Struktur Skrip	<i>What</i>	“Kesulitan kita, lebih mudah menanam daripada mencabut. Apalagi yang ditanam ini sudah jangka waktu sampai berbulan-bulan, itu akan lebih menyulitkan kita untuk pencabutan,” kata dia.
	<i>Where</i>	Pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km yang diperintahkan Presiden.
	<i>When</i>	Di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
	<i>Who</i>	Perintah dikeluarkan sebelum 18 Januari 2025, dan pembongkaran dimulai pada hari Sabtu, 18 Januari 2025. Diberitakan pada 20 Januari 2025
	<i>Why</i>	1. Presiden Prabowo Subianto 2. Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III Jakarta, Brigadir Jenderal (Mar) Harry Indarto 3. Sebanyak 600 anggota TNI AL yang tergabung dalam tiga pasukan khusus, yaitu Komando Pasukan Katak (Kopaska), Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair), dikerahkan untuk tugas ini.
Struktur Tematik	<i>How</i>	Karena pagar laut diduga 118actual, mengganggu aktivitas nelayan, dan melanggar ketentuan pemanfaatan ruang laut.
	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	Dengan pengerahan gabungan personel TNI AL dan warga nelayan; proses teknis mencabut bambu yang telah tertancap sedalam 1,5–2 meter. Paragraf 1–2: Menyampaikan perintah langsung dari Presiden melalui KSAL kepada TNI AL untuk membongkar pagar laut. Paragraf 3: Menginformasikan bahwa pembongkaran dimulai pada 18 Januari 2025 dan menampilkan hasil hari pertama (baru 2 km dibongkar dari total 30 km). Paragraf 4–5: Berisi penjelasan teknis dari TNI AL tentang kesulitan pembongkaran karena struktur bambu sudah tertanam selama berbulan-bulan dan cukup dalam (1,5–2 meter). Disampaikan bahwa bambu dipasang sejak Juli 2024, dan pembongkaran jauh lebih sulit daripada pemasangan.
	Hubungan antar kalimat	Hubungan antar 118actual118h bersifat progresif dan saling menguatkan, dari keputusan politik, aksi lapangan, dan kendala teknis.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Berita ini menggunakan bahasa formal dan netral khas laporan institusi. Tidak ditemukan idiom atau metafora dalam penyampaian. Gaya bahasa tetap lugas, dengan kekuatan narasi bersumber pada kutipan langsung dari pelaksana di lapangan. Salah satu kutipan menyebut “lebih mudah menanam daripada mencabut,” yang bernuansa kiasan, tetapi tetap berasal dari narasumber, bukan jurnalis. Grafik tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks, sehingga kekuatan retoris bergantung

sepenuhnya pada deskripsi peristiwa dan kutipan 119actual. Ini menjadikan berita bersifat kredibel dan obyektif, sesuai dengan gaya penyampaian straight news. Penulis menyisipkan gambar pagar laut, namun tidak dapat mewakili isi perintah dari Presiden RI untuk melakukan pembongkaran pagar laut.

---

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Struktur ini di berita ini dibangun secara langsung serta informatif. Judul mengandung elemen aksi dan otoritas: “Presiden Prabowo Perintahkan Pembongkaran Pagar Laut 30 Kilometer di Tangerang,” menegaskan keputusan negara terhadap permasalahan ruang laut. Lead menjelaskan siapa (Presiden Prabowo), apa yang dilakukan (memerintahkan pembongkaran), dan siapa pelaksananya (TNI AL bersama nelayan). Latar informasi menguatkan konteks bahwa pagar tersebut dibangun secara ilegal, mengganggu nelayan, dan memicu tindakan korektif dari pemerintah pusat. Kutipan langsung dan tidak langsung berasal dari Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto selaku pelaksana lapangan. Tidak ada kutipan dari pihak luar seperti LSM atau masyarakat sipil, sehingga berita terfokus pada versi institusi negara. Penutup tetap memuat kutipan langsung bernada reflektif teknis, bukan kesimpulan jurnalis. Tidak ditemukan opini penulis, menjadikan struktur sintaksis ini sesuai dengan pola *straight news*.

### 2. Struktur Skrip

Seluruh unsur 5W + 1H terpenuhi secara jelas di berita ini. *What* dijelaskan melalui isi pokok berita, yaitu pembongkaran pagar laut. *Where* disebutkan secara spesifik: di perairan Kabupaten Tangerang. *When* disampaikan rinci, yaitu pembongkaran dimulai 18 Januari 2025, dan berita terbit pada 20 Januari. *Who* meliputi Presiden Prabowo Subianto sebagai pemberi perintah, Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto sebagai pelaksana, dan 600 anggota TNI AL dari tiga satuan elite yang dikerahkan. *Why* dijelaskan dengan alasan bahwa pagar tersebut ilegal, mengganggu aktivitas nelayan, dan melanggar pemanfaatan ruang laut. *How* dijabarkan melalui teknis

lapangan: mencabut bambu yang sudah tertanam 1,5–2 meter di dasar laut menggunakan gabungan kekuatan TNI dan nelayan. Kelengkapan elemen skrip ini menunjukkan berita disusun secara lengkap serta jelas.

### 3. Struktur Tematik

Tematik berita dibangun dalam urutan kronologis dan progresif. Paragraf 1–2 menyampaikan latar keputusan politik, yaitu perintah dari Presiden Prabowo melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Paragraf 3 melanjutkan dengan aksi pelaksanaan pembongkaran, yang secara faktual baru mencapai dua kilometer di hari pertama. Paragraf 4–5 mendalami kendala teknis di lapangan, termasuk kedalaman bambu dan waktu pemasangannya yang lama. Hubungan antarparagraf sangat erat: setiap paragraf memperkuat dan melengkapi informasi sebelumnya. Gaya ini membentuk alur informasi yang tidak hanya melaporkan satu kejadian, tetapi juga menjelaskan konteks, proses, dan hambatan teknis secara utuh. Maka, berita ini dikategorikan sebagai *framing* tematik, karena membingkai peristiwa dalam kerangka sistematis yang menyatukan dimensi kebijakan, pelaksanaan, dan tantangan.

### 4. Struktur Retoris

Dalam berita ini, gaya retoris dibangun melalui pendekatan yang sangat formal dan faktual, sebagaimana lazimnya dalam laporan institusional yang bersumber dari instansi pemerintahan atau militer. Gaya penulisan tidak menunjukkan adanya upaya dramatisasi ataupun emosionalisasi isu. Ini tercermin dari pemilihan diksi yang cenderung datar, netral, dan birokratis, tanpa kehadiran idiom, metafora, atau ungkapan simbolik dari pihak jurnalis. Ketegasan bahasa tidak dibangun melalui gaya retoris persuasif, melainkan melalui penyampaian langsung atas peristiwa dan tindakan di lapangan. Satu-satunya elemen bahasa kiasan yang muncul justru berasal dari kutipan narasumber, bukan dari jurnalis itu sendiri. Ungkapan “lebih mudah menanam daripada mencabut,” yang disampaikan oleh pelaksana di lapangan, merupakan metafora teknis yang berfungsi menggambarkan

kompleksitas pembongkaran fisik pagar laut. Namun, karena datang dari narasumber dan tidak diperdalam secara naratif oleh jurnalis, ungkapan ini tetap berada dalam ranah deskriptif, bukan dalam kerangka pembedaan retorik oleh media. Dari sisi visual, artikel ini menyisipkan gambar pagar laut, namun visual tersebut tidak merepresentasikan secara langsung substansi utama berita, yakni instruksi dari Presiden RI untuk melakukan pembongkaran. Gambar berfungsi sebagai ilustrasi situasional, bukan sebagai penguat utama pesan naratif. Dalam penelitian kualitatif, hal ini dapat dibaca sebagai keterbatasan dalam membangun keselarasan antara narasi teks dan pesan visual—yang kemudian berdampak pada efektivitas retorik secara keseluruhan. Ketiadaan grafik atau visualisasi data lainnya semakin menegaskan bahwa kekuatan utama berita ini bertumpu pada kutipan narasumber dan deskripsi tindakan. Hal ini mengindikasikan bahwa media mengedepankan pendekatan straight news yang menekankan pelaporan faktual tanpa tambahan opini atau interpretasi jurnalis. Struktur ini sejalan dengan tujuan pemberitaan yang lebih berorientasi pada fungsi dokumentatif dan administratif, bukan pada penyadaran publik secara emosional. Dengan demikian, secara keseluruhan, struktur retorik dalam berita ini memperlihatkan posisi media sebagai penyampai informasi institusional yang netral. Fokusnya bukan pada membangun narasi yang menggugah, melainkan pada menyampaikan informasi yang dapat diverifikasi melalui tindakan dan kutipan resmi. Dalam konteks penelitian kualitatif, pendekatan ini menggambarkan cara media mereproduksi narasi negara tanpa membentuk bingkai retorik yang kuat atau beropini, melainkan dengan menekankan aspek teknis, hukum, dan administratif dari peristiwa.

#### **4.2.14. Analisis Artikel Berita 14 Beritabanten.com**

Judul : Polemik Pagar Laut Misterius, Polri: Sejauh Ini Belum Ada Unsur Tindak Pidana  
Sumber : Beritabanten.com  
Tanggal : 16 Januari 2025

Ringkasan : Polemik mengenai pemasangan pagar laut misterius di wilayah perairan Tangerang dan Bekasi terus menjadi perhatian publik. Hingga pertengahan Januari 2025, Polri menyatakan belum menemukan ada unsur tindak pidana di kasus ini. KKP disebut mempunyai kewenangan penuh dalam menangani masalah tersebut. Polri, melalui Kakorpolairud Baharkam, Irjen Mohammad Yassin, menegaskan bahwasanya pihaknya siap mendukung KKP bila dibutuhkan, terutama bila persoalan ini memunculkan gejolak sosial atau mengganggu keamanan serta ketertiban rakyat. Polri juga memastikan akan bertindak secara proaktif bila diperlukan, meskipun belum ada permintaan resmi.

Tabel 4.14. Analisis Artikel Berita 14 Beritabanten.com

<b>Perangkat Framing</b>	<b>Unit Pengamatan</b>	<b>Hasil Pengamatan</b>
Struktur Sintaksis	Judul	Polemik Pagar Laut Misterius, Polri: Sejauh Ini Belum Ada Unsur Tindak Pidana
	Lead	Polemik pagar laut yang terpasang di sejumlah perairan Tangerang dan Bekasi hingga kini masih terus menjadi perhatian. Polri memastikan belum ada unsur tindak pidana dalam kasus tersebut. Sementara itu, KKP disebut sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk menangani permasalahan tersebut.
	Latar Informasi	Latar belakang pemberitaan ini muncul akibat keresahan masyarakat pesisir atas keberadaan pagar laut yang dipasang secara misterius di wilayah perairan Tangerang dan Bekasi. Pagar-pagar tersebut dinilai mengganggu akses nelayan ke laut, memunculkan tanda tanya publik, dan bahkan diduga sebagai bagian dari pelanggaran tata ruang atau indikasi mafia tanah laut. Meski demikian, secara hukum, kasus ini belum memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, KKP sebagai instansi teknis dianggap lebih berwenang dalam menertibkan atau membongkar pagar tersebut. Sementara itu, Polri menempatkan diri dalam posisi siaga, menyatakan bahwa jika terjadi gangguan sosial atau pelanggaran hukum, mereka akan bertindak cepat.
	Kutipan	<p>Kutipan langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Sampai sejauh ini belum ada tindak pidana yang terjadi,” kata Yassin, Rabu (15/1/2025).</li> <li>2. “Jika ada gejolak sosial atau tindak pidana, tanpa diminta pun Polri akan turun ke lokasi,” ujarnya. (Yassin)</li> </ol> <p>Kutipan tidak langsung:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Mohammad Yassin mengungkapkan pihaknya siap mendukung KKP jika diperlukan untuk membongkar pagar-pagar tersebut.</li> <li>2. Yassin juga menegaskan, apabila persoalan pagar laut ini menimbulkan gejolak sosial atau mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri tidak akan ragu turun tangan.</li> </ol>
	<p>Sumber</p> <p>Pernyataan Opini Penutup</p>	<p>Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Mohammad Yassin</p> <p>Tidak Ada</p> <p>Yassin juga menegaskan, apabila persoalan pagar laut ini menimbulkan gejolak sosial atau mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri tidak akan ragu turun tangan. “Jika ada gejolak sosial atau tindak pidana, tanpa diminta pun Polri akan turun ke lokasi,” ujarnya.</p>
<p>Struktur Skrip</p>	<p><i>What</i></p> <p><i>Where</i></p> <p><i>When</i></p> <p><i>Who</i></p> <p><i>Why</i></p> <p><i>How</i></p>	<p>pernyataan Polri mengenai belum ditemukannya unsur tindak pidana dalam kasus pagar laut di Tangerang dan Bekasi. Perairan, Kabupaten Tangerang, Banten. 15 Januari 2025</p> <p>Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Mohammad Yassin</p> <p>hasil sementara belum menunjukkan pelanggaran hukum, dan penanganan masih menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p> <p>Polri siap mendukung proses hukum, dan bertindak jika muncul gangguan sosial atau hukum.</p>
<p>Struktur Tematik</p>	<p>Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat</p>	<p>Paragraf 1–2</p> <p>Paragraf pertama menjelaskan bahwa keberadaan pagar laut di sejumlah wilayah seperti Tangerang dan Bekasi menimbulkan perhatian masyarakat. Paragraf kedua menyampaikan pernyataan utama dari Polri bahwa sejauh ini belum ditemukan unsur tindak pidana dalam kasus tersebut. Kedua paragraf ini menyajikan gambaran umum masalah dan posisi awal aparat penegak hukum.</p> <p>Paragraf 3–4</p> <p>Paragraf ketiga mengandung kutipan langsung yang menegaskan kesiapan Polri bertindak apabila terjadi gejolak sosial. Paragraf keempat, melalui kutipan tidak langsung, memperluas konteks dengan menyampaikan bahwa Polri siap mendukung KKP jika diperlukan, dan menegaskan peran preventif Polri dalam menjaga keamanan masyarakat.</p>

Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	<p>Paragraf 5</p> <p>Paragraf ini mengulang pesan utama sebagai penguatan posisi institusional.</p> <p>Artikel ini menggunakan bahasa lugas dan formal, tidak ditemukan penggunaan idiom, metafora, atau majas lainnya. Gaya bahasa yang dipilih memperkuat kesan resmi dan netral dari institusi Polri. Dalam versi artikel yang tersedia, tidak ada grafik yang disertakan, namun gambar disisipkan tidak mewakili isi berita namun isi berita dapat memberikan pembaca pemahaman yang lebih konkret mengenai esensi berita dengan cukup kuat melalui kutipan pejabat dan fokus kebijakan hukum</p>
------------------	-----------------------------	---

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Struktur ini di artikel ini dibangun dengan format standar berita hard news yang mengedepankan unsur faktual dan netralitas. Judul artikel bersifat informatif dan langsung menyampaikan dua elemen penting: adanya polemik pagar laut dan pernyataan Polri bahwa belum ditemukan unsur pidana. Lead artikel memperluas konteks dengan menyampaikan perhatian publik terhadap pagar-pagar laut di Tangerang dan Bekasi serta peran KKP sebagai institusi yang memiliki wewenang. Latar informasi yang muncul dari keresahan nelayan dan publik terhadap akses laut juga memberi latar belakang kuat terhadap urgensi pernyataan aparat. Kutipan langsung dan tidak langsung dari Irjen Mohammad Yassin disisipkan secara tepat untuk memperkuat posisi resmi Polri. Tidak terdapat opini dari penulis, dan bahasa yang digunakan tetap formal, netral, serta faktual. Penutup artikel kembali menekankan kesiapan Polri untuk turun tangan jika muncul gangguan terhadap ketertiban masyarakat, sehingga struktur berita ini ditutup dengan pernyataan yang bersifat menenangkan publik dan mempertegas posisi institusional.

### 2. Struktur Skrip

Struktur ini di artikel ini sudah mencakup unsur 5W1H dengan lengkap meskipun disampaikan secara ringkas. *What* adalah pernyataan resmi Polri

bahwa belum ditemukan unsur pidana dalam kasus pagar laut. *Where* disebutkan secara eksplisit, yaitu di wilayah perairan Tangerang dan Bekasi. *When* ditandai dengan waktu kutipan, yaitu 15 Januari 2025. *Who* adalah Kakorpolairud Baharkam Polri, Irjen Mohammad Yassin, sebagai narasumber utama. *Why* dijelaskan dalam konteks bahwa hasil sementara belum mengindikasikan pelanggaran hukum dan penanganan ada di bawah kewenangan KKP. *How* diungkap melalui kesiapsiagaan Polri untuk mendukung KKP dan bertindak jika ada gangguan sosial atau pelanggaran hukum. Semua unsur ini menjadikan skrip berita tersebut informatif, ringkas, dan tetap menjawab pertanyaan dasar pembaca.

### 3. Struktur Tematik

Struktur ini di artikel ini tersusun dengan runtut dan logis antarparagraf.

- Paragraf pertama memaparkan isu pagar laut sebagai perhatian publik, sementara paragraf kedua menyampaikan sikap resmi Polri terhadap status hukum kasus tersebut. Paragraf ketiga dan keempat memperkuat posisi Polri melalui kutipan langsung dan tidak langsung, termasuk kesiapan mereka untuk mendukung KKP. Paragraf kelima atau bagian penutup mengulangi dan menegaskan kembali kesiapan institusional Polri, menunjukkan komitmen terhadap stabilitas sosial. Hubungan antarparagraf menunjukkan kesinambungan tema, dari kondisi di lapangan hingga posisi hukum dan sikap institusi. Berdasarkan penyusunan ini, artikel termasuk dalam *framing* tematik karena tidak berfokus pada narasi kejadian tunggal atau individu, melainkan pada respons kebijakan dan sikap lembaga negara terhadap persoalan yang sedang berlangsung. Fokusnya adalah pada isu struktural dan posisi hukum.

### 4. Struktur Retoris

Artikel ini menampilkan karakteristik retorik yang selaras dengan laporan resmi kelembagaan. Gaya bahasa yang digunakan bersifat lugas, formal, dan menghindari bentuk ekspresi emosional atau retorik berlebihan. Tidak ditemukan penggunaan idiom, metafora, atau majas lain yang umumnya

berfungsi untuk menggugah emosi atau membangun citra simbolik. Pemilihan diksi yang netral dan birokratis merefleksikan posisi media sebagai penyampai pernyataan institusi, dalam hal ini Polri, tanpa menyuntikkan interpretasi atau narasi tambahan dari jurnalis. Salah satu elemen penting dalam struktur retorik artikel ini adalah penggunaan kutipan langsung dari pejabat kepolisian. Kutipan tersebut disajikan secara eksplisit dan berulang, sehingga berfungsi sebagai bentuk penegasan atas posisi resmi institusi. Kutipan ini tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga berperan menjadi penguat otoritas dan kesan objektivitas. Penekanan pada kutipan menjadikan narasumber sebagai penanggung jawab makna, bukan jurnalis atau redaksi, yang dalam konteks penelitian kualitatif menunjukkan bagaimana media mendistribusikan otoritas wacana kepada aktor negara. Walaupun artikel menyertakan gambar, visualisasi tersebut tampak tidak mendukung secara langsung isi naratif berita. Gambar hadir sebagai pelengkap, bukan sebagai penegas pesan utama, dan tidak terintegrasi secara tematik dengan substansi yang dibahas. Dalam pendekatan kualitatif, kondisi ini dapat dibaca sebagai strategi penyajian yang masih menekankan narasi teks sebagai alat utama komunikasi, dengan visual sekadar sebagai pelengkap simbolik. Selain itu, tidak adanya grafik atau data visual lain menunjukkan bahwa strategi retorik yang digunakan lebih mengandalkan bentuk verbal melalui kutipan dan deskripsi situasional. Artikel ini menghindari visualisasi teknis atau statistik, dan lebih memilih menjelaskan posisi Polri secara naratif dalam kerangka hukum dan koordinasi. Fokus pemberitaan diarahkan pada netralitas posisi institusi dan sikap kehati-hatian dalam menangani isu yang melibatkan kewenangan lintas kementerian. Keseluruhan pendekatan ini menghasilkan bentuk retorik yang tenang, terukur, dan lebih bersifat informatif daripada persuasif. Dalam perspektif penelitian kualitatif, hal ini dapat dipahami sebagai strategi wacana media yang berupaya memposisikan negara sebagai pihak yang stabil dan bertanggung jawab, sekaligus menjauhkan diri dari potensi kontroversi atau penyalahertian di mata publik. Konstruksi ini tidak lepas dari konteks politik dan birokratis yang mengelilingi isu pagar laut, di

mana media tampak memilih untuk menyampaikan informasi dalam batas aman narasi kelembagaan.

#### 4.2.15. Analisis Artikel Berita 15 Beritabanten.com

Judul : Ratusan Marinir TNI AL Dikerahkan ke Tanjung Pasir Bongkar Pagar Laut yang Menghalangi Nelayan  
 Sumber : Beritabanten.com  
 Tanggal : 18 Januari 2025  
 Ringkasan : Di 18 Januari 2025, sekitar 600 personel Marinir TNI Angkatan Laut dikerahkan ke wilayah pesisir Tanjung Pasir, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang, untuk membongkar pagar laut yang menghalangi akses nelayan. Aksi ini merupakan respons terhadap keluhan warga yang selama ini terganggu dalam menjalankan aktivitas mencari ikan. Operasi pembongkaran dilakukan bersama masyarakat setempat dan melibatkan sejumlah satuan elite seperti Kopaska dan Dislambair. Komandan Lantamal III Jakarta, Brigjen TNI Harry Indarto, mengemukakan bahwasanya pembongkaran dilaksanakan dengan peralatan khusus karena kondisi laut yang dangkal dan cuaca buruk. Warga setempat, seperti Awi dan Maun, menyambut baik pembongkaran ini karena mengembalikan kebebasan mereka dalam melaut.

Tabel 4.15. Analisis Artikel Berita 15 Beritabanten.com

<b>Perangkat Framing</b>	<b>Unit Pengamatan</b>	<b>Hasil Pengamatan</b>
Struktur Sintaksis	Judul	Ratusan Marinir TNI AL Dikerahkan ke Tanjung Pasir Bongkar Pagar Laut yang Menghalangi Nelayan
	Lead	Ratusan personel Marinir TNI Angkatan Laut (TNI AL) diterjunkan ke Desa Tanjung Pasir, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang untuk mencabut pagar laut yang selama ini menghalangi aktivitas nelayan. Proses pembongkaran dimulai pada Sabtu pagi, 18 Januari 2025 dengan melibatkan sekitar 600 personel TNI AL serta dukungan dari masyarakat setempat.
	Latar Informasi	Latar belakang berita ini berasal dari keresahan masyarakat pesisir di Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, terhadap keberadaan pagar laut yang diduga dipasang secara ilegal. Pagar tersebut menghalangi akses nelayan untuk melaut

dan mencari nafkah, sehingga memicu protes dari warga. Situasi ini kemudian menjadi sorotan publik dan memancing respons dari berbagai pihak, termasuk TNI AL. Dalam konteks tersebut, keterlibatan ratusan personel TNI AL merupakan bentuk tanggapan atas keluhan masyarakat serta upaya pemerintah untuk memulihkan akses publik terhadap ruang laut. Operasi pembongkaran juga mencerminkan komitmen institusi militer dalam menjaga kedaulatan maritim dan mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain itu, keterlibatan langsung warga dalam pembongkaran menekankan adanya solidaritas antara aparat negara dan masyarakat lokal dalam menuntaskan persoalan yang dianggap mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi warga nelayan.

#### Kutipan

Kutipan langsung:

1. “Sejak pagi ini, kami bersinergi dengan masyarakat untuk melakukan pembongkaran pagar laut yang selama ini menjadi polemik. Ini adalah bentuk respons atas keluhan masyarakat,” ujar Brigjen Harry.
2. “Seharusnya pembongkaran menggunakan perahu tongkang, namun karena kondisi perairan yang dangkal dan cuaca buruk, kami menggunakan perahu cepat dan peralatan lainnya,” tambahnya. (Harry)
3. “Kami sangat bersyukur dengan bantuan TNI AL. Ini momentum yang pas, apalagi Kasal juga akan turun langsung membantu pencabutan pagar di Tanjung Pasir,” ujar Awi.
4. “Senang sekali, pagar laut yang sangat mengganggu nelayan akhirnya dibongkar. Saya sampai membatalkan pesanan memancing yang sudah dibayar, karena ini lebih penting untuk kepentingan bersama,” ujar Maun.

Kutipan tidak langsung:

1. Menurut Komandan Lantamal III Jakarta, Brigjen TNI Harry Indarto kehadiran pasukan TNI AL ini merupakan tindak lanjut atas keluhan warga yang merasa terganggu dengan adanya pagar laut di pesisir Tanjung Pasir. Pagar tersebut disebut membatasi akses nelayan dalam mencari ikan.
2. Ia menjelaskan bahwa sebanyak 600 personel yang diterjunkan berasal dari Lantamal III Jakarta, Dinas Penyelamatan Bawah Air Komando Armada RI (Dislambair) serta melibatkan pasukan elite Komando Pasukan Katak (Kopaska). Selain itu, tim medis turut diterjunkan untuk mendukung kelancaran proses ini. (Harry)

3. Awi, salah satu nelayan setempat mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan TNI AL. Menurutnya, seluruh nelayan siap terlibat dalam pencabutan pagar laut yang selama ini menghambat pekerjaan mereka.
4. Hal serupa diungkapkan Maun, warga Tanjung Pasir lainnya. Ia merasa lega karena penghalang aktivitas nelayan akhirnya dicabut. Bahkan, ia rela membatalkan pesanan perahunya yang sudah dibayar demi ikut serta dalam aksi pembongkaran ini.

Sumber	Komandan Lantamal III Jakarta, Brigjen TNI Harry Indarto TNI AL Awi, salah satu nelayan setempat Maun, warga Tanjung Pasir
Pernyataan Opini	Tidak Ada
Penutup	Dengan keterlibatan TNI AL dan semangat gotong royong masyarakat, pembongkaran pagar laut di Tanjung Pasir diharapkan segera tuntas, sehingga akses para nelayan dalam mencari nafkah kembali lancar.
Struktur Skrip	<p><i>What</i> Pembongkaran pagar laut oleh TNI AL di wilayah pesisir yang mengganggu aktivitas nelayan.</p> <p><i>Where</i> Desa Tanjung Pasir, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang, Banten.</p> <p><i>When</i> 18 Januari 2025</p> <p><i>Who</i> Sekitar 600 personel TNI AL dari berbagai satuan, termasuk Kopaska, Lantamal III, Dislambair, serta warga setempat.</p> <p><i>Why</i> Respons atas keluhan masyarakat terhadap pagar laut yang menghambat akses nelayan melaut.</p> <p><i>How</i> Operasi dilakukan dengan kapal cepat dan peralatan ringan karena medan dangkal dan cuaca buruk, dengan dukungan gotong royong dari masyarakat.</p>
Struktur Tematik	<p>Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat</p> <p>Paragraf 1-2 membahas aksi pembongkaran yang dilakukan oleh TNI AL, menyampaikan siapa yang terlibat dan mengapa operasi tersebut dijalankan.</p> <p>Paragraf 3-4 berisi kutipan dari pihak militer yang menjelaskan kendala teknis di lapangan dan metode pembongkaran yang digunakan.</p> <p>Paragraf 5-6 menghadirkan perspektif masyarakat, termasuk rasa syukur warga dan antusiasme untuk terlibat dalam aksi tersebut.</p> <p>Paragraf 7 memberikan harapan terhadap keberhasilan operasi ini dalam memulihkan akses nelayan. Hubungan antarparagraf bersifat logis dan</p>

Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	mendalam, menyatukan narasi kelembagaan (TNI AL) dan komunitas (nelayan). Gambar yang disisipkan oleh penulis dalam artikel merupakan dokumentasi pada wawancara yang dilakukan oleh Komandan Lantamal III Jakarta, Brigjen TNI Harry Indarto. Visual tersebut mewakili isi kutipan yang dipaparkan oleh beliau.
------------------	-----------------------------	---

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Struktur ini di artikel ini disusun secara informatif serta faktual. Judulnya secara langsung menggambarkan peristiwa utama: pengerahan ratusan Marinir TNI AL agar membongkar pagar laut yang mengganggu nelayan. Judul ini efektif menarik perhatian karena menyampaikan tindakan tegas dan masalah sosial yang relevan. Lead berita menyampaikan informasi pokok secara ringkas, yakni pelaksanaan operasi pembongkaran oleh sekitar 600 personel TNI AL dengan melibatkan masyarakat setempat pada 18 Januari 2025. Latar informasi menjelaskan bahwa aksi ini merupakan respons atas keresahan masyarakat pesisir terhadap pagar laut yang diduga ilegal dan telah menghambat aktivitas nelayan. Kutipan langsung dan tidak langsung dari pejabat militer (Brigjen TNI Harry Indarto) dan warga (Awi dan Maun) digunakan untuk memperkuat validitas dan memberi dimensi emosional terhadap berita. Tidak ditemukan opini dari jurnalis, menunjukkan sikap netral dan objektif. Penutup artikel memberikan harapan bahwa pembongkaran akan mengembalikan akses bebas nelayan ke laut, menegaskan keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat.

### 2. Struktur Skrip

Artikel ini menyajikan struktur 5W1H secara lengkap serta jelas. *What* adalah pembongkaran pagar laut yang menghalangi aktivitas nelayan. *Where* berlangsung di Desa Tanjung Pasir, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang, Banten. *When* terjadi pada 18 Januari 2025. *Who* melibatkan sekitar 600 personel TNI AL dari berbagai satuan, termasuk Kopaska, Lantamal III, dan Dislambair, serta partisipasi warga setempat. *Why* merupakan respons terhadap keluhan masyarakat terkait penghalang akses

melaut. *How* dilakukan melalui pembongkaran menggunakan kapal cepat dan peralatan ringan karena kondisi medan yang dangkal dan cuaca yang buruk, serta didukung oleh gotong royong masyarakat. Informasi ini membuat berita menjadi utuh dan mudah dipahami pembaca dari berbagai kalangan.

### 3. Struktur Tematik

Struktur ini di berita ini dibangun dengan sistematis serta terhubung logis antarparagraf. Paragraf 1–2 menyampaikan aksi pembongkaran oleh TNI AL, menjelaskan siapa yang terlibat dan alasan pelaksanaannya. Paragraf 3–4 menampilkan kutipan dari Brigjen TNI Harry yang menjelaskan tantangan teknis serta cara pembongkaran dilakukan. Paragraf 5–6 memberi suara kepada warga lokal seperti Awi dan Maun, yang menunjukkan rasa syukur dan keterlibatan aktif mereka. Paragraf 7 (penutup) memberikan harapan akan kelancaran aktivitas nelayan setelah pagar laut dibongkar. Hubungan antarparagraf membentuk alur kronologis dan naratif yang menyatu, memadukan informasi dari institusi (TNI AL) dan komunitas (nelayan). Berdasarkan penyajian ini, artikel termasuk ke dalam *framing* tematik, karena membahas isu secara menyeluruh dengan pendekatan struktural dan institusional. Artikel tidak fokus pada cerita personal atau insiden sesaat, tetapi pada permasalahan sosial dan upaya penyelesaian kolektifnya.

### 4. Struktur Retoris

Artikel ini menyajikan struktur retoris yang bertumpu pada penyampaian fakta secara langsung dan formal, tanpa penggunaan gaya bahasa kiasan seperti idiom atau metafora. Pilihan bahasa yang digunakan bersifat netral dan informatif, memperlihatkan kehati-hatian jurnalis dalam menjaga objektivitas serta menghindari konotasi emosional yang berlebihan. Dalam konteks wacana media, hal ini menunjukkan bahwa berita ditulis untuk memperkuat legitimasi kebijakan negara alih-alih menciptakan narasi emosional yang bisa menimbulkan polemik. Kutipan langsung dari pejabat

militer dalam hal ini Brigjen TNI Harry Indarto menjadi elemen retorika utama yang menopang kredibilitas isi berita. Melalui kutipan tersebut, posisi aparat negara ditampilkan secara tegas sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap proses pembongkaran pagar laut. Namun yang menarik, dalam penyampaian kutipan juga disisipkan suara warga, yang meskipun tidak dominan, berperan menambahkan dimensi sosial dalam narasi. Dalam pendekatan kualitatif, keterlibatan dua jenis aktor ini (institusi dan warga) menunjukkan adanya upaya membangun keseimbangan otoritas dan kedekatan sosial.

Elemen visual yang digunakan dalam artikel berupa dokumentasi saat wawancara dengan Brigjen TNI Harry Indarto menjadi aspek penting dari retorika media. Gambar ini tidak hanya bersifat ilustratif, tetapi juga merepresentasikan keterlibatan langsung aktor negara di lapangan. Dalam analisis wacana visual, penggunaan dokumentasi seperti ini berfungsi sebagai “bukti otentik” yang memperkuat kesan bahwa berita bukan hanya disusun berdasarkan informasi sekunder, tetapi bersumber dari interaksi langsung dengan pelaku peristiwa. Visual ini juga memberi wajah konkret terhadap kekuasaan negara dalam bertindak, sekaligus memperkuat kepercayaan pembaca terhadap kebenaran isi berita. Tidak adanya grafik atau data statistik menunjukkan bahwa media lebih mengandalkan kekuatan narasi dan dokumentasi lapangan dibandingkan pendekatan visual analitis.

Ini mengindikasikan bahwa strategi retorika diarahkan pada pendekatan yang berbasis naratif dan testimonial, bukan pada penyajian kuantitatif. Dalam kerangka penelitian kualitatif, pendekatan semacam ini merefleksikan bagaimana media memproduksi makna melalui penempatan aktor otoritatif di garis depan informasi. Secara keseluruhan, struktur retorika dalam artikel ini membangun kredibilitas melalui kombinasi antara bahasa resmi, kutipan langsung dari otoritas, dan dukungan visual dokumentatif. Media tampak ingin meyakinkan pembaca bahwa tindakan pembongkaran pagar laut merupakan bagian dari mekanisme hukum yang jelas, serta melibatkan koordinasi nyata dari institusi negara dan mendapat pengawasan publik. Ini

sekaligus menciptakan narasi bahwa pemerintah bertindak secara sah dan transparan dalam menangani konflik ruang laut.

#### 4.2.16. Analisis Artikel Berita 16 Beritabanten.com

Judul : Menanti Tersangka Kasus Pagar Laut di Tangerang  
 Sumber : Beritabanten.com  
 Tanggal : 05 Februari 2025  
 Ringkasan : Berita ini mengangkat perkembangan penyelidikan terhadap kasus pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di wilayah Pantai Utara (Pantura) Kab. Tangerang. Kasus ini diduga melibatkan tindak pidana berupa pemalsuan dokumen kepemilikan tanah yang menjadi dasar penerbitan SHGB serta SHM. Penyidik Bareskrim Polri telah menerima ratusan dokumen warkah, sementara KKP juga terus melaksanakan pemeriksaan melalui Polsus PWP3K dan Ditjen PSDKP. Hingga kini, penyelidikan masih berlangsung terhadap sejumlah pihak termasuk kepala desa, nelayan, serta perwakilan dari perusahaan pemilik sertifikat. Namun, belum ada tersangka resmi yang diumumkan.

Tabel 4.16. Analisis Artikel Berita 16 Beritabanten.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Menanti Tersangka Kasus Pagar Laut di Tangerang
	Lead	Pagar laut sepanjang 30,16 di Pantai Utara (Pantura) Kab. Tangerang terus ditelusuri siapa yang bertanggung jawab. Dari rangkaian penyelidikan didapatkan kabar ada dugaan tindak pidana berupa pemalsuan dokumen kepemilikan lahan pantai yang jadi dasar pembuatan SHGB dan SHM.
	Latar Informasi	Latar belakang berita ini berasal dari konflik ruang laut yang muncul akibat pemasangan pagar laut di Pantura Kabupaten Tangerang, yang membatasi akses nelayan dan diduga melanggar aturan tata ruang dan agraria. Persoalan ini memunculkan pertanyaan hukum karena pagar tersebut ternyata dilengkapi dengan dokumen SHGB dan SHM dari berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta. Kecurigaan terhadap keabsahan dokumen kepemilikan lahan mendorong aparat penegak hukum dan instansi teknis seperti ATR/BPN serta KKP untuk menyelidiki dugaan pelanggaran

administratif dan pidana. Pemeriksaan intensif dilakukan terhadap pihak-pihak terkait, dan masyarakat pun menanti siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Konteks ini menunjukkan bahwa persoalan pagar laut bukan hanya soal teknis pelanggaran ruang laut, tetapi juga menyangkut potensi praktik mafia tanah.

Kutipan

Kutipan langsung:

1. “Penyelidikan masih terus berlangsung dan akan terus didalami lebih lanjut,” katanya, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 3 Februari 2025.
2. “Kami memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatan kepada enam pegawai dan sanksi berat terhadap dua pegawai,” kata Nusron.
3. “Itu saya bantah langsung. Bagaimana saya mau mengarahkan? Orang saya kenal juga tidak. Saya itu ke sana untuk kasih tahu karena ada RT/RW saya yang bilang kalau ada pagar,” kata Arsin
4. “Pemeriksaan ini adalah bagian dari proses penegakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan,” katanya saat dihubungi (Doni Ismanto)
5. “Sebelumnya (yang diperiksa) dua orang, tambah yang kemarin (kepala desa dan 13 nelayan),” ucapnya. (Doni Ismanto)
6. “KKP menegaskan bahwa seluruh proses ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku guna memastikan ketertiban dan ketaatan pengelolaan ruang laut yang berkeadilan,” kata dia. (Red)

Kutipan tidak langsung:

1. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Djuhandani Raharjo Puro mengaku menerima 263 berkas warkah yang menjadi dasar penerbitan sertifikat kepemilikan tanah.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang menjelaskan pagar laut memiliki memiliki SHGB dan SHM, dengan rincian: 234 bidang SHGB atas nama PT. Intan Agung Makmur (PT IAM), 20 bidang SHGB atas nama PT. Cahaya Inti Sentosa (PT. CIS), sembilan bidang SHGB atas nama perorangan, dan 17 bidang SHM dari girik.
3. Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) KKP terus mengembangkan pemeriksaan kasus pagar tersebut. Pada 30 Januari 2025, kata

		<p>dia, KKP telah memanggil Kepala Desa Kohod dan 13 nelayan untuk dimintai keterangan.</p> <p>4. Pihaknya juga menyebutkan pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal PSDKP KKP itu merupakan pengembangan dari pemeriksaan sebelumnya terhadap dua perwakilan Jaringan Rakyat Pantura (JRP) pada Selasa, 21 Januari 2025.</p> <p>5. Dia menambahkan pemeriksaan akan terus dilakukan karena KKP akan mengembangkan keterangan dari hasil pemeriksaan terhadap Kades Kohod dan 13 nelayan lainnya. Doni menegaskan KKP memastikan penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan tetap dalam koridor hukum.</p>
	Sumber	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Djuhandani Raharjo Puro</li> <li>2. Kantor Pertanahan Kab. Tangerang</li> <li>3. Menteri ATR-BPN Nusron Wahid</li> <li>4. Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin</li> <li>5. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) KKP</li> <li>6. PSDKP</li> </ol>
	Pernyataan Opini	Tidak Ada
	Penutup	<p>Dia menambahkan pemeriksaan akan terus dilakukan karena 135ublic135t mengembangkan keterangan dari hasil pemeriksaan terhadap Kades Kohod dan 13 nelayan lainnya. Doni menegaskan 135ublic135trative penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan tetap dalam koridor hukum. “135ublic135trative bahwa seluruh proses ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku guna memastikan ketertiban dan ketaatan pengelolaan ruang laut yang berkeadilan,” kata dia.</p>
Struktur Skrip	<p><i>What</i></p> <p><i>Where</i></p> <p><i>When</i></p> <p><i>Who</i></p> <p><i>Why</i></p> <p><i>How</i></p>	<p>Penyelidikan dugaan tindak pidana terkait pemasangan pagar laut dan pemalsuan dokumen kepemilikan lahan.</p> <p>Pantai Utara (Pantura), Kabupaten Tangerang, Banten.</p> <p>Perkembangan terbaru per 3–5 Februari 2025.</p> <p>Bareskrim Polri, ATR/BPN, KKP, Kepala Desa Kohod, 13 nelayan, dan perusahaan pemilik SHGB/SHM.</p> <p>Karena ditemukan dugaan pemalsuan dokumen dan pelanggaran pengelolaan ruang laut.</p> <p>Penyelidikan dilakukan melalui pengumpulan dokumen (263 warkah), pemanggilan saksi, dan pengembangan pemeriksaan 135ublic135trative serta hukum oleh KKP dan Polri.</p>
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat,	Paragraf 1-2

Hubungan antar kalimat	membuka dengan pernyataan tentang belum jelasnya pihak yang bertanggung jawab atas pagar laut, lalu mengarah pada dugaan pemalsuan dokumen.
	Paragraf 3-5 memuat kutipan dan pernyataan resmi dari pihak Polri mengenai dokumen sertifikat dan proses penyelidikan.
	Paragraf 6-9 berfokus pada KKP yang juga melakukan pemeriksaan terhadap kepala desa dan sejumlah nelayan.
Struktur Retoris	Paragraf 10 menegaskan bahwa proses penyelidikan terus berlanjut dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Hubungan antarparagraf bersifat kronologis dan informatif, menyatukan dimensi hukum, kelembagaan, dan proses administrasi pemerintahan.
Kata, Gambar, Grafik	Tidak terdapat penggunaan idiom, metafora, atau ungkapan emosional. Gaya bahasa netral dan berorientasi pada penyampaian fakta. Kutipan langsung dari pejabat 136public menjadi alat retorik utama yang memperkuat kredibilitas isi berita. Gambar yang disisipkan oleh penulis juga tidak relevan dengan isi berita, namun isi pada berita mendukung pemahaman pembaca terhadap skala dan dampak kasus.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Struktur ini di artikel ini tersusun dengan format pemberitaan investigatif. Judul “Menanti Tersangka Kasus Pagar Laut di Tangerang” menyiratkan bahwa proses hukum terhadap kasus pagar laut sedang berlangsung namun belum membuahkan hasil akhir berupa penetapan tersangka. Lead-nya menyampaikan fokus utama secara langsung, yaitu penyelidikan terhadap dugaan pemalsuan dokumen sebagai dasar penerbitan sertifikat kepemilikan atas lahan laut yang dipasang pagar. Latar informasi menjelaskan konteks konflik ruang laut dan keterlibatan berbagai pihak seperti ATR/BPN, KKP, dan Bareskrim Polri. Artikel menyajikan kutipan langsung dari berbagai sumber resmi seperti pejabat Bareskrim, ATR/BPN, dan KKP, serta kutipan tidak langsung yang memperkuat kronologi dan fakta hukum. Gaya bahasa yang digunakan bersifat netral dan tidak menunjukkan adanya opini

jurnalis. Penutup artikel menegaskan komitmen KKP terhadap proses hukum yang profesional dan transparan, sekaligus menutup berita dengan posisi tegas dari institusi negara terhadap dugaan pelanggaran pengelolaan ruang laut.

## 2. Struktur Skrip

Struktur 5W1H di artikel ini disampaikan dengan lengkap. *What* dijelaskan sebagai penyelidikan kasus pagar laut yang diduga melibatkan pemalsuan dokumen kepemilikan tanah. *Where* terjadi di wilayah Pantai Utara (Pantura), Kabupaten Tangerang. *When* merujuk pada perkembangan terbaru per 3–5 Februari 2025. *Who* melibatkan banyak institusi, seperti Bareskrim Polri, ATR/BPN, KKP, serta pihak-pihak yang sedang diselidiki termasuk kepala desa, nelayan, dan perusahaan pemilik SHGB/SHM. *Why* penyelidikan dilakukan karena terdapat dugaan pelanggaran hukum dan pengelolaan ruang laut yang tidak sah. *How* dijelaskan melalui pengumpulan dokumen sebanyak 263 warkah, pemanggilan saksi, dan pemeriksaan administratif yang dilakukan secara bertahap oleh Polri dan KKP. Penyajian struktur ini memperlihatkan bahwa berita telah memenuhi kelengkapan unsur-unsur jurnalistik dasar.

## 3. Struktur Tematik

Struktur ini di artikel ini terbentuk dari hubungan antarparagraf yang kronologis dan saling mendukung. Paragraf 1–2 membuka berita dengan pernyataan tentang belum adanya pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan mengarah pada dugaan pemalsuan dokumen. Paragraf 3–5 menyampaikan tanggapan dan data dari Polri terkait sertifikat dan proses penyelidikan. Paragraf 6–9 fokus pada tindakan KKP, termasuk proses pemeriksaan terhadap kepala desa dan nelayan sebagai bagian dari pengembangan kasus. Paragraf 10 memberikan penegasan institusional mengenai proses hukum yang tetap berjalan secara profesional. Hubungan antarparagraf menjelaskan perkembangan kasus secara progresif dan menyeluruh, menyatukan dimensi hukum, kebijakan publik, dan

administrasi pemerintahan. Berdasarkan penyajiannya, artikel ini termasuk dalam *framing* tematik karena menyoroti persoalan struktural secara mendalam dan sistematis. Berita tidak mengandalkan cerita individual yang bersifat dramatis, tetapi berfokus pada institusi dan proses penyelidikan yang sedang berjalan.

#### 4. Struktur Retoris

Dalam artikel ini, struktur retorik tampak dibangun melalui pendekatan yang mengutamakan objektivitas dan formalitas. Bahasa yang digunakan tidak menunjukkan kecenderungan pada gaya emosional atau ekspresif tidak terdapat idiom, metafora, atau bentuk majas lain yang bersifat figuratif. Gaya penyampaian tersebut merefleksikan karakteristik berita jenis *straight news*, yang biasanya menempatkan fakta sebagai pusat narasi dan menghindari pengaruh interpretatif dari jurnalis.

Elemen yang paling menonjol dalam struktur retorik berita adalah kutipan langsung dari pejabat publik. Dalam konteks ini, kutipan berfungsi bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai alat pembentuk otoritas narasi. Dengan menempatkan suara pejabat secara eksplisit, berita ini membingkai isu sebagai sesuatu yang tengah ditangani secara resmi oleh negara. Hal ini memberi kesan bahwa kasus pagar laut berada dalam pengawasan institusional yang legal, tertib, dan prosedural. Dalam pendekatan kualitatif, hal ini dapat dibaca sebagai strategi media dalam membangun kepercayaan publik melalui sumber yang dianggap sah dan berwenang. Secara visual, artikel menyertakan gambar, namun keterhubungan antara gambar dan isi berita tampak lemah. Gambar yang disisipkan tidak secara langsung mendukung narasi utama atau memperkuat konteks isi berita. Namun, dalam pendekatan kualitatif, ketidaksesuaian visual ini bukan hanya soal teknis semata, melainkan dapat dibaca sebagai indikasi bahwa media lebih menekankan otoritas teks terutama melalui kutipan dan rincian kebijakan dibanding mengandalkan visualisasi sebagai elemen persuasi. Dalam konteks berita tentang penegakan hukum, hal ini dapat dimaknai sebagai upaya menjaga keseriusan dan ketegasan pesan

yang ingin disampaikan. Meski tanpa grafik atau elemen visual penjas lainnya, artikel tetap mampu menghadirkan pemahaman mendalam tentang skala persoalan yang dilaporkan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan retorik dibangun melalui struktur narasi yang informatif dan penyusunan fakta yang berjenjang. Informasi mengenai koordinasi antar-lembaga, pernyataan sikap, serta perkembangan proses hukum disusun secara sistematis sehingga pembaca dapat memahami besarnya dampak kasus tanpa harus disugahi ilustrasi tambahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur retorik artikel ini lebih menonjol dalam bentuk otoritas verbal daripada simbolik. Media mbingkai isu pagar laut sebagai persoalan hukum dan administratif yang tengah ditangani negara secara sah, dan menempatkan jurnalis sebagai penyampai fakta, bukan komentator atau pengarah opini. Pendekatan seperti ini selaras dengan karakter media yang ingin menjaga profesionalisme peliputan isu publik yang sensitif.

#### **4.2.17. Analisis Artikel Berita 17 Beritabanten.com**

Judul : Kasus Pagar Laut Tangerang: Menteri ATR/BPN Pecat 6 Pegawai dan Beri Sanksi Berat kepada 2 Pegawai

Sumber : Beritabanten.com

Tanggal : 30 Januari 2025

Ringkasan : Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang mengumumkan sanksi tegas terhadap delapan pegawai BPN yang terlibat dalam kasus penerbitan sertifikat di wilayah pagar laut pesisir utara Tangerang. Ada 6 pegawai dicopot dari jabatannya dan 2 lainnya menerima sanksi berat. Nusron juga menyatakan bahwa survei dan pengukuran untuk sertifikasi tanah dilakukan oleh perusahaan swasta, sehingga Kementerian ATR merekomendasikan pencabutan lisensi perusahaan tersebut. Seluruh langkah ini diambil menjadi respons terhadap temuan pelanggaran administratif dan prosedural yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan hak atas tanah di wilayah yang seharusnya tidak boleh disertifikasi.

Tabel 4.17. Analisis Artikel Berita 17 Beritabanten.com

<b>Perangkat Framing</b>	<b>Unit Pengamatan</b>	<b>Hasil Pengamatan</b>
Struktur Sintaksis	Judul	Kasus Pagar Laut Tangerang: Menteri ATR/BPN Pecat 6 Pegawai dan Beri Sanksi Berat kepada 2 Pegawai
	Lead	Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan sanksi tegas kepada delapan pegawai ATR/BPN yang terlibat dalam kasus pagar laut di pesisir utara Pantai Tangerang, Banten.
	Latar Informasi	Latar belakang berita ini berkaitan erat dengan konflik agraria dan tata ruang di wilayah pesisir utara Tangerang. Munculnya pagar laut secara masif menimbulkan polemik karena menghalangi akses masyarakat, khususnya nelayan, terhadap laut sebagai ruang hidup dan mata pencaharian. Kasus ini terungkap karena adanya sertifikat tanah seperti SHGB dan SHM yang diterbitkan atas wilayah perairan, yang semestinya merupakan kawasan milik publik ( <i>common property</i> ). Investigasi internal yang dilakukan ATR/BPN menemukan bahwa penerbitan sertifikat tersebut tidak sesuai prosedur. Sebagai bentuk akuntabilitas, Menteri ATR/BPN menjatuhkan sanksi kepada pegawai terlibat serta menelusuri peran perusahaan swasta yang melakukan pengukuran..
	Kutipan	<p>Kutipan langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Kita memberikan sanksi berat berupa pembebasan dan penghentian dari jabatannya kepada enam pegawai serta sanksi berat kepada dua pegawai lainnya,” ujar Nusron</li> <li>2. “Karena survei dan pengukuran dilakukan oleh perusahaan swasta, kami merekomendasikan pencabutan lisensinya,” tegas Nusron.</li> </ol> <p>Kutipan tidak langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan sanksi tegas kepada delapan pegawai ATR/BPN yang terlibat dalam kasus pagar laut di pesisir utara Pantai Tangerang, Banten.</li> <li>2. Nusron menjelaskan bahwa delapan pegawai tersebut telah diperiksa oleh inspektorat dan keputusan sanksinya tinggal menunggu penerbitan SK serta penarikan mereka dari jabatannya.</li> <li>3. Nusron juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan audit investigasi terhadap penerbitan sertifikat di 140rgumen tersebut. Hasil audit merekomendasikan pencabutan lisensi kantor jasa 140rgume berlisensi (KJSB) yang terlibat dalam 140rgume dan pengukuran tanah.</li> </ol>
	Sumber	Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

	Pernyataan Opini Penutup	Tidak Ada Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menegakkan aturan dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat tanah di wilayah pesisir.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Pemberian sanksi berat kepada delapan pegawai ATR/BPN yang terlibat dalam kasus penerbitan sertifikat tanah di wilayah pesisir.
	<i>Where</i>	Pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten.
	<i>When</i>	30 Januari 2025.
	<i>Who</i>	Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, delapan pegawai yang terlibat, dan perusahaan jasa argume.
	<i>Why</i>	Karena terjadi pelanggaran prosedur dalam argume dan penerbitan sertifikat atas tanah yang berada di wilayah laut.
Struktur Tematik	<i>How</i>	Melalui audit argumentative, pemberian sanksi argumentative (pemecatan dan hukuman berat), serta rekomendasi pencabutan lisensi perusahaan pengukur tanah.
	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	Paragraf 1-2 menjelaskan keputusan pemecatan dan pemberian sanksi terhadap delapan pegawai ATR/BPN.
		Paragraf 3 berisi penjelasan bahwa pelanggaran terkait pengukuran lahan dilakukan oleh pihak swasta
		Paragraf 4-5 menjelaskan bahwa proses pemberian sanksi berdasarkan hasil audit internal, serta menyampaikan rencana lanjutan berupa pencabutan lisensi lembaga 141rgume.
Struktur Retoris		Paragraf 6 memberikan konteks bahwa langkah tegas ini diambil demi menjaga integritas tata ruang dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Hubungan antar paragraf bersifat argumentative dan kronologis, mendukung narasi penegakan disiplin internal di lembaga negara. Dalam menulis artikel berita, penulis menyisipkan dokumentasi wawancara Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai visual pendukung dalam bahasan berita.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Struktur ini di artikel ini dibangun dengan pola berita langsung dan formal. Judulnya menyampaikan informasi utama secara lugas dan faktual, menyoroti tindakan tegas dari Menteri ATR/BPN terhadap delapan pegawai

terkait kasus pagar laut di pesisir Tangerang. Lead langsung mengarahkan pembaca pada pernyataan inti: pemberian sanksi oleh Menteri ATR/BPN kepada delapan pegawai atas pelanggaran dalam penerbitan sertifikat. Latar informasi menguatkan posisi berita dengan menempatkan kasus ini dalam konteks konflik agraria dan tata ruang yang berdampak pada masyarakat pesisir. Kutipan langsung dan tidak langsung dari Nusron Wahid digunakan untuk memperjelas bentuk sanksi dan proses audit investigatif yang mendasarinya. Tidak ditemukan opini dari jurnalis dalam penyusunan artikel ini. Penutup menguatkan narasi dengan menekankan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban administratif dan pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan pertanahan. Dengan demikian, dari judul hingga penutup, struktur artikel menunjukkan kesinambungan isi yang kuat, tegas, dan terfokus.

## 2. Struktur Skrip

Struktur 5W1H dalam berita ini disampaikan secara utuh dan jelas. *What* yang dibahas adalah pemberian sanksi berat ke 8 pegawai ATR/BPN akibat pelanggaran dalam penerbitan sertifikat tanah. *Where* berlokasi di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten. *When* dijelaskan terjadi pada tanggal 30 Januari 2025. *Who* melibatkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai pengambil keputusan, delapan pegawai yang disanksi, dan lembaga survei swasta yang direkomendasikan untuk dicabut lisensinya. *Why* terjadi karena adanya pelanggaran prosedural dalam survei dan sertifikasi tanah di kawasan yang semestinya tidak boleh disertifikasi. *How* disampaikan melalui proses audit investigasi internal yang diikuti dengan penjatuhan sanksi administratif serta tindakan terhadap pihak ketiga. Semua unsur ini saling melengkapi dan membuat struktur pemberitaan menjadi solid dan mudah dipahami.

## 3. Struktur Tematik

Secara tematik, artikel ini dibangun secara runtut serta progresif. Paragraf 1–2 membahas inti peristiwa: keputusan pemecatan dan sanksi terhadap

delapan pegawai. Paragraf 3 mengarahkan pada keterlibatan pihak swasta dalam pengukuran lahan. Paragraf 4–5 menyajikan proses investigasi internal sebagai dasar sanksi dan mengarah pada rekomendasi pencabutan lisensi terhadap lembaga survei. Paragraf 6 berperan sebagai penutup yang memberikan kerangka makro, yaitu bahwa tindakan ini merupakan bagian dari reformasi dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan ruang pesisir. Hubungan antarparagraf bersifat kronologis dan argumentatif, memperkuat narasi mengenai langkah disipliner kelembagaan. Berdasarkan penyajian tersebut, berita ini tergolong dalam *framing* tematik karena membingkai isu secara menyeluruh dan sistemik—yakni tentang pembenahan kebijakan dan integritas lembaga, bukan sekadar menyoroti kejadian atau tokoh secara episodik.

#### 4. ● Struktur Retoris

Retorika dalam artikel ini dibangun melalui struktur bahasa yang cenderung formal, netral, dan berorientasi pada fakta. Penulis tidak menampilkan opini atau nada emosional dalam narasinya, melainkan berpegang pada prinsip-prinsip jurnalisme institusional yang memprioritaskan kejelasan sumber dan keakuratan informasi. Hal ini tampak dari bagaimana berita disusun: ringkas, padat, dan langsung merujuk pada pokok pernyataan dari narasumber utama. Kutipan langsung dari Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menjadi elemen dominan dalam struktur retoris berita. Kutipan ini bukan hanya sekadar pelengkap, melainkan menjadi sumber utama legitimasi isi berita. Dalam kerangka kualitatif, pemilihan narasumber dari kalangan pejabat tinggi negara mencerminkan cara media memposisikan otoritas negara sebagai pusat kredibilitas informasi. Dengan demikian, berita tidak membangun narasi melalui metafora, simbol, atau idiom, melainkan melalui kehadiran tokoh kunci yang mewakili suara resmi pemerintah. Visualisasi dalam bentuk dokumentasi wawancara Menteri Nusron Wahid turut memperkuat pendekatan retoris tersebut. Dalam penelitian kualitatif, kehadiran gambar bukan hanya dinilai dari aspek estetika atau representasi isi, melainkan dari cara visual itu menegaskan

posisi kekuasaan dan membentuk persepsi publik atas legitimasi. Dalam kasus ini, gambar sang Menteri berfungsi sebagai penanda otoritas yang mengikat isi berita, sekaligus menunjukkan bahwa isu yang dibahas memiliki skala kepentingan nasional. Menariknya, walau berita ini tidak menyisipkan elemen retorik khas seperti gaya bahasa kiasan atau majas tertentu, kekuatan persuasinya justru terletak pada *kesederhanaan struktur* dan *kejelasan aktor*. Penulisan yang minim ornamen ini menunjukkan kehati-hatian media dalam menyampaikan isu yang bersinggungan dengan kebijakan pertanahan dan kewenangan negara. Dalam perspektif kualitatif, gaya seperti ini sering dipakai dalam pemberitaan kebijakan publik yang bersifat sensitif, agar tidak menimbulkan interpretasi ganda atau spekulasi. Secara keseluruhan, struktur retorik artikel ini mengandalkan kredibilitas tokoh, kesahihan kutipan, dan bahasa birokratis yang tertib. Tidak ada eksplorasi simbolik atau visual berlebihan, namun justru dalam ketertiban inilah retorika dibangun—melalui cara media menampilkan informasi sebagai suara institusi yang tegas, sah, dan tidak terbantahkan.

#### **4.2.18. Analisis Artikel Berita 8 Beritabanten.com**

Judul : TNI AL Terus Pembersihan Pagar Bambu Laut Tangerang, 22,5 Kilometer Telah Bersih

Sumber : Beritabanten.com

Tanggal : 06 Februari

Ringkasan : Berita ini melaporkan perkembangan pembersihan pagar bambu yang menghalangi akses nelayan di wilayah laut Tangerang oleh TNI Angkatan Laut. Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama I Made Wira Arsanta Hadi, menyampaikan bahwa sepanjang 22,5 kilometer pagar bambu telah berhasil dibersihkan, terdiri dari 18,2 km di wilayah Tanjung Pasir dan 4,3 km di Kronjo. Proses pembersihan melibatkan 219 personel dari Pasmar 1, Lantamal III, serta Koarmada I, serta dukungan alutsista. Kendala utama yang dihadapi adalah cuaca buruk, gelombang tinggi, serta pagar bambu yang dipasang dua lapis. Meski proses

sempat tertunda, TNI AL tetap berkomitmen melanjutkan tugas ini sesuai perintah Presiden RI untuk menjamin akses laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Tabel 4.18. Analisis Artikel Berita 18 Beritabanten.com

<b>Perangkat Framing</b>	<b>Unit Pengamatan</b>	<b>Hasil Pengamatan</b>
Struktur Sintaksis	Judul	TNI AL Terus Pembersihan Pagar Bambu Laut Tangerang, 22,5 Kilometer Telah Bersih
	Lead	Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksma TNI I Made Wira Arsanta Hadi, mengungkapkan bahwa 22,5 kilometer wilayah laut Tangerang telah berhasil dibersihkan dari pagar bambu yang membentang dari Kecamatan Tanjung Pasir hingga Kronjo, Kabupaten Tangerang.
	Latar Informasi	Latar belakang dari berita ini berkaitan dengan 145okasi145 pagar bambu yang dipasang secara 145okasi145 di perairan Kab. Tangerang. Pagar-pagar tersebut tidak hanya mengganggu akses nelayan dalam mencari nafkah, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial serta dugaan pelanggaran terhadap prinsip pengelolaan ruang laut. Pemerintah melalui Presiden RI dan TNI AL merespons persoalan ini dengan tindakan langsung berupa pembongkaran pagar yang telah menguasai ruang 145okasi secara tidak sah. Upaya pembersihan ini merupakan bagian dari langkah strategis negara dalam menjaga keamanan wilayah perairan dan memastikan akses laut tetap terbuka untuk masyarakat umum, khususnya nelayan tradisional.
	Kutipan	<p>Kutipan langsung:</p> <p>“Rinciannya, 18,2 kilometer di Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, dan 4,3 kilometer di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang,” ujar Wira</p> <p>“Pagi ini tidak dilaksanakan karena terkendala cuaca, namun jika ada perkembangan lebih lanjut, kami akan memberikan informasi,” kata Wira.</p> <p>“Kami mengerahkan 219 personel dari Pasmal 1, Lantamal III dan Koarmada I serta alutsista seperti Kapal Patroli Keamanan Laut (Patkamla), perahu karet, RBB dan RHIB,” jelasnya. (Wira)</p> <p>“Gelombang laut yang tinggi, angin kencang dan keterbatasan daya tarik kapal menjadi tantangan besar. Selain itu, banyak pagar bambu yang dipasang dua lapis, serta keramba apung yang tertancap di sekitar pagar bambu turut menghambat proses pembongkaran,” ungkapnya.(Wira)</p> <p>Kutipan tidak langsung:</p> <p>Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksma TNI I Made Wira Arsanta Hadi, mengungkapkan bahwa 22,5 kilometer wilayah laut Tangerang telah berhasil dibersihkan dari pagar bambu yang</p>

		<p>membentang dari Kecamatan Tanjung Pasir hingga Kronjo, Kabupaten Tangerang.</p> <p>Meski demikian, Wira menjelaskan bahwa pelaksanaan pembersihan pagar bambu laut pada hari ini kembali tertunda karena faktor cuaca buruk di perairan Kabupaten Tangerang.</p> <p>Namun, Wira mengakui ada berbagai kendala dalam proses pembersihan.</p> <p>Meski demikian, Wira menegaskan bahwa TNI AL berkomitmen untuk terus berusaha maksimal dalam menyelesaikan pembongkaran pagar bambu ini, sesuai dengan perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto, demi memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.</p> <p>Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksma TNI I Made Wira Arsanta Hadi</p>
	Sumber	Tidak Ada
	Pernyataan Opini Penutup	Meski demikian, Wira menegaskan bahwa TNI AL berkomitmen untuk terus berusaha maksimal dalam menyelesaikan pembongkaran pagar bambu ini, sesuai dengan perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto, demi memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Pembersihan pagar bambu sepanjang 22,5 kilometer di laut Tangerang yang mengganggu aktivitas masyarakat pesisir.
	<i>Where</i>	Kecamatan Tanjung Pasir dan Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten.
	<i>When</i>	Proses berlangsung hingga 6 Februari (meski sebagian sempat tertunda karena cuaca).
	<i>Who</i>	Dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut melalui komando Laksma TNI I Made Wira Arsanta Hadi, dengan dukungan 219 personel.
	<i>Why</i>	Karena pagar bambu menghalangi akses masyarakat ke laut, dan pembongkaran dilakukan atas perintah Presiden untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan warga pesisir.
Struktur Tematik	<i>How</i>	Menggunakan kekuatan personel dari beberapa satuan TNI AL dan berbagai alutsista laut; namun dihadapkan pada kendala cuaca ekstrem dan struktur pagar yang rumit.
	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	Paragraf 1-2 menjelaskan hasil pencapaian sementara pembersihan pagar oleh TNI AL dan 146okasi geografis yang menjadi fokus tindakan.
		Paragraf 3 menguraikan kekuatan personel dan peralatan militer yang digunakan.
		Paragraf 4 membahas kendala di lapangan seperti cuaca buruk dan struktur pagar yang kompleks.
		Paragraf 5 mempertegas komitmen TNI AL untuk terus melanjutkan proses pembersihan demi keamanan laut dan kesejahteraan nelayan.

Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Gambar yang digunakan penulis dalam artikel ini merupakan dokumentasi anggota AL dalam pengoperasian pembersihan Pagar laut di Kabupaten Tangerang tersisa 7,66 Kilometer.
------------------	-----------------------------	--

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Struktur ini di artikel ini tersusun rapi dari judul hingga penutup dengan gaya penulisan yang khas berita faktual. Judul “TNI AL Terus Pembersihan Pagar Bambu Laut Tangerang, 22,5 Kilometer Telah Bersih” secara langsung mengungkapkan inti informasi, yakni keberhasilan TNI AL dalam membersihkan sebagian besar pagar bambu yang mengganggu akses laut.

Lead berita langsung menampilkan pernyataan resmi dari Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksma TNI I Made Wira Arsanta Hadi, mengenai panjang wilayah yang telah dibersihkan. Latar informasi menjelaskan bahwa pagar bambu tersebut sebelumnya menimbulkan polemik karena menghalangi nelayan dan diduga melanggar prinsip ruang laut publik. Kutipan langsung dari narasumber memperinci data teknis seperti lokasi, panjang pagar, jumlah personel, hingga kendala yang dihadapi. Sementara kutipan tidak langsung menekankan komitmen institusional terhadap keberlanjutan tugas. Tidak ditemukan opini atau interpretasi dari jurnalis dalam narasi artikel. Penutup menggarisbawahi bahwa pembersihan ini adalah amanat Presiden RI dan merupakan bagian dari misi negara untuk memastikan akses dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

### 2. Struktur Skrip

Struktur ini dalam artikel ini sudah memenuhi semua unsur 5W1H secara utuh serta terpadu dalam narasi. Peristiwa yang dilaporkan adalah upaya pembersihan pagar bambu di laut Tangerang yang dilakukan oleh TNI AL, sebagai bagian dari operasi resmi berdasarkan perintah Presiden RI. Lokasi kegiatan dijelaskan dengan rinci, yakni di Kecamatan Tanjung Pasir dan Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Waktu pelaksanaan tercatat hingga tanggal 6 Februari, meskipun beberapa bagian kegiatan sempat tertunda akibat cuaca buruk. Pelaku utama adalah TNI Angkatan Laut

dengan komando langsung dari Laksma TNI I Made Wira Arsanta Hadi dan melibatkan 219 personel dari Pasmar 1, Lantamal III, serta Koarmada I. Tujuan dari operasi ini adalah untuk menghilangkan hambatan akses laut yang mengganggu aktivitas masyarakat pesisir dan berpotensi melanggar hukum tata ruang laut. Adapun proses teknis pembersihan dilakukan menggunakan kapal patroli, perahu karet, dan alutsista lainnya, sambil menghadapi tantangan di lapangan seperti gelombang tinggi, angin kencang, dan struktur pagar bambu yang dipasang dua lapis. Seluruh unsur ini membentuk narasi yang solid dan menyeluruh mengenai latar, aktor, dan dinamika aksi yang berlangsung.

### 3. Struktur Tematik

Struktur tematik di artikel ini disusun berdasarkan urutan kronologis dan proposisional yang logis. Paragraf pertama dan kedua menjelaskan capaian teknis TNI AL dalam membersihkan pagar bambu serta memperinci lokasi-lokasi yang sudah dibersihkan. Paragraf ketiga berisi uraian tentang personel dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan pembersihan, menggambarkan skala operasi militer yang dilibatkan. Paragraf keempat membahas berbagai tantangan teknis dan alamiah yang dihadapi, seperti cuaca ekstrem dan pagar dua lapis. Paragraf kelima mempertegas bahwa meski mengalami hambatan, TNI AL tetap berkomitmen melanjutkan operasi ini sesuai mandat Presiden RI. Hubungan antarparagraf menunjukkan kesinambungan isi dan mendukung narasi kebijakan nasional dalam menjaga wilayah publik. Maka itu, artikel ini termasuk ke dalam *framing* tematik, karena menyoroti upaya institusional dan kebijakan struktural negara secara menyeluruh, alih-alih berfokus pada kejadian satu kali atau individu tertentu seperti dalam *framing* episodik.

### 4. Struktur Retoris

Retorika dalam artikel ini dibentuk melalui pendekatan yang dominan informatif, dengan pilihan gaya bahasa yang cenderung formal dan institusional. Penulis tidak menggunakan gaya bahasa yang metaforis atau

idiomatik, melainkan menyusun narasi berdasarkan fakta lapangan dan kutipan langsung dari pejabat militer, dalam hal ini TNI AL. Penyusunan struktur kalimat yang singkat dan jelas mencerminkan karakter berita jenis *straight news*, yang lebih menekankan pelaporan peristiwa tanpa embel-embel opini atau muatan emosional. Dari sudut pandang kualitatif, artikel ini memperlihatkan cara media membingkai tindakan pembersihan pagar laut sebagai proses yang sah dan terkoordinasi, bukan sekadar pelaporan kejadian teknis. Keputusan untuk menjadikan pejabat TNI AL sebagai sumber utama memperlihatkan bagaimana media membangun otoritas informasi melalui lembaga militer yang diasosiasikan dengan kedisiplinan, ketegasan, dan legitimasi hukum. Kutipan langsung dari pejabat tersebut berfungsi tidak hanya sebagai penjelas teknis, tetapi juga sebagai jaminan bahwa proses yang dilaporkan berlangsung di bawah kendali dan pengawasan resmi negara. Elemen visual berupa dokumentasi operasi pembersihan di lokasi berperan sebagai penguat dimensi retorik artikel ini. Di penelitian kualitatif, visual tidak hanya dilihat sebagai pelengkap, melainkan sebagai bagian dari konstruksi makna. Gambar yang menampilkan aktivitas nyata pembersihan pagar laut oleh anggota TNI AL menyiratkan pesan yang bersifat formatif bahwa negara tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak. Visual tersebut mengkomunikasikan keseriusan, keterlibatan langsung aparat, serta skala teknis dari pekerjaan yang sedang dilakukan (7,66 kilometer pagar yang tersisa). Dengan demikian, struktur retorik berita ini terbangun dari tiga elemen utama: gaya bahasa netral dan birokratis, kutipan resmi sebagai otoritas makna, serta visualisasi tindakan di lapangan. Ketiganya berfungsi secara sinergis untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses hukum dan administratif yang sedang berlangsung. Tidak ada upaya untuk menggiring opini atau menciptakan efek emosional pada pembaca; sebaliknya, kekuatan retoriknya justru terletak pada kesederhanaan dan keterbukaan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa media menempatkan dirinya sebagai penyampai proses negara yang dapat diverifikasi dan tidak sensasional.

#### 4.2.19. Analisis Artikel Berita 19 Beritabanten.com

Judul : Kades Kohod Diduga Raup Rp23,2 Miliar... Mengaku Jadi Korban Penipuan

Sumber : Beritabanten.com

Tanggal : 18 Februari 2025

Ringkasan : Berita ini mengangkat kasus dugaan keterlibatan Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, dalam kasus Pagar Laut Misterius di Kab. Tangerang. Arsin diduga mendapat keuntungan sebesar Rp23,2 miliar dari praktik penerbitan surat kepemilikan tanah yang berujung pada terbitnya sertifikat SHGB/SHM di kawasan laut. Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH PP Muhammadiyah, Gufroni, menyatakan bahwa kasus ini telah dilaporkan ke Bareskrim Polri karena diduga melibatkan pemalsuan dokumen oleh Arsin dan oknum lainnya. Namun, Arsin melalui kuasa hukumnya membantah tuduhan tersebut dan mengklaim sebagai korban penipuan oleh 2 mafia tanah berinisial SP dan C. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kekeliruan tersebut dan berjanji untuk mengevaluasi tata kelola desa agar kasus serupa tidak terulang.

Tabel 4.19. Analisis Artikel Berita 19 Beritabanten.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Kades Kohod Diduga Raup Rp23,2 Miliar... Mengaku Jadi Korban Penipuan
	Lead	Kades Kohod, Pakuhaji, Kab. Tangerang, Arsin bin Asip diduga memperoleh keuntungan sebesar Rp23,2 miliar dari kasus Pagar Laut Misterius yang menghebohkan publik.
	Latar Informasi	Latar informasi dalam berita ini berasal dari kontroversi berkepanjangan mengenai pemasangan pagar laut di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang. Akar persoalan bermula dari penerbitan sertifikat atas kawasan perairan yang semestinya termasuk ruang publik atau common property. Dalam proses penyelidikan, muncul nama Kepala Desa Kohod yang diduga menerima keuntungan besar dari pemrosesan dokumen yang mendasari penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan pelanggaran ini menyeret isu hukum, korupsi, dan mafia tanah. Masyarakat pun mempertanyakan transparansi dan integritas aparat desa dalam mengelola aset dan ruang wilayah. Dalam konteks ini, kasus Arsin menjadi

salah satu potret peran pemerintah desa dalam konflik ruang laut yang lebih luas.

Kutipan

Kutipan langsung:

1. “Totalnya mencapai Rp23,2 miliar, dengan perhitungan Rp20 ribu/meter dikali 116 hektare,” ujar Gufroni
2. “Pak Arsin ini hanya korban dari ketidaktahuannya dan tidak hati-hati dalam memproses dokumen tanah,” ujar Yunihar.
3. “Ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan dan kehati-hatian saya dalam mengeluarkan surat kepemilikan tanah,” kata Arsin.
4. “Saya meminta maaf atas kekeliruan ini, baik secara pribadi maupun sebagai kepala desa, kepada warga Desa Kohod dan masyarakat Indonesia,” tutupnya. (Arsin)

Kutipan tidak langsung:

1. Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHPP Muhammadiyah, Gufroni, mengungkapkan bahwa Arsin bin Asip mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500 per meter di awal, dan setelah penerbitan SHGB/SHM, dia menerima Rp20.000 per meter.
2. Gufroni menambahkan, pihaknya telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri pada Jumat, 17 Januari 2025 lalu. Kasus ini diduga melibatkan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Arsin bersama sejumlah oknum, yang diduga bersekongkol untuk memperoleh keuntungan melalui pemalsuan sertifikat tanah.
3. Namun, Arsin bin Asip melalui kuasa hukumnya, Yunihar, membantah tuduhan tersebut. Ia mengklaim bahwa kliennya menjadi korban dalam kasus ini, karena telah ditipu oleh dua mafia tanah yang berinisial SP dan C.
4. Arsin bin Asip sendiri mengaku menjadi korban dalam kasus Pagar Laut tersebut. Dalam klarifikasinya pada Sabtu (15/2/25), ia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi akibat penerbitan SHGB/SHM tersebut.
5. Arsin berjanji bahwa kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi internal bagi perangkat Desa Kohod, agar hal serupa tidak terulang di masa depan.

Sumber

Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH PP Muhammadiyah, Gufroni

Pernyataan Opini

Tidak Ada

Penutup

Arsin berjanji bahwa kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi internal bagi perangkat Desa

Struktur Skrip	<i>What</i>	Kohod, agar hal serupa tidak terulang di masa depan. “Saya meminta maaf atas kekeliruan ini, baik secara pribadi maupun sebagai kepala desa, kepada warga Desa Kohod dan masyarakat Indonesia,” tutupnya. dugaan keterlibatan Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, dalam kasus penipuan dan pemalsuan dokumen terkait penerbitan SHGB/SHM di 152elola152 laut.
	<i>Where</i> <i>When</i>	Desa Kohod, Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang. Pelaporan kasus 17 Januari 2025 dan terungkap pada 18 Februari 2025
	<i>Who</i>	Arsin bin Asip sebagai tersangka, Ketua LBH PP Muhammadiyah Gufroni sebagai pelapor, serta dua mafia tanah yang disebut sebagai penipu.
	<i>Why</i>	Dugaan pemalsuan dokumen dan keuntungan pribadi yang diperoleh dari proses sertifikasi lahan laut.
	<i>How</i>	proses atau cara peristiwa ini berlangsung melibatkan penerbitan surat tanah oleh kepala desa, pengalihan hak, dan pembelaan dari pihak terlapor bahwa ia hanya menjadi korban penipuan.
Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	<p>Paragraf 1 berfungsi sebagai lead sekaligus eksposisi utama, yang langsung menyebutkan tokoh sentral, yaitu Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, serta tuduhan terhadapnya terkait penerimaan keuntungan sebesar Rp23,2 miliar. Kalimat pembuka memicu perhatian dengan angka besar dan menjelaskan bahwa tuduhan berkaitan dengan kasus “Pagar Laut Misterius”.</p> <p>Paragraf 2–3 berisi pemaparan lebih rinci dari pihak pelapor, yaitu Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH PP Muhammadiyah, Gufroni. Di sini disebutkan mekanisme dugaan aliran dana yang diperoleh Arsin dari pemrosesan sertifikat, yaitu Rp1.500 per meter pada tahap awal, dan Rp20.000 per meter setelah sertifikasi tanah. Gufroni juga menjelaskan bahwa kasus ini telah dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 17 Januari 2025 dan mengaitkannya dengan dugaan pemalsuan dokumen bersama sejumlah oknum.</p> <p>Paragraf 4–5 memuat klarifikasi dan pembelaan dari pihak Arsin. Disampaikan melalui kuasa hukumnya, Yunihar, bahwa Arsin hanyalah korban dari penipuan 2 orang mafia tanah berinisial SP dan C. Paragraf ini juga menyisipkan kutipan langsung dari Arsin yang mengakui kekeliruannya sebagai kepala desa dalam memproses dokumen, menunjukkan adanya pengakuan tanggung jawab secara moral meskipun ia menyangkal keterlibatan 152elola152p secara langsung.</p> <p>Paragraf 6 adalah 152elola152ph penutup yang menampilkan pernyataan maaf dari Arsin kepada masyarakat dan janji untuk melakukan evaluasi tata 152elola internal desa agar peristiwa serupa</p>

Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	tidak terulang. Paragraf ini mengandung pesan perbaikan sistem dan menyudahi narasi dengan nada reflektif dan preventif. Gambar yang disertakan oleh penulis menjadi pendukung aspek isi berita dan membantu pembaca untuk memahami kondisi dari wawancara pelaku.
------------------	-----------------------------	--

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Struktur ini di di artikel tersusun dengan pola eksposisi yang informatif dan seimbang. Judulnya memadukan unsur provokatif dan defensif: di satu sisi menyebutkan dugaan bahwa “Kepala Desa Kohod meraup keuntungan fantastis sebesar Rp23,2 miliar”, namun di sisi lain menyisipkan klaim pembelaan bahwa ia hanyalah “korban penipuan”. Lead artikel langsung menyebut tokoh utama, lokasi kejadian, serta jumlah uang yang menjadi sorotan publik. Latar informasi kemudian memperluas konteks tentang kontroversi pagar laut dan praktik pemalsuan dokumen. Artikel menyajikan kutipan langsung dari Ketua LBH PP Muhammadiyah Gufroni selaku pelapor, serta kutipan pembelaan dari kuasa hukum dan pernyataan pribadi Arsin. Kutipan tidak langsung juga digunakan untuk memperjelas alur kronologis dan isi laporan ke Bareskrim Polri. Tidak ada opini jurnalis ditemukan dalam artikel ini, yang membuat gaya penulisan tetap netral. Penutup berita menampilkan permintaan maaf Arsin dan janji perbaikan tata kelola desa, sehingga artikel ini ditutup dengan pesan korektif yang memberi ruang tanggung jawab moral dari pihak yang dilaporkan.

### 2. Struktur Skrip

Peristiwa yang menjadi fokus adalah dugaan keterlibatan Arsin bin Asip dalam kasus pemalsuan dokumen dan alih fungsi lahan laut melalui penerbitan SHGB/SHM. Lokasi kejadian ada di Desa Kohod, Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang. Waktu pelaporan kasus tercatat pada 17 Januari 2025, sedangkan pernyataan klarifikasi dan permintaan maaf dari Arsin dipublikasikan pada 15 Februari 2025. Tokoh utama yang terlibat adalah Arsin sebagai terlapor, Gufroni dari LBH PP Muhammadiyah sebagai

pelapor, dan dua mafia tanah berinisial SP dan C sebagai pihak yang disebut menipu Arsin. Alasan pelaporan adalah dugaan pemalsuan dokumen tanah untuk memperoleh keuntungan pribadi. Proses atau cara kejadiannya melibatkan penerbitan surat kepemilikan lahan oleh kepala desa, pengalihan hak, serta pembelaan dari pihak Arsin bahwa ia tertipu dan tidak menyadari konsekuensi hukumnya. Struktur ini mengalir dengan baik dan memenuhi kaidah jurnalistik dasar.

### 3. Struktur Tematik

Struktur ini di artikel ini dibagi ke enam paragraf yang saling berkaitan dan membentuk rangkaian narasi yang lengkap. Paragraf pertama berfungsi sebagai pembuka (lead) yang menyebut tokoh sentral, dugaan keuntungan, dan kaitan kasus dengan isu pagar laut. Paragraf kedua dan ketiga menjabarkan data serta proses dugaan aliran dana yang diperoleh Arsin menurut versi pelapor, lengkap dengan perhitungan meter persegi dan besaran nilai rupiah yang diterima. Di bagian ini pula, kronologi pelaporan ke Bareskrim dan dugaan pemalsuan dokumen dijelaskan. Paragraf keempat dan kelima berisi pembelaan dari Arsin melalui kuasa hukumnya, yang menyebut bahwa Arsin menjadi korban dari mafia tanah. Terdapat pula pengakuan dari Arsin bahwa ia lalai dan tidak teliti dalam mengeluarkan surat tanah. Paragraf keenam sebagai penutup menyampaikan permintaan maaf Arsin dan komitmennya untuk melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Dengan susunan ini, terlihat bahwa struktur paragraf saling berhubungan secara kronologis dan argumentatif. Artikel ini jelas tergolong dalam *framing* tematik, karena membingkai kasus dalam konteks yang luas: dari dugaan pelanggaran administratif dan pidana, hingga tanggung jawab sosial dan kelembagaan dalam pengelolaan ruang publik.

### 4. Struktur Retoris

Dalam artikel ini, aspek retorik dibangun melalui pendekatan yang mengutamakan keseimbangan antara narasi teks dan representasi visual. Gaya bahasa yang digunakan oleh jurnalis bersifat formal serta langsung,

tanpa penyisipan idiom, metafora, atau bentuk bahasa kiasan yang bersifat emosional. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga jarak objektif terhadap kasus yang dilaporkan sebuah pendekatan yang lazim ditemukan dalam genre berita hukum atau investigatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan kita membaca lebih dalam bahwa kutipan langsung yang digunakan dalam artikel bukan hanya sekadar menyampaikan pernyataan narasumber, tetapi juga berperan sebagai alat representasi kekuasaan dan kepentingan. Dengan menghadirkan suara dari kedua belah pihak, baik pelapor ataupun terlapor. Penulis membentuk struktur retorik yang terkesan adil dan tidak memihak. Narasi dibangun secara simetris, tidak mendominasi opini tertentu, melainkan membuka ruang bagi pembaca untuk menyusun penilaian sendiri terhadap konflik yang dilaporkan. Kutipan dari tokoh-tokoh seperti Ketua LBH PP Muhammadiyah dan kepala desa tidak hanya memperkuat kredibilitas isi, tetapi juga memperlihatkan keterlibatan aktor-aktor sosial yang memiliki otoritas atau peran kunci dalam isu tersebut. Di sinilah media menjalankan fungsi representatif, yakni mewakili suara publik dan lembaga dalam peristiwa yang sedang dibicarakan. Elemen visual yang ditampilkan dalam bentuk dokumentasi wawancara atau konferensi pers juga memegang peran penting dalam membentuk kesan otentik atas isi berita. Dalam analisis kualitatif, visual bukan hanya sebagai pelengkap narasi, tetapi sebagai bagian dari retorika itu sendiri, karena ia memiliki kemampuan membangun persepsi kehadiran langsung. Dengan menunjukkan konteks wawancara, gambar tersebut memberi kesan bahwa informasi yang disampaikan tidak bersifat spekulatif, melainkan berasal dari proses peliputan aktual yang dapat diverifikasi. Gambar berfungsi sebagai bukti kontekstual atas keberadaan para aktor yang berbicara dalam teks. Dengan demikian, struktur retorik artikel ini memadukan tiga unsur penting: gaya bahasa yang netral dan lugas, kutipan langsung dari tokoh-tokoh dengan kredibilitas publik, serta visualisasi dokumentatif yang memperkuat representasi faktual. Pendekatan ini memperlihatkan bahwasanya media tidak hanya memberi informasi, tetapi juga menyusun kredibilitas melalui strategi representasi yang sadar

terhadap etika peliputan. Artikel ini tidak emosional, tetapi tetap komunikatif; tidak berpihak, tetapi tetap bernilai informatif dan bermakna secara sosial.

#### 4.2.20. Analisis Artikel Berita 20 Beritabanten.com

Judul : SHGB Kawasan Pagar Laut Tangerang Milik Aguan Dicaput? Ini Penjelasan Menteri ATR/BPN

Sumber : Beritabanten.com

Tanggal : 23 Februari 2025

Ringkasan : Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengenai kabar yang menyebutkan bahwasanya dirinya membatalkan pencabutan SHGB milik Aguan di kawasan pagar laut Tangerang. Nusron membantah informasi tersebut dan menegaskan bahwa kebijakan pembatalan sertifikat tanah di luar garis pantai tetap dijalankan tanpa terkecuali. Ia menyatakan bahwa 209 sertifikat sudah resmi dibatalkan, dan proses penertiban akan terus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak bergantung pada siapa pemilik sertifikat. Ia juga menjelaskan bahwa hanya SHGB yang benar-benar ada di garis pantai dan mempunyai keabsahan hukum yang tidak akan dibatalkan.

Tabel 4.20. Analisis Artikel Berita 20 Beritabanten.com

<b>Perangkat Framing</b>	<b>Unit Pengamatan</b>	<b>Hasil Pengamatan</b>
Struktur Sintaksis	Judul	SHGB Kawasan Pagar Laut Tangerang Milik Aguan Dicaput? Ini Penjelasan Menteri ATR/BPN
	Lead	Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa berita mengenai batalnya pencabutan SHGB di kawasan Pagar Laut, Kabupaten Tangerang adalah tidak benar.
	Latar Informasi	Latar belakang dari artikel ini adalah beredarnya isu di publik dan media sosial bahwa pemerintah, khususnya Menteri ATR/BPN, membatalkan pencabutan SHGB milik Aguan, seorang tokoh pengusaha yang diduga terlibat dalam kepemilikan sertifikat lahan laut di Tangerang. Isu ini berkembang seiring dengan proses penertiban pagar laut dan pembatalan ratusan sertifikat yang telah dilakukan oleh pemerintah. Dalam situasi yang sensitif ini, Nusron Wahid memberi klarifikasi untuk meluruskan informasi yang keliru serta menegaskan komitmen

kementeriannya dalam menjalankan reformasi pertanahan secara adil dan konsisten.

Kutipan

Kutipan langsung:

1. “Berita yang menyebut saya batal mencabut SHGB milik Pak Aguan di pinggir Pantai Tangerang itu tidak benar,” ujar Nusron
2. “Kebijakannya jelas, semua SHGB yang ada di luar garis pantai akan dibatalkan. Saat ini, sudah ada 209 sertifikat yang resmi dibatalkan,” tegas Nusron.
3. “Jika memang SHGB berada dalam garis pantai dan pemiliknya sah, maka tidak akan dibatalkan. Namun, jika ditemukan pelanggaran, maka sertifikat tersebut tetap akan dicabut,” pungkasnya.

Kutipan tidak langsung:

1. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa berita mengenai batalnya pencabutan SHGB di kawasan Pagar Laut, Kabupaten Tangerang adalah tidak benar.
2. Ia menjelaskan bahwa kebijakan pembatalan sertifikat tanah tetap berjalan sesuai rencana, terutama untuk SHGB yang berada di luar garis pantai. Menurutnya, keputusan ini tidak dipengaruhi oleh siapa pemilik sertifikat tersebut.
3. Nusron juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan 157 awasan pagar laut ini dengan adil dan transparan.

Sumber  
Pernyataan Opini  
Penutup

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid  
Tidak Ada

Nusron juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan 157 awasan pagar laut ini dengan adil dan transparan. “Jika memang SHGB berada dalam garis 157 awasa dan pemiliknya sah, maka tidak akan dibatalkan. Namun, jika ditemukan pelanggaran, maka sertifikat tersebut tetap akan dicabut,” pungkasnya.

Struktur Skrip

*What*

klarifikasi dari Menteri ATR/BPN mengenai isu batalnya pencabutan SHGB di 157 awasan pagar laut Tangerang

*Where*

Pesisir, Kab. Tangerang, Banten.

*When*

23 Februari 2025

*Who*

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan pemilik SHGB

*Why*

Alasan klarifikasi disampaikan karena muncul kabar simpang siur yang menuduh Nusron menarik kembali keputusan pembatalan SHGB. Klarifikasi pembatalan dilakukan secara legal, bertahap, dan berdasarkan posisi sertifikat terhadap garis 157 awasa. Jika berada di luar garis 157 awasa, akan dicabut; jika berada di dalam dan

*How*

Struktur Tematik	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	<p>sah, maka tetap diakui. Semua unsur skrip terhubung erat dan tersampaikan dengan baik.</p> <p>Paragraf 1-2 berfungsi sebagai pengantar dan klarifikasi awal, di mana Nusron membantah tuduhan bahwa ia membatalkan pencabutan SHGB milik Aguan.</p>
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	<p>Paragraf 3-5 memuat kutipan langsung Nusron yang menjelaskan kebijakan resmi kementeriannya terkait pembatalan SHGB, yaitu berlaku untuk semua sertifikat di luar garis 158awasa, tanpa melihat siapa pemiliknya. Ia juga menegaskan bahwa proses ini akan dilanjutkan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.</p> <p>Paragraf 6 mempertegas bahwa langkah hukum akan terus berjalan secara adil dan transparan. Hubungan antarparagraf bersifat progresif dan memperkuat posisi institusional.</p> <p>Artikel juga disertai dengan dokumentasi visual berupa foto Nusron Wahid sedang memberikan pernyataan, yang berfungsi memperkuat kredibilitas sumber dan membangun 158awas transparansi. Visual ini berperan sebagai elemen retoris pendukung untuk meyakinkan 158awasa bahwa klarifikasi disampaikan secara resmi. Retorika keseluruhan mengedepankan otoritas dan konsistensi kebijakan negara dalam menangani konflik pertanahan, khususnya di 158awasan pesisir.</p>

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Judul artikel mengangkat dua sisi isu yang kontras dugaan pencabutan “SHGB milik Aguan dan klarifikasi langsung dari Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.” Judul dengan bentuk pertanyaan dan pernyataan menciptakan ketegangan awal dan menarik pembaca untuk mengetahui fakta sebenarnya. Lead langsung memuat pernyataan Nusron Wahid yang membantah kabar bahwa dirinya membatalkan pencabutan SHGB tersebut, sekaligus menegaskan posisi resminya. Latar informasi menjelaskan konteks kemunculan isu di tengah proses penertiban sertifikat di wilayah pagar laut Tangerang, yang menyangkut figur publik dan kebijakan pertanahan nasional. Kutipan langsung dari Nusron digunakan untuk menyampaikan isi kebijakan dengan tegas, sementara kutipan tidak

langsung mendukung pernyataan tersebut dalam bentuk penjelasan ulang yang menyeluruh. Penutup artikel memperkuat komitmen institusional dalam menyelesaikan konflik agraria secara adil dan tidak diskriminatif. Tidak ditemukan opini dari penulis, yang menandakan bahwa artikel disusun dengan pendekatan jurnalistik objektif tanpa campur tangan interpretasi subjektif.

## 2. **Struktur Skrip**

Peristiwa utama yang diberitakan adalah klarifikasi dari Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terhadap isu simpang siur tentang pencabutan SHGB milik Aguan di kawasan pagar laut Tangerang. Lokasi peristiwa adalah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Waktu pernyataan berlangsung pada 23 Februari 2025. Pelaku atau tokoh utama yang terlibat dalam peristiwa adalah Nusron Wahid sebagai pejabat kementerian yang bertanggung jawab atas kebijakan pertanahan, dan Aguan sebagai nama yang muncul dalam polemik kepemilikan SHGB. Alasan pernyataan ini muncul adalah karena beredarnya informasi publik bahwa pemerintah membatalkan proses pencabutan sertifikat milik tokoh tertentu, yang dinilai kontraproduktif terhadap upaya reformasi pertanahan. Adapun cara atau proses klarifikasi dilakukan melalui pernyataan resmi, disertai data bahwa sebanyak 209 sertifikat sudah resmi dibatalkan dan bahwa kebijakan ini tetap akan dijalankan tanpa memandang siapa pemilik lahan. Semua elemen 5W1H saling terhubung dalam teks secara jelas dan informatif.

## 3. **Struktur Tematik**

Struktur ini di artikel ini terbagi secara runtut serta progresif antarparagraf. Paragraf pertama dan kedua berfungsi sebagai pengantar isu serta tempat klarifikasi awal dari Nusron Wahid yang membantah pembatalan pencabutan SHGB. Paragraf-paragraf selanjutnya, khususnya paragraf ketiga hingga kelima, menyampaikan kutipan langsung dari Nusron yang menjelaskan kebijakan pertanahan secara substansial, yakni bahwa semua SHGB di luar garis pantai akan dicabut tanpa terkecuali, termasuk yang

dimiliki tokoh terkenal sekalipun. Pernyataan ini menekankan keadilan dan kesetaraan hukum. Paragraf terakhir mempertegas bahwa proses hukum dan administratif akan tetap berjalan secara objektif dan transparan. Hubungan antarparagraf saling memperkuat dan mendukung proposisi utama bahwa kebijakan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi. Berdasarkan isi dan pendekatan ini, artikel tergolong ke dalam *framing* tematik, karena membingkai isu dalam konteks kebijakan publik yang sistemik dan berorientasi pada prinsip hukum, bukan sebagai kisah individual atau insidental seperti dalam *framing* episodik.

#### 4. Struktur Retoris

Artikel ini menyusun struktur retorisnya melalui kombinasi antara gaya bahasa yang formal dan penggunaan visual yang secara strategis memperkuat otoritas narasumber. Tidak ada penggunaan idiom, metafora, atau gaya bahasa kiasan lainnya yang bersifat emosional; hal ini mencerminkan niat penulis untuk menyampaikan informasi secara faktual dan netral. Gaya penulisan yang digunakan selaras dengan genre *hard news* yakni, fokus pada peristiwa resmi, kebijakan negara, dan pernyataan dari tokoh berwenang. Dalam konteks kualitatif, kekuatan retorik dari artikel ini terletak bukan hanya pada pilihan kata atau struktur kalimat, tetapi juga pada bagaimana media membingkai kehadiran aktor negara secara simbolik dan visual. Penyisipan foto Nusron Wahid saat memberikan pernyataan publik bukan sekadar pelengkap narasi, melainkan bagian dari strategi simbolik yang digunakan untuk memperkuat citra transparansi, legalitas, dan keseriusan negara dalam menangani persoalan pertanahan. Gambar tersebut memvisualisasikan peran negara sebagai aktor dominan dan menekankan bahwa pernyataan yang disampaikan bukan bersifat opini pribadi, melainkan bagian dari sikap resmi kelembagaan. Secara retorik, kehadiran visual ini menegaskan bahwa proses klarifikasi berlangsung dalam ruang yang dapat diverifikasi publik bukan tertutup, bukan spekulatif. Hal ini memperlihatkan bagaimana media tidak hanya melaporkan informasi, tetapi juga membangun kredibilitas melalui penempatan visual

sebagai alat persuasif non-verbal. Sementara itu, penggunaan kutipan langsung dari Nusron Wahid juga menunjukkan bagaimana retorika formal dalam pemberitaan kebijakan publik bekerja. Kutipan tersebut tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menyiratkan otoritas, kejelasan kebijakan, dan konsistensi sikap negara. Ini adalah strategi representasi yang menempatkan narasumber dalam posisi tak terbantahkan, sehingga mengarahkan pembaca pada persepsi bahwa persoalan yang dilaporkan telah ditangani melalui mekanisme resmi.

#### 4.3. Hasil Analisis *Framing* Kompas.com dan Beritabanten.com

Berlandaskan hasil ringkasan yang ditemukan peneliti dari artikel berita oleh media: nasional Kompas.com serta lokal Beritabanten.com yang membahas mengenai Kasus Pagar Laut Tangerang Pada Media Daring Kompas.com serta Beritabanten.com Periode Januari – Februari 2025. Dari analisis yang dilaksanakan peneliti melalui media nasional Kompas.com dan Beritabanten.com, media – media tersebut mempunyai sudut pandang dan cara yang berbeda untuk membingkai peristiwa yang terbagi atas 4 struktur, yakni struktur: skrip, sintaksis, tematik, serta retorik. Pembingkai pemberitaan dari media nasional dan media lokal tersebut dijelaskan dalam tabel, yakni sebagai berikut:

Tabel 4.21. Hasil Analisis *Framing* Kompas.com dan Beritabanten.com

Struktur	Kompas.com	Beritabanten.com
Struktur Sintaksis	Kompas.com menggunakan pola sintaksis yang mengedepankan struktur berita faktual dan institusional. Judul-judul berita cenderung menampilkan aktor institusi secara langsung, seperti “KKP Segel Pagar Laut di Tangerang” atau “Prabowo Perintahkan Pagar Laut Dicabut dan Diusut Tuntas.” Judul disusun dalam kalimat aktif yang menggambarkan tindakan formal negara. Lead berita berisi informasi penting mengenai tindakan resmi, waktu kejadian, dan latar belakang secara ringkas. Latar informasi dikembangkan dengan menekankan kronologi kejadian serta keterlibatan lembaga-lembaga	Beritabanten.com menyusun struktur sintaksis dengan pendekatan human interest yang lebih menekankan aspek afektif. Judul berita memuat unsur emosional, seperti “Nelayan Menangis, Laut Ditutup Pagar Misterius.” Lead berita biasanya diawali dengan penderitaan masyarakat atau keluhan langsung warga terdampak. Latar informasi berisi narasi dari nelayan, tokoh lokal, atau aktivis yang menggambarkan dampak sosial dari keberadaan pagar laut. Kutipan yang digunakan bersifat lokal dan reflektif terhadap kondisi warga. Sumber berita berasal dari warga

---

pemerintah. Kutipan yang digunakan sebagian besar berasal dari pejabat atau institusi formal, seperti KKP, TNI AL, hingga kementerian terkait. Tidak ditemukan opini subjektif penulis dalam narasi, yang menandakan keberpihakan media pada gaya penyampaian yang netral dan legalistik. Penutup berita seringkali menekankan langkah lanjutan atau komitmen pemerintah dalam menertibkan ruang laut, menutup narasi dengan posisi negara sebagai penyelesaian masalah.

pesisir atau nelayan tanpa menyebut pejabat secara eksplisit. Opini dalam berita sering disisipkan dalam bentuk kritik atau dorongan kepada pemerintah untuk bertindak. Penutup artikel cenderung memperkuat harapan warga atau seruan keadilan atas perlakuan yang dianggap tidak adil.

#### Struktur Skrip

Dalam struktur skrip, Kompas.com menyusun informasi dengan elemen 5W + 1H secara lengkap. *What* difokuskan pada temuan pagar laut yang tidak memiliki izin. *Where* dituliskan secara detail di wilayah perairan Tangerang. *When* ditunjukkan secara spesifik, misalnya pada temuan Agustus 2024 dan tindakan penyegelan di awal 2025. *Who* melibatkan pejabat seperti Prabowo, KKP, hingga TNI AL. *Why* dijelaskan sebagai bentuk pelanggaran tata ruang laut, dan *How* diuraikan melalui proses penegakan hukum, penyegelan, hingga pembongkaran pagar. Penyusunan ini menunjukkan bahwa *framing* Kompas.com diarahkan untuk mendukung peran negara dan penegakan hukum melalui jalur formal.

Beritabanten.com memiliki struktur skrip yang berbeda. *What* dalam berita adalah dampak sosial terhadap kehidupan nelayan. *Where* disebutkan secara umum, seperti “pesisir Banten” atau “kampung nelayan.” *When* disampaikan dengan pendekatan naratif, seperti “berbulan-bulan lamanya.” *Who* lebih banyak berasal dari kutipan warga dan tidak menonjolkan aktor institusi. *Why* dipahami sebagai ketimpangan akses terhadap ruang laut, dan *How* dijelaskan melalui pengalaman warga yang terhambat melaut, disertai kesaksian akan kondisi yang tidak menentu. Penyusunan skrip ini mbingkai kasus sebagai konflik sosial, bukan sekadar pelanggaran hukum.

#### Struktur Tematik

Kompas.com membangun tema pemberitaan dengan *framing* sistemik. Paragraf-paragraf awal menjelaskan fakta temuan pagar laut, lalu dilanjutkan dengan respons pemerintah, penyelidikan, serta tindakan hukum. Kalimat-kalimat yang digunakan cenderung padat dan informatif, serta disusun secara kronologis. Hubungan antar kalimat didasarkan pada pengembangan logis dari satu peristiwa ke peristiwa berikutnya. Tema besar yang dibentuk adalah penataan ruang laut, pelanggaran perizinan, dan penegakan hukum sebagai solusi struktural. Tema ini mencerminkan pendekatan media yang berorientasi pada fungsi kontrol terhadap jalannya regulasi negara.

Beritabanten.com menyusun tema dengan titik berat pada ketimpangan sosial dan perjuangan warga pesisir. Paragraf dibuka dengan pengalaman atau keluhan warga, kemudian berkembang menjadi narasi kritis terhadap minimnya perlindungan negara terhadap nelayan. Kalimat yang digunakan bersifat deskriptif dan ekspresif. Hubungan antar kalimat dibangun berdasarkan emosi dan tekanan sosial, bukan kronologi. Tema sentral yang terbentuk adalah keterasingan warga dari ruang hidupnya sendiri karena intervensi pihak berkuasa, serta lemahnya keadilan bagi komunitas lokal. *Framing* tematik difokuskan untuk menggugah empati dan kesadaran pembaca.

Struktur Retoris	Kompas.com menerapkan gaya bahasa yang netral dan birokratis. Kata-kata yang digunakan bersifat teknis, seperti “sertifikasi KKPRL”, “zonasi laut”, “reklamasi ilegal”, dan “penyegehan.” Tidak ditemukan idiom atau metafora, dan struktur kalimat menekankan pada objektivitas serta profesionalisme. Gambar yang ditampilkan berupa dokumentasi sidak, pagar laut, serta aktivitas formal lembaga negara. Tidak ada grafik visual yang dominan, namun data dimasukkan dalam bentuk narasi.	Beritabanten.com menampilkan gaya retorik yang menekankan kedekatan dengan warga, namun tidak sepenuhnya emosional atau dramatis. Diksi yang digunakan relatif sederhana dan komunikatif, dengan mengedepankan suara masyarakat tanpa hiperbola. Tidak ditemukan penggunaan idiom yang berlebihan atau metafora yang kuat, melainkan narasi yang bersumber dari pengalaman langsung warga. Visualisasi dalam pemberitaan didominasi oleh dokumentasi lapangan seperti suasana pantai, pagar laut, dan aktivitas masyarakat sekitar. Gambar digunakan untuk memperkuat konteks peristiwa, bukan untuk membentuk reaksi emosional berlebihan. Tidak terdapat grafik atau infografis, karena pemberitaan lebih mengandalkan narasi deskriptif dan kesaksian langsung warga.
------------------	---	--

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Melalui hasil tabel diatas, terdapat beberapa perbedaan dari pembedaan pemberitaan dari media: nasional Kompas.com serta lokal Beritabanten.com mengenai Pemberitaan Kasus Pagar Laut Tangerang dalam periode Januari – Februari 2025 dengan kriteria pengungkapan kasus dan reaksi pemerintah, proses hukum dan penyelidikan, tindakan lapangan atau pembongkaran, dilanjutkan dengan proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut, dan penyelesaian administratif.

Pada struktur sintaksis, Kompas.com mengedepankan penyusunan informasi secara faktual dan institusional. Judul-judul beritanya disusun dalam kalimat aktif dan langsung menampilkan aktor institusi seperti KKP atau Presiden Prabowo. Lead beritanya menempatkan tindakan resmi negara dan kronologi kejadian sebagai elemen utama. Informasi diperkuat dengan kutipan dari pejabat formal serta narasi yang netral tanpa opini wartawan. Penutup berita mengarah pada penyelesaian administratif atau langkah kebijakan lanjutan, sehingga menggambarkan negara sebagai penyelesaian masalah. Sebaliknya, Beritabanten.com menerapkan pendekatan sintaksis berbasis human interest. Judul beritanya lebih panjang, emosional, dan menekankan pengalaman warga. Lead sering kali diawali dengan penderitaan masyarakat, diikuti narasi yang berasal dari warga atau tokoh

lokal. Kutipan yang disajikan bersifat lokal, tanpa banyak keterlibatan institusi resmi. Penutup berita lebih menekankan harapan masyarakat atau seruan keadilan.

Dalam struktur skrip, Kompas.com menyusun elemen 5W + 1H secara lengkap dan eksplisit. Mulai dari temuan pagar laut ilegal (*What*), lokasi perairan Tangerang (*where*), waktu spesifik mulai Agustus 2024 (*when*), aktor institusi seperti KKP dan TNI AL (*who*), alasan berupa pelanggaran tata ruang laut (*why*), hingga proses hukum dan penyegelan (*how*). Penyusunan skrip ini menunjukkan *framing* berita yang legal-formal dan terstruktur. Sementara itu, Beritabanten.com lebih menekankan pada *What* berupa penderitaan warga dan *Why* yang dikaitkan dengan ketimpangan akses serta ketidakhadiran negara. *Who* diwakili oleh warga tanpa penekanan pada lembaga. *Where* dan *When* disampaikan secara umum, sedangkan *How* dijelaskan melalui kesaksian langsung warga. *Framing* ini memperlihatkan kasus sebagai konflik sosial, bukan semata pelanggaran administratif.

Dari segi struktur tematik, Kompas.com membingkai kasus pagar laut dalam konteks sistem kebijakan, penegakan hukum, dan regulasi tata ruang laut. Artikel disusun dengan paragraf yang saling berhubungan secara logis dan kronologis. Tema utama yang muncul adalah kegagalan pengawasan dan perlunya penertiban tata ruang laut oleh negara. Sementara itu, Beritabanten.com mengembangkan tema yang menonjolkan ketimpangan sosial dan perjuangan masyarakat pesisir. Artikel dimulai dengan pengalaman atau keluhan warga dan berkembang menjadi kritik terhadap lemahnya perlindungan negara terhadap komunitas lokal. Tema utama yang dibentuk adalah keterasingan warga dari ruang hidup, ketidakadilan hukum, dan desakan agar negara hadir secara adil.

Di struktur retorik, Kompas.com menggunakan gaya bahasa yang netral, teknis, serta birokratis. Kata-kata seperti “sertifikat KKPRL”, “zonasi laut”, dan “penyegelan” dominan digunakan. Tidak ditemukan idiom atau metafora, dan visualisasi yang disajikan berupa dokumentasi resmi dari lembaga negara. Hal ini memperkuat kesan objektivitas dan profesionalisme. Sebaliknya, Beritabanten.com menyajikan retorika yang komunikatif dan dekat dengan warga, meskipun tidak terlalu emosional atau dramatis. Kata-kata yang digunakan sederhana dan bersumber dari pengalaman langsung warga. Tidak ditemukan metafora atau idiom

berlebihan. Gambar lebih banyak menunjukkan suasana lapangan dan aktivitas warga, bukan untuk mengeksploitasi emosi pembaca, melainkan untuk memperkuat konteks peristiwa secara realistis.

Hasil penelitian yang dianalisis menggunakan model *framing* Pan dan Kosicki memperlihatkan bahwasanya Kompas.com serta Beritabanten.com memiliki pendekatan yang berbeda dalam membingkai kasus pagar laut di Tangerang, dan perbedaan ini selaras dengan kerangka konseptual yang dijelaskan pada Bab II. Kompas.com cenderung menggunakan struktur wacana yang sistematis, dengan penekanan kuat pada aspek legalitas, otoritas negara, dan urgensi regulasi tata ruang laut. Melalui struktur sintaksis dan tematik, media ini menyusun narasi yang bersandar pada kutipan resmi, data teknis, serta diksi-diksi yang mengesankan bahwa pagar laut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum ruang laut. Hal ini menunjukkan bahwa Kompas.com mengadopsi prinsip-prinsip dari jurnalisme lingkungan, yakni menekankan aspek kebijakan, kerusakan ekologis, dan dampak terhadap masyarakat, serta menghadirkan fakta yang bertujuan membangun kesadaran publik terhadap pentingnya pelestarian laut.

Sebaliknya, Beritabanten.com menyusun beritanya dengan gaya yang lebih dekat dengan masyarakat lokal, terutama dengan menghadirkan perspektif warga dan tokoh daerah. *Framing* yang dibangun cenderung berfokus pada peristiwa administratif atau konflik sosial yang muncul di tingkat akar rumput. Struktur retorik dalam berita-berita Beritabanten.com menunjukkan penggunaan kutipan personal dan penekanan pada penderitaan warga, yang mencerminkan pendekatan berbasis *human interest*. Jika dikaitkan dengan konsep media daring, kedua media menunjukkan fungsi digital mereka sebagai pembentuk realitas Kompas.com dengan gaya nasional dan kebijakan, sedangkan Beritabanten.com dengan gaya lokal dan sosial. Ini sesuai dengan teori media daring yang menyebutkan bahwa media digital saat ini tidak hanya memberi informasi secara cepat, tetapi juga berkompetisi dalam membentuk persepsi melalui narasi yang disusun secara strategis.

Dalam konteks berita lingkungan, Kompas.com lebih konsisten dalam menyajikan informasi yang menyinggung degradasi ekosistem laut, serta menghadirkan visualisasi dan analisis mendalam terhadap potensi kerusakan

ekologis akibat pemasangan pagar (*indepth reporting*). Ini mencerminkan fungsi edukatif dan advokatif dari berita lingkungan. Sementara itu, Beritabanten.com lebih banyak menekankan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat nelayan, meskipun kurang menonjolkan sisi ekologis secara eksplisit. Namun keduanya tetap memiliki peran penting dalam mengangkat kasus pagar laut sebagai masalah publik. Jika dilihat dari sudut nilai berita, kasus ini memiliki kekuatan dari segi konflik (*conflict*), kedekatan (*proximity*), dampak sosial (*consequence*), serta aktualitas (*timeliness*), sehingga layak diberitakan secara intens oleh kedua media.

Lebih jauh lagi, hasil temuan ini juga memperlihatkan bagaimana media turut berperan dalam mengonstruksi realitas sosial melalui seleksi kasus, cara penyajian, dan penguatan narasi tertentu. Kompas.com, dengan pendekatannya yang berbasis pada sumber resmi dan legalitas, membentuk realitas objektif dan simbolik tentang pagar laut sebagai bentuk pelanggaran yang harus ditindak. Sementara itu, Beritabanten.com membangun realitas sosial yang lebih subjektif, berdasarkan pengalaman langsung nelayan dan warga lokal yang merasa terdampak oleh pembangunan pagar tersebut. Ini selaras dengan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann dalam (Bungin, 2020) mengemukakan bahwasanya realitas dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, serta internalisasi di tengah masyarakat.

Model analisis *framing* dari Pan dan Kosicki yang dipergunakan di studi ini juga terbukti tepat, karena mampu menelaah bagaimana masing-masing elemen berita (struktur sintaksis, skrip, tematik, serta retorik) dipakai secara strategis oleh media untuk menyampaikan makna yang diinginkan. Dalam konteks kasus pagar laut, *framing* yang dibangun oleh Kompas.com lebih berorientasi pada pembentukan opini melalui otoritas kebijakan dan dampak ekologis, sedangkan Beritabanten.com lebih memusatkan perhatian pada konflik sosial dan suara masyarakat lokal. Kedua pendekatan ini merefleksikan bagaimana narasi media tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga menyaring dan membentuk cara publik memahami suatu isu. Maka itu, temuan di studi ini mempunyai relevansi yang kuat dengan seluruh konsep teoretis yang dijelaskan di Bab II, dan mendemonstrasikan bahwa media dapat memainkan peran krusial dalam

memperjuangkan keadilan ekologis dan sosial melalui *framing* pemberitaan mereka.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti terhadap pembingkai pemberitaan dari media nasional dan media lokal yaitu Kompas.com dan Beritabanten.com, Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa Kompas.com membingkai kasus pagar laut di Tangerang sebagai persoalan hukum administratif dan tata kelola ruang laut, yang harus diselesaikan melalui mekanisme institusional negara. Narasi yang dibangun menempatkan negara sebagai aktor utama dalam penyelesaian konflik, dengan fokus pada legalitas pemasangan pagar, proses penyegelan, evaluasi izin, serta tindak lanjut berupa pengawasan dan penyidikan. Kompas.com konsisten menggunakan sumber dari lembaga resmi, menyusun informasi secara vertikal dan kronologis, serta menggunakan bahasa yang netral, formal, dan teknokratis. *Framing* yang digunakan lebih menekankan pada peran institusi dan kebijakan, dengan tujuan membangun kepercayaan publik terhadap keberlangsungan fungsi kontrol negara dalam menjaga ruang laut dan kepentingan umum.

Sebaliknya, Beritabanten.com membingkai isu pagar laut sebagai bentuk nyata dari ketimpangan sosial dan keterpinggiran masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang kehilangan akses terhadap ruang hidupnya. Narasi yang dibangun bertumpu pada pengalaman langsung warga, testimoni masyarakat terdampak, dan kritik terhadap minimnya perlindungan negara terhadap kelompok marjinal. Penekanan tidak diarahkan pada aspek hukum formal, melainkan pada dimensi sosial dan kemanusiaan dari kebijakan yang dirasa merugikan masyarakat. Dengan pendekatan ini, Beritabanten.com lebih memilih untuk menunjukkan bahwa pagar laut bukan hanya masalah administratif, melainkan simbol dari pengabaian hak rakyat kecil. Bahasa yang digunakan lebih komunikatif dan naratif, sumber berita berasal dari warga lokal, dan visual yang disajikan memperkuat kedekatan dengan realitas masyarakat pesisir.

Perbedaan ini mencerminkan orientasi dan kepentingan masing-masing media dalam menyampaikan realitas sosial kepada publik. Kompas.com, sebagai media nasional dengan cakupan luas, mengedepankan pendekatan legal-formal dan netralitas jurnalistik, menyesuaikan diri dengan standar peliputan kebijakan publik.

Sementara itu, Beritabanten.com, sebagai media lokal, lebih menekankan pada perspektif sosial-kultural dan advokatif, dengan misi mengangkat suara warga yang sering kali terpinggirkan dalam wacana pembangunan.

Dengan demikian, meskipun keduanya melaporkan isu yang sama, yaitu kasus pagar laut Tangerang, cara keduanya membingkai isu tersebut sangat dipengaruhi oleh posisi media, latar audiens, dan nilai-nilai yang ingin mereka tegakkan dalam ruang publik.

